



**Kementerian  
Perindustrian**  
REPUBLIK INDONESIA



# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025

---

BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN  
JASA INDUSTRI  
BALAI BESAR STANDARDISASI  
DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI AGRO



**Kementerian  
Perindustrian**  
REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
TAHUN ANGGARAN 2025**

BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI  
**BALAI BESAR STANDARDISASI**  
**DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI AGRO**

## KATA PENGANTAR

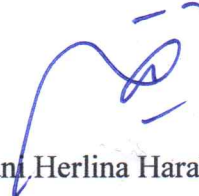
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) ini. LAKIN Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro (BBSPJIA) Tahun 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi BBSPJIA yang disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan disusunnya laporan ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang dicapai oleh BBSJIA pada tahun 2025. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kinerja yang telah dicapai oleh BBSPJIA dalam melaksanakan Tupoksinya dan dapat menjadi bahan masukan bagi pemangku kepentingan serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja BBSPJIA pada masa yang akan datang.

Akhir kata kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro Tahun 2025 ini.

Bogor, Januari 2026

Kepala Balai Besar Standardisasi dan  
Pelayanan Jasa Industri Agro



Yuni Herlina Harahap

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri disebutkan bahwa Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro (BBSPJIA) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, dinyatakan bahwa BBSPJIA dipimpin oleh seorang Kepala yang membawahi Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional serta berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No 517/KMK.05/2009 tanggal 28 Desember 2009, telah ditetapkan sebagai satuan kerja yang memiliki kewenangan untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) yang berada di bawah Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Kementerian Perindustrian.

Visi BBSPJIA ditetapkan sebagai berikut **Menjadi badan layanan umum yang akuntabel, adaptif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan dalam mewujudkan industri bidang agro yang mandiri, maju dan berkelanjutan.** Upaya BBSPJIA dalam mencapai visinya perlu didukung oleh kekuatan SDM yang memiliki nilai dasar ASN “BerAKHLAK” yakni Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif sesuai dengan tujuan pembangunan industri bidang agro dengan Misi BBSPJIA tahun 2025-2029 adalah **“Peningkatan kemandirian, daya saing dan kolaborasi industri melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi dan jasa industri agro”.**

Sasaran strategis BBSPJIA adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BBSPJIA yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program/kegiatan, sementara Indikator Sasaran Strategis adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis BBSPJIA.

Seluruh indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab BBSPJIA adalah turunan dari tingkat BSKJI sesuai dengan metode cascading. Pada Tahun 2025 memiliki 1 Tujuan dan 7 (tujuh) Sasaran Strategis/Kegiatan BBSPJIA dengan 18 (delapan belas) indikator sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri (TJ):
  - a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (indeks);
  - b. Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/ instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri (Perusahaan Industri/Pelaku Usaha/Instansi).
- 2) Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional (SK1):
  - a. Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai Service Level Agreement (SLA) (Persen);
  - b. Nilai Net Promoter Score (NPS) (Nilai).
- 3) Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri (SK2):
  - a. Indeks Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (Indeks);
  - b. Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri (Hasil Layanan);
  - c. Nilai Revenue on Asset (RoA) (Persen);
  - d. Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO) (Persen).
- 4) Terwujudnya SDM yang profesional (SK3) :
  - a. Rata-rata indeks profesionalitas ASN (Indeks).
- 5) Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik (SK4) :
  - a. Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI (Persen);
  - b. Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Persen);
  - c. Indeks Pelayanan Publik (IPP) (Indeks).
- 6) Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien (SK5) :
  - a. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker (Persen);
  - b. Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan) (Nilai).
- 7) Terwujudnya akuntabilitas organisasi (SK6) :
  - a. Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker (Nilai);
  - b. Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) (Nilai);
  - c. Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan (Nilai).
- 8) Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri (SK7) :
  - a. Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah Nilai minimal laporan keuangan (Persen).

Rata-rata capaian kinerja 18 (delapan belas) indikator sasaran strategis sebesar 116,46 %, dengan rincian 15 (lima belas) indikator kinerja capaiannya 100% ke atas dan 3 (tiga) indikator capaian masih dibawah 100%.

Realisasi anggaran Tahun 2025 sebesar Rp. 43.069.507.909,- atau 95,84% dari pagu sebesar efektif Rp. 44,939,538,000,-. Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2024 (98,28%) terhadap realisasi pada tahun 2025 (95,84%) mengalami penurunan sebesar 2,44 %. Realisasi anggaran tahun 2025 terdiri dari 1) realisasi penyerapan anggaran yang bersumber Rupiah Murni (RM) sebesar Rp.11.471.725.161,- atau 92,63% dari pagu RM sebesar Rp. 11.556.741.000,- dan 2) realisasi penggunaan anggaran bersumber PNBP BLU sebesar Rp.31.589.328.712,- atau 94,63% dari pagu yang bersumber PNBP sebesar Rp. 33.382.797.000,-.

Realisasi Penerimaan PNBP BLU Tahun 2025 sebesar Rp.32.634.323.030,- atau 109,57% dari target sebesar Rp 29.800.000.000,- jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 (Rp 36.704.633.828,-) PNBP tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 11,04 %.

Kendala umum secara keseluruhan dalam mencapai sasaran dalam Perjanjian Kinerja BBSPJIA Tahun 2025 yaitu ada beberapa layanan yang jumlah kliennya tidak memenuhi target. Terkait dengan layanan sertifikasi, proses administrasi melalui SIINAS membutuhkan waktu yang cukup lama dan pelanggan mengalami kesulitan dalam pemenuhan berbagai dokumen yang harus dilengkapi. Adanya penurunan penerimaan layanan sertifikasi juga berdampak langsung kepada penurunan penerimaan klien layanan pengujian. Selain itu kegiatan bimbingan teknis, pelatihan dan pendampingan dari para pelanggan seperti pemerintah daerah mengalami penurunan karena efisiensi anggaran.

Hambatan dan kendala umum secara keseluruhan dalam mencapai target kinerja output kegiatan adalah adanya kebijakan efisiensi anggaran sehingga anggaran yang semula bisa diakomodir oleh rupiah murni menjadi sangat terbatas dan harus ditanggulangi dengan anggaran PNBP BLU, yang pada akhirnya kegiatan yang dibiayai PNBP menjadi tidak maksimal. Blokir anggaran pada pengadaan peralatan laboratorium juga mengganggu kelancaran pelaksanaan layanan jasa teknis. Beberapa peralatan yang sangat dibutuhkan untuk menggantikan peralatan yang sudah rusak menjadi tertunda pengadaannya.

Berdasarkan kendala yang dihadapi maka BBSPJIA perlu melakukan beberapa langkah tindak lanjut yaitu:

- Pelayanan kepada pelanggan (industri) harus tetap dilaksanakan dengan optimal dan prima.
- Pengembangan dan penambahan ruang lingkup layanan serta penyempurnaan aplikasi untuk menunjang layanan.
- Untuk mendukung optimalisasi penyerapan anggaran pada pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya, masing-masing koordinator kegiatan diharapkan agar lebih cermat dalam menyusun rencana kinerja berikut rencana penyerapan anggaran serta melakukan identifikasi atas potensi anggaran yang tidak terserap.

Menteri Keuangan telah mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 358/KMK.05/2018 Tentang Penerapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Balai Besar Industri Agro (BBSPJIA) pada BSKJI, Kementerian Perindustrian, pada tanggal 2 Mei 2018, dengan diberlakukannya Remunerasi BLU ini maka BBSPJIA dituntut untuk lebih mandiri lagi karena tidak lagi ditunjang oleh sumber pembiayaan yang berasal dari Rupiah Murni (RM) dalam hal pembayaran Tunjangan Kinerja pegawainya, dan yang lebih penting lagi, penerapan Remunerasi BLU ini harus diikuti dengan perubahan *mindset* dan paradigma dari seluruh stakeholder BBSPJIA agar menjadi Satker yang lebih profesional didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas serta menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat.

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>	ii
<b>DAFTAR ISI</b>	vi
<b>BAB. I      PENDAHULUAN</b>	
1.1.      Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) BBSPJIA	I-1
1.2.      Peran Strategis Organisasi	I-3
1.3.      Struktur Organisasi BBSPJIA	I-13
<b>BAB. II     PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	
2.1.      Rencana Strategis Organisasi	II-3
2.2.      Rencana Kinerja	II-5
2.3.      Rencana Anggaran	II-6
2.4.      Dokumen Perjanjian Kinerja	II-15
Rencana Aksi Kegiatan TA. 2025	II-22
<b>BAB. III    AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1.      Analisa Capaian Kinerja	III-1
3.1.1     Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja	III-3
1      Tujuan Tahun 2025.	III-3
a. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	III-3
b. Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri.	III-4
2      Sasaran Strategis I (SK1): Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	III-4
a. Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement (SLA).	III-5
b. Nilai Net Promote Score (NPS)	III-8
3      Sasaran Strategis II (SK2): Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	III-11
a. Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	III-12
b. Jumlah hasil layanan jasa industri	III-15
c. Nilai Revenue on Asset (RoA)	III-18

	d. Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)	III-20
4	Sasaran Strategis III (SK3): Terwujudnya SDM yang profesional dengan Indikator Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	III-23
5	Sasaran Strategis IV (SK4): Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik	III-26
	a. Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	III-27
	b. Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	III-29
	c. Indeks Pelayanan Publik (IPP)	III-32
6	Sasaran Strategis V (SK5): Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	III-35
	a. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal telah ditindaklanjuti oleh Satker	III-35
	b. Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)	III-38
7	Sasaran Strategis VI (SK6): Terwujudnya akuntabilitas organisasi	III-41
	a. Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	III-42
	b. Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	III-45
	c. Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan	III-47
8	Sasaran Strategis VII (SK7): Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri	III-50
3.1.2	Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Renstra BBSPJIA TA. 2025- 2029	III-54
3.2	Akuntabilitas Keuangan	III-57
3.2.1	Realisasi Anggaran Keuangan (RM + PNBPN BLU)	III.57
3.2.2	Realisasi Anggaran Keuangan	III.68
3.4	Penghargaan BBSPJIA TA. 2025	III.77

**BAB. IV PENUTUP**

4.1	Kesimpulan	IV.1
4.2	Permasalahan dan Kendala	IV.2
4.3	Saran dan Rekomendasi	IV.3

**LAMPIRAN**

1. Pengukuran Kinerja Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro (BBSPJIA) Tahun 2025
2. Matriks Keterkaitan Sasaran dan Indikator Kinerja BBSPJIA Tahun 2025
3. Realisasi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro (BBSPJIA Per Triwulan TA. 2025
4. Realisasi Kinerja Renstra Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro (BBSPJIA) TA. 2025-2029

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Tugas dan Fungsi Organisasi

Sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro (BBSPJIA) yang selanjutnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI). Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro mempunyai tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau, dan pelayanan jasa industri agro. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut Balai Besar Industri Agro menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan analisis, penerapan, dan pengawasan standardisasi industri agro;
- b. pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri di bidang industri agro;
- c. pendampingan dan konsultasi di bidang standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri 4.0, industri hijau, dan jasa industri di bidang industri agro;
- d. pelaksanaan pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan verifikasi di bidang industri agro;
- e. pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen, produk, teknologi, dan industri hijau di bidang industri agro;
- f. pelaksanaan fasilitasi kemitraan layanan jasa industri agro;
- g. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi;
- h. pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga; dan
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 517/KMK.05/2009 tanggal 28 Desember 2009, BBSPJIA ditetapkan sebagai instansi Pemerintah yang mendapatkan kewenangan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU). Oleh karena itu, BBSPJIA dituntut menjalankan organisasinya secara profesional dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat industri agro secara lebih baik, transparan, akuntabel, efisien, produktif, dan mandiri, terutama pada layanan unggulan BBSPJIA antara lain: pengujian, sertifikasi, sampling/ pengambilan contoh, kalibrasi, uji profisiensi, pelatihan, kerjasama penelitian dan pengembangan, rancang bangun dan perekayasaan industri, konsultasi dan inspeksi teknis.

Prinsip dasar pemerintahan yang baik adalah terdapatnya akuntabilitas publik dan transparansi dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Akuntabilitas diartikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui sarana pertanggungjawaban secara periodik. Transparan mengandung arti bahwa praktik-praktik instansi pemerintahan akan diketahui umum dan anggota masyarakat memiliki akses untuk memperoleh informasi yang benar.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 30 UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tersebut dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana, yang dilakukan melalui pemantauan dan pengawasan. Merujuk pada peraturan yang disebutkan di atas, BBSPJIA sebagai salah satu instansi pemerintah berkewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025, yang memuat kinerja yang telah dicapai, analisis capaian kinerja, hambatan dan kendala pelaksanaan, serta langkah tindak lanjutnya.

Susunan laporan mengacu sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

## 1.2. Peran Strategis Organisasi

Berdasarkan identifikasi Kementerian Perindustrian dengan mengacu pada RPJPN 2025-2045, Tahap Pembangunan Sektor Industri Jangka Panjang diilustrasikan dalam gambar berikut



Gambar 2-1 Arah Kebijakan Industrialisasi dalam RPJPN 2025-2045

Sumber: RPJPN 2025-2045

Fokus pembangunan industri dan Arah kebijakan industrialisasi RPJMN 2025-2029 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 mengangkat tema "Penguatan Ekosistem Industrialisasi dan Peningkatan Kompleksitas Produk Industri", terutama diarahkan pada penguatan standar dan hilirisasi industri yang disertai dengan penguatan ekosistem industrialisasi (riset, inovasi, standar, SDM, penerapan teknologi, regulasi, pembiayaan) dan didukung investasi di sektor prioritas. Selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2025 – 2029 berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 41 Tahun 2025 dan Peraturan Kepala BSKJI Nomor 370 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Tahun 2025 – 2029.

BBSPJIA sebagai institusi teknis melayani industri agro, berperan dalam melaksanakan kebijakan pengembangan industri nasional untuk mendukung pengembangan industri agro di Indonesia. Di samping tugas pembangunan yaitu mendorong tumbuhnya industri agro nasional, BBSPJIA secara internal mempunyai tugas,

antara lain (1) merumuskan sasaran strategis dan indikatornya; (2) melakukan perencanaan, melaksanakan dan memonitoring serta evaluasi semua kegiatan; (3) meningkatkan kompetensi dan mengembangkan potensi SDM yang dimiliki BBSPJIA serta (4) memberikan jasa layanan teknis kepada industri kecil, menengah dan besar. Dengan melaksanakan tugas tersebut, maka diharapkan akan berkembang industri agro yang kuat dan mandiri sehingga dapat memperluas lapangan kerja dan mendorong percepatan pembangunan industri nasional.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar di bawah koordinasi BSKJI, BBSPJIA memiliki peranan untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan di tingkat Kementerian Perindustrian maupun BSKJI selaku pembina teknis BLU dapat berjalan dan terlaksana dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan industri. Peranan yang dijalankan BBSPJIA di antaranya kedepannya akan melakukan pengembangan layanan diantaranya : Melakukan pengembangan layanan yang ada melalui penambahan ruang lingkup Layanan Pengujian, Layanan Kalibrasi, Layanan Sertifikasi Produk, Layanan Pemeriksa Halal (LPH), Layanan Sertifikasi Industri Hijau (LSIH), Layanan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (LSSM), Penyelenggara Uji Profisiensi (PUP), Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), Produsen Bahan Acuan, Validasi dan Verifikasi Gas Rumah Kaca dan Jasa Sampling.

Berdasarkan Peraturan Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro Nomor 375 Tahun 2025 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengenaan Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro, jasa layanan yang diberikan BBSPJIA terdiri dari 2 (dua) layanan yaitu:

#### **A. Layanan Utama :**

##### **1) Jasa Pengujian**

Laboratorium Penguji BBSPJIA (*ABICAL/Agro-Based Industry Calibration and Analytical Laboratories*) merupakan unit layanan pengujian pangan dan non pangan sejak tahun 1909. Laboratorium Penguji BBSPJIA sudah mendapat akreditasi dari NATA Australia pada tahun 1994-1999 dan sejak 1999 mendapat sertifikat ISO 17025 dari Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Industri pangan dituntut untuk menghasilkan produk yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan yang telah ditetapkan. Industri pangan yang beroperasi dan mengedarkan produk pangannya di Indonesia wajib mengikuti regulasi izin edar yang diatur oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sistem manajemen keamanan pangan yang berlaku secara internasional akan sangat baik apabila diadopsi dan diterapkan dalam industri pangan nasional.

Laboratorium Penguji BBSPJIA memberikan layanan pengujian yang akurat, independen, professional dan telah terakreditasi sesuai ISO 17025:2017 oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan nomor akreditasi LP-057-IDN.

- Ruang lingkup akreditasi (193 komoditas): Komoditas SNI Wajib pangan, produk pangan (makanan, minuman, bahan baku pangan) dan produk non pangan (air, limbah, pupuk dan pakan)
- Lebih dari 300 parameter uji : Proksimat, Mineral, Alkohol (GC), Identifikasi Fe, Identifikasi DNA babi, Vitamin (A,  $\beta$ -caroten, B1, B2, B6, Asam folat, C, D, E), Perhitungan label nutrisi (Nutrition fact), Kolesterol, Serat pangan, Komposisi asam lemak (Lemak jenuh dan tak jenuh, AA, DHA, EPA, Omega3, 6 dan 9), Cemarkan pangan (Mikrobiologi, Logam berat, PAH dan Mikotoksin), Bahan tambahan pangan (pengawet, pemanis, pewarna dan antioksidan), Kualitas AMDK (termasuk uji bromate), Analisis limbah cair dan swab test.

## 2) Jasa Kalibrasi

Jasa Kalibrasi adalah jasa layanan BBSPJIA yang memberikan pelayanan kalibrasi suhu, massa, volume, optik, dimensi, dan instrumen untuk peralatan uji. Laboratorium Kalibrasi BBIA, khususnya untuk kalibrasi massa telah diakreditasi sejak tahun 2001 oleh KAN dengan nomor sertifikat LK-036-IDN. Ruang lingkup laboratorium kalibrasi BBSPJIA adalah kalibrasi suhu, massa, volume, optik, dimensi, dan instrumen untuk peralatan laboratorium. Kalibrasi massa dilakukan terhadap anak timbang dan neraca; kalibrasi suhu terhadap oven, tanur, termometer dan sejenisnya; kalibrasi volume dilakukan terhadap alat ukur gelas; sedangkan kalibrasi optik dilakukan terhadap *Spectrofotometer* dan peralatan

untuk industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) antara lain pH-meter, TDS-meter, serta conductivitymeter. Selain itu, Laboratorium Kalibrasi BBIA mampu memberikan layanan kalibrasi di luar lingkup akreditasi, yaitu alat instrumen laboratorium (AAS, GC dan HPLC) dan optik (Refraktometer dan Polarimeter).

### 3) Layanan Sertifikasi

Jasa sertifikasi adalah jasa layanan BBSPJIA yang memberikan pelayanan sertifikasi Sistem Manajemen Mutu, Produk dan Keamanan Pangan. Sejalan dengan kebutuhan industri dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah berkaitan dengan pengawasan barang beredar, keamanan pangan dan sebagainya, secara bertahap BBIA mengembangkan Lembaga Sertifikasi, dengan lingkup layanan sebagai berikut:

- a. Lembaga Sertifikasi Produk BBIA (LS Pro-BBIA), diakreditasi KAN/BSN tahun 2004 dengan nomor LSPR-010-IDN, melayani industri agro untuk mendapatkan sertifikat produk penggunaan tanda SNI (SPPT SNI). Ruang lingkup sertifikasi SPPT-SNI yang telah diakreditasi oleh KAN meliputi 79 komoditi makanan & minuman, termasuk di dalamnya beberapa komoditi yang telah diberlakukan wajib SNI, seperti Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), tepung terigu sebagai bahan makanan, gula rafinasi, dan garam konsumsi beryodium, coklat bubuk, *coffee instant*, dan lain-lain.
- b. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (SMM) BBIA diakreditasi KAN/BSN tahun 1994 dengan nomor LSSM-003-IDN, melayani industri agro untuk mendapatkan Sertikat ISO 9001-2008 (*Quality Management System*) dengan lingkup : pertanian dan perikanan, makanan, minuman, tembakau.
- c. Lembaga Sertifikasi Manajemen Keamanan Pangan (LSMKP) BBIA.
- d. Lembaga Sertifikasi Keamanan Pangan (SMKP) memberikan jasa kepada industri yang akan menerapkan/sertifikasi sistem keamanan pangan mengacu pada sistem HACCP ISO 22000:2005.

#### 4) Jasa Verifikasi

Layanan Verifikasi merupakan layanan pemeriksaan yang dilakukan untuk memastikan kebenaran dokumen, data dan informasi dalam rangka proses penerbitan sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Gas Rumah Kaca (GRK), Validasi Gas Rumah Kaca (GRK) adalah solusi profesional untuk memastikan keakuratan dan kredibilitas data emisi karbon perusahaan. Layanan ini bertujuan membantu organisasi dari berbagai sektor untuk memenuhi standar nasional dan internasional, seperti ISO 14064, serta persyaratan regulasi yang berlaku. Dengan pendekatan berbasis data dan metodologi ilmiah, LVV-BBSPJIA memastikan bahwa laporan emisi pelanggan memenuhi kriteria transparansi, konsistensi, dan akuntabilitas yang tinggi.

LVV-BBSPJIA mengintegrasikan keahlian teknis dengan pengalaman di bidang emisi karbon. Tim ahli LVV-BBSPJIA terdiri dari profesional yang menggunakan metode terkini untuk memverifikasi dan memvalidasi data emisi dengan presisi. Proses LVV-BBSPJIA melibatkan penilaian menyeluruh atas sistem pengumpulan data, analisis inventaris emisi, serta pengujian kesesuaian terhadap metodologi yang diakui secara global. Dengan demikian, LVV-BBSPJIA membantu memastikan bahwa laporan emisi pelanggan tidak hanya akurat tetapi juga dapat diandalkan oleh berbagai pemangku kepentingan.

Verifikasi TKDN adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang/jasa untuk pencocokan capaian TKDN yang dinyatakan sendiri oleh penyedia barang/jasa dengan data-data yang diambil atau dikumpulkan dari kegiatan usaha Penyedia barang/jasa. Selain dapat dilakukan pada proses fabrikasi/produksi, capaian nilai TKDN dapat digunakan sebagai tolak ukur/syarat dalam proses lelang, monitoring, post audit terhadap proyek barang/jasa di Indonesia terutama yang Dibiayai oleh Anggaran Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga, BUMN, BUMD dan Proyek strategis lainnya.

BBSPJIA sebagai salah satu Lembaga Verifikasi Independen (LVI) yang telah ditunjuk dan ditetapkan melalui Keputusan menteri Perindustrian Nomor 4058 Tahun 2023 memberikan layanan perhitungan dan verifikasi Tingkat

Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Bobot Manfaat Perusahaan. Untuk menjamin mutu layanan, LVI BBSPJIA saat ini sedang dalam proses persiapan akreditasi SNI ISO/IEC 17029:2019.

#### 5) **Jasa Penyelenggaraan Uji Profisiensi (PUP)**

Jasa *proficiency testing* (uji profisiensi) merupakan layanan pemeriksaan jaminan mutu pelaksanaan pengujian sesuai dengan metode atau standar tertentu. Lembaga Penyelenggara Uji Profisiensi (PUP) telah terakreditasi KAN dengan nomor sertifikat akreditasi PUP-009-IND. Ruang lingkup PUP meliputi pengujian kimia dan mikrobiologi. Layanan yang diberikan kepada masyarakat industri dalam rangka penyelenggaraan uji profisiensi produk/bahan baku di bidang industri agro. Uji profisiensi merupakan salah satu instrumen jaminan mutu yang sangat penting untuk laboratorium dalam rangka memantau kinerja hasil ujinya, dengan cara membandingkan hasil ujinya dengan hasil uji laboratorium lain dalam lingkup sejenis, melalui skema uji banding antar laboratorium untuk contoh yang serupa (*interlaboratory comparisons*).

Jasa uji profisiensi yang ditawarkan oleh BBSPJIA meliputi program tahunan dan program bulanan. Program tahunan diperuntukkan sebagai jaminan mutu dari hasil uji banding antar laboratorium sedangkan program bulanan diperuntukkan untuk jaminan mutu laboratorium dalam bentuk *quality control* (grafik kendali mutu). Selain program yang ditawarkan, BBSPJIA juga melayani kerjasama uji profisiensi atas dasar permintaan. Pengguna jasa layanan uji profisiensi sebagian besar berasal dari laboratorium pengujian yang terakreditasi ISO/IEC 17025:2005, baik swasta maupun Instansi Pemerintah.

#### 6) **Jasa Produsen Bahan Acuan (PBA)**

Jasa produsen bahan acuan merupakan layanan penyedia bahan acuan yang dapat digunakan sebagai jaminan mutu hasil pengujian suatu laboratorium dan validasi pengembangan metode. Lembaga Produsen Bahan Acuan telah terakreditasi KAN dengan nomor sertifikat akreditasi PBA-007-IND. Ruang lingkup akreditasi PBA meliputi lingkup produk susu bubuk dan biskuit (parameter kadar abu dan protein).

Bahan acuan dapat digunakan sebagai jaminan mutu hasil pengujian suatu laboratorium, diantaranya yaitu mengevaluasi nilai presisi dan akurasi hasil pengujian serta mengevaluasi kompetensi dari personil atau analis laboratorium. Bahan acuan juga dapat digunakan dalam validasi pengembangan suatu metode atau bahkan pengembangan suatu produk baru yang dilakukan oleh berbagai industri, termasuk industri pangan. Penggunaan bahan acuan juga dapat membantu perusahaan untuk memastikan kualitas produk yang dihasilkan dapat memenuhi standar yang dipersyaratkan. Saat ini produsen bahan acuan yang ada di Indonesia sangat sedikit, bahkan belum ada produsen bahan acuan yang memproduksi bahan acuan untuk produk pangan. Laboratorium masih mengandalkan bahan acuan yang diproduksi dan dibeli dari luar Indonesia, dengan harga yang cukup mahal. Hal ini mendorong BBSPJIA untuk dapat mengembangkan produksi bahan acuan, khususnya bahan acuan untuk produk-produk agro. Saat ini BBSPJIA sedang mengembangkan produksi bahan acuan berupa matriks produk pangan, antara lain susu bubuk, kakao bubuk, tepung terigu dan gula rafinasi. Layanan ini memiliki potensi pasar yang cukup besar, mengingat banyaknya industri produk pangan tersebut di Indonesia. Melalui pengembangan layanan produsen bahan acuan, diharapkan dapat menjawab kebutuhan laboratorium pangan dalam menjamin mutu hasil pengujian produk pangan tersebut.

#### **7) Jasa Inspeksi Teknis**

Jasa Inspeksi Teknis merupakan layanan pemeriksaan dan evaluasi yang sistematis terhadap suatu sistem, peralatan atau fasilitas untuk memastikan kesesuaian fungsi dan sesuai standar berlaku. Lembaga inspeksi teknis telah terakreditasi oleh KAN dengan nomor sertifikat akreditasi LI-032-IDN.

Lembaga Inspeksi Teknis BBSPJIA (LI-032-IDN) atau yang lebih dikenal sebagai ABITIS (*Agro-Based Industry Technical Inspection Service*) merupakan unit kegiatan BBSPJIA yang memberikan layanan pemeriksaan nilai kecukupan panas (nilai sterilisasi, Fo dan nilai pasteurisasi, Po). Selain itu layanan inspeksi teknis juga melayani pemeriksaan distribusi suhu dan perhitungan alternatif proses.

Adapun ruang lingkup Lembaga Inspeksi Teknis BBSPJIA meliputi:

- a. Makanan dan minuman dalam kemasan (kaleng, botol, pouch).
- b. Produk farmasi: bahan/zat cair (NaCl, asam laktat, dll) dalam kemasan (botol *pouch*, ampul, vial).

Jasa Inspeksi Teknis adalah jasa layanan BBSPJIA yang diberikan kepada masyarakat industri atau lembaga pemerintahan dalam rangka pelayanan sertifikasi inspeksi teknis (*technical inspection*) bidang industri agro. Tujuan layanan inspeksi teknis ini adalah untuk membantu industri dan pihak terkait dalam melaksanakan perdagangan dalam negeri, ekspor, dan impor produk industri maupun jasa, terutama yang berkaitan dengan keselamatan pelanggan.

## 8) Jasa Konsultasi

Jasa konsultasi merupakan layanan untuk memberikan pendampingan dan rekomendasi cara pemecahan masalah teknis sesuai standar dalam rangka peningkatan daya saing industri. Ruang lingkup layanan jasa pendampingan dan konsultasi BLU meliputi konsultasi sistem manajemen dan konsultasi teknis lainnya. Dalam memberikan jasa konsultasi BBIA mempunyai SDM yang terlatih dan berpengalaman di bidangnya antara lain Teknologi Pangan, *Food Engineering*, *Food Safety*, Manajemen Laboratorium, Manajemen Mutu dan Manajemen Lingkungan.

## B. Layanan Penunjang

Adapun layanan penunjang antara lain :

### 1) Jasa Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri

Jasa pelatihan teknis yang diadakan di BBSPJIA maupun in house dengan lingkup pelatihan sistem manajemen, pelatihan bidang jasa industri lainnya berupa pelatihan kalibrasi peralatan, pelatihan pengujian laboratorium, pelatihan pengolahan pangan dan pangan serta pelatihan yang sifatnya custom sesuai permintaan. Jasa pelatihan teknis terdiri atas pelayanan pelatihan di bidang, antara lain:

- a. Pengujian (Pengujian AMDK; Terigu; Mikrobiologi; Operasional GC, HPLC, AAS; Proksimat; Cemar Logam; Pewarna; Pemanis Buatan; Pengawet; Vitamin C; Vitamin B1 dan B2; Vitamin A, D, E; Asam Lemak; Kolesterol; Antioksidan; dan Beta Karoten; dan lain-lain)
- b. Teknologi pangan
- c. Teknologi non pangan (Pengolahan Minyak Atsiri, Pakan Ternak, Kompos, Biodiesel, Bahan Pelumas, Khitin/Khitosan, Pengemasan dan Pelabelan, Penentuan Masa Simpan, Rancang Bangun Peralatan Industri)
- d. Sistem manajemen mutu (Kalibrasi Suhu, Massa dan Volume; Pengenalan dan Pendalaman ISO/IEC 17025:2008; Dokumentasi Sistem Manajemen Laboratorium; Validasi Metode Analisis Kuantitatif; Kuantitasi Ketidakpastian Pengukuran Dalam Kimia Analitik; Audit Internal Sistem Manajemen Laboratorium; Sistem Manajemen Keamanan Pangan (GMP&HACCP); Audit Internal Sistem HACCP; Tugas dan Fungsi Manajemen Puncak; Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001: 2008); dan Sistem Manajemen Pangan ISO 22000).

Pengguna jasa layanan pelatihan manajemen sebagian besar berasal dari sektor swasta terutama industri agro. Sementara pelatihan teknis (khususnya pelatihan pengolahan pangan dan non pangan) banyak diminati oleh instansi pemerintah daerah (Dinas Perindagkop) dalam rangka peningkatan mutu industri kecil binaan. Pengguna jasa layanan ini dapat menggunakan jasa pelatihan yang tersedia atau jasa paket pelatihan yang tergabung dengan jasa lainnya, seperti konsultasi atau riset.

## 2) Jasa Sampling/Pengambilan Contoh

Jasa pengambilan contoh bahan dan produk pangan serta non pangan serta swab test. Pengguna jasa layanan sampling sebagian besar berasal dari Lembaga Sertifikasi Produk dan Perusahaan Importir barang khususnya produk yang memiliki SNI Wajib.

**3) Jasa Optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan perekayasaan**

Layanan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri adalah jasa layanan BBSPJIA yang memberikan pelayanan pembuatan desain dan peralatan industri agro skala kecil menengah melalui rekayasa dan rancang bangun.

**4) Jasa Penggunaan lahan, gedung dan ruangan**

Layanan Penggunaan lahan, gedung dan ruangan adalah jasa layanan BBSPJIA yang memberikan pelayanan penggunaan lahan, gedung dan bangunan BBSPJIA seperti aula untuk dipakai oleh pihak lain.

**5) Jasa Penggunaan lahan, gedung, ruangan, peralatan dan mesin**

Jasa penyewaan lahan, gedung, ruangan, peralatan dan mesin di BBSPJIA.

**6) Layanan Penggunaan Sarana Transportasi**

Layanan Penggunaan Sarana Transportasi adalah jasa layanan BBSPJIA yang memberikan pelayanan penggunaan kendaraan operasional BBSPJIA yaitu mobil dinas untuk digunakan oleh pihak lain dengan tarif yang telah ditentukan

**7) Jasa Penggunaan Tenaga Ahli**

Jasa penggunaan tenaga ahli pegawai BLU BBSPJIA adalah penugasan pegawai BLU BBSPJIA sebagai narasumber atau sebagai instruktur sesuai dengan bidang keahlian pegawai yang bersangkutan.

**8) Jasa Pendugaan Masa Simpan**

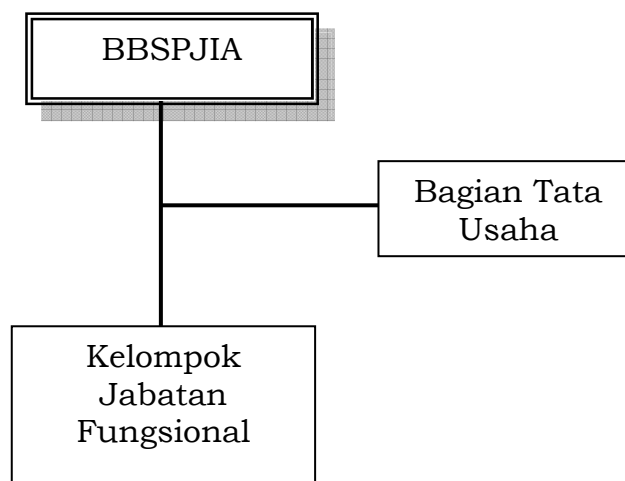
BBSPJIA memiliki layanan pendugaan umur simpan pada produk yang memiliki kadar air rendah seperti makanan ringan, biskuit, tepung-tepungan, bumbu kering, mi instan, minuman serbuk, dan lain lain. Penelitian menggunakan metode *Accelerated Shelf-Life Testing* (ASLT) model kadar air kritis yang merupakan pendekatan terbaik dan akurat dalam menentukan umur simpan pada produk berkadar air rendah

**9) Layanan Kerjasama Operasional**

Jasa kerjasama operasional untuk penggunaan kombinasi layanan jasa.

### 1.3. Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri disebutkan bahwa Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro (**BBSPJIA**) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, dinyatakan bahwa BBSPJIA dipimpin oleh seorang Kepala yang membawahi Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional, sebagai berikut Susunan Pengelola BLU-BBSJIA seperti pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi BLU-BBSPJIA

Pada tahun 2020, Pemerintah mengimplementasikan kebijakan penyederhanaan birokrasi berupa penyetaraan jabatan administrator ke dalam jabatan fungsional Ahli Madya dan jabatan pengawas ke dalam jabatan fungsional Ahli Muda. Terkait dengan hal itu, pada tanggal 6 November 2020 telah disahkan Peraturan Presiden Nomor 107 tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian. Dengan adanya Perpres tersebut, nama Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) berubah nama menjadi Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI). Selanjutnya, menindaklanjuti Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 1340 tahun 2020 pada tanggal 27 November 2020 tentang Pengangkatan dan Pemindehan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas ke dalam Jabatan Fungsional Melalui Mekanisme Penyetaraan maka struktur organisasi BBSPJIA yang baru dapat dilihat pada Gambar 1.1 diatas.

## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Visi dan Misi Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro 2025-2029 dirumuskan dengan mempertimbangkan kesesuaiannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, visi dan misi Kementerian Perindustrian serta visi dan misi BSKJI.

RPJPN 2025-2045 memuat “Visi Indonesia Emas 2045: **Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan**”. Visi Kementerian Perindustrian: “**Terwujudnya Industri Nasional Yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045**”. Adapun sebagai salah satu organ struktural Kementerian Perindustrian, visi BSKJI dalam Renstra BSKJI 2025-2029: “**Menjadi badan yang akuntabel, adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pelayanan dalam mewujudkan industri nasional yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan**”.

Selaras dengan visi BSKJI maka sesuai kompetensi dan tupoksi BBSPJIA konteks pembangunan “industri nasional” perlu ditegaskan dan diredefinisi menjadi pembangunan “industri bidang agro yang mandiri, maju, dan berkelanjutan” yang berdaya saing sehingga mampu berperan sebagai pendukung tulang punggung ekonomi nasional, dengan demikian, rumusan Visi BBSPJIA adalah sebagai berikut:

### Visi BBSPJIA:

**“Menjadi badan layanan umum yang akuntabel, adaptif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan dalam mewujudkan industri bidang agro yang mandiri, maju, dan berkelanjutan”.**

Upaya BBSPJIA dalam mencapai visinya perlu didukung oleh kekuatan SDM yang memiliki nilai dasar ASN “**BerAKHLAK**” yakni **Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif** sesuai dengan tujuan pembangunan industri bidang agro.

Selaras dengan misi Kementerian Perindustrian dan inisiatif pemerintah, arahan fokus utama Kementerian Perindustrian untuk BSKJI terkait beberapa kata kunci (keywords) (i) peningkatan nilai tambah produk dan jasa industri, (ii) pemanfaatan infrastruktur standardisasi, (iii) optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan kebijakan jasa industri,

serta (iv) pengembangan industri hijau dan Misi BSKJI: **Peningkatan kemandirian, daya saing, produktivitas, dan kolaborasi industri melalui pemanfaatan infrastruktur dan revitalisasi standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, jasa industri, dan industri hijau.**

Dengan memperhatikan dan sesuai misi BSKJI serta lingkup penugasan dalam struktur organisasi dan tata kerja, maka misi BBSPJIA dirumuskan sebagai berikut:

**Misi BBSPJIA:**

**“Peningkatan kemandirian, daya saing dan kolaborasi industri melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi dan jasa industri agro“**

Misi BBSPJIA tersebut dirumuskan dengan memperhatikan tiga aspek, yaitu kemandirian, daya saing dan kolaborasi. Ketiga faktor penting ini perlu diterapkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi BBSPJIA dengan tiga ciri sebagai berikut:

- 1) Misi BBSPJIA merepresentasikan BBSPJIA dalam mewujudkan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing industri agro, serta peningkatan peran jasa industri pendukung pembangunan industri secara profesional.
- 2) Misi BBSPJIA merepresentasikan BBSPJIA dalam mewujudkan pelayanan pembangunan industri agro yang berdaya saing;
- 3) Misi BBSPJIA merepresentasikan BBSPJIA dalam mewujudkan pelaksanaan *good governance* dalam keseluruhan aktivitas yang efektif, efisien dan akuntabel

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, BBSPJIA mempunyai tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau, dan pelayanan jasa industri agro. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BBSPJIA menyelenggarakan fungsi:

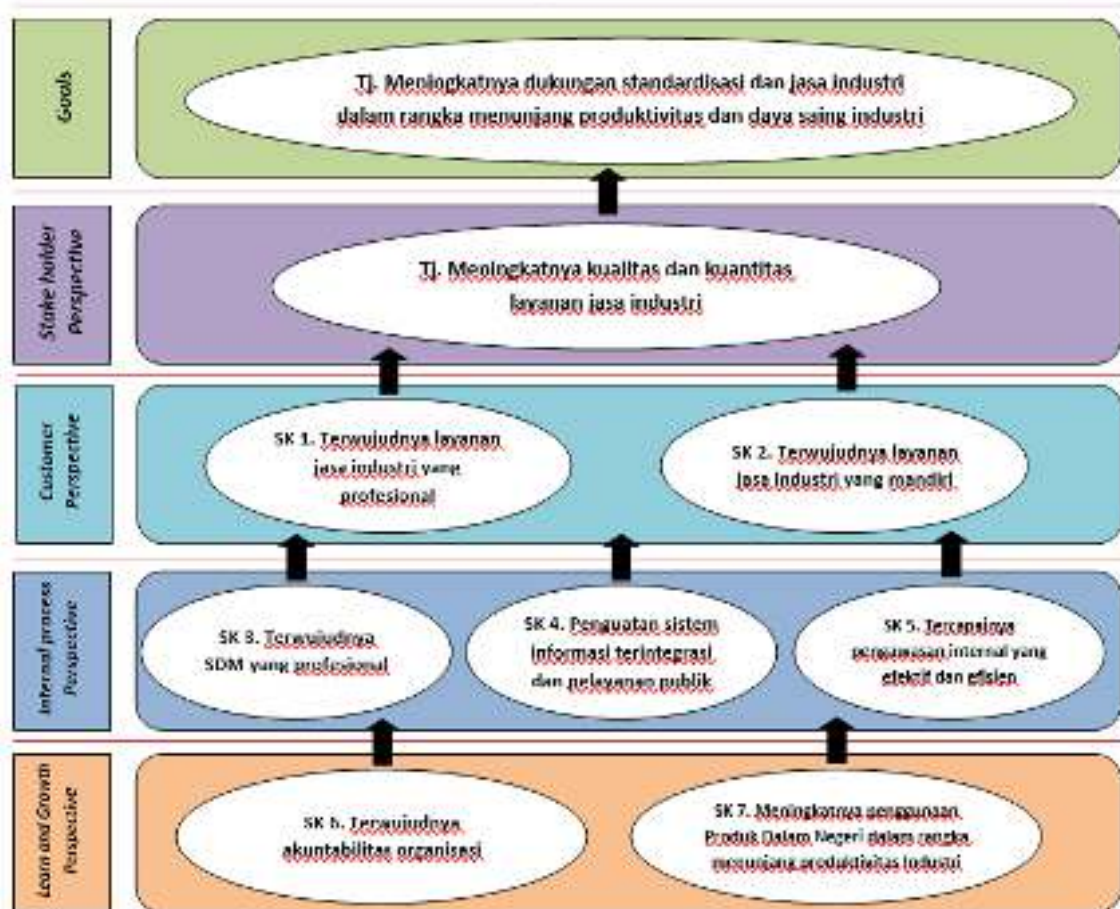
1. pelaksanaan analisis, penerapan, dan pengawasan standardisasi industri agro;
2. pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri di bidang industri agro;
3. pendampingan dan konsultasi di bidang standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri 4.0, industri hijau, dan jasa industri di bidang industri agro;
4. pelaksanaan pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan verifikasi di bidang industri agro;
5. pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen, produk, teknologi, dan industri hijau di bidang industri agro;

6. pelaksanaan fasilitasi kemitraan layanan jasa industri agro;
7. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi;
8. pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga; dan
9. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

**2.1. Rencana Strategis Organisasi**

Sasaran Strategis BBSPJIA adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BBSPJIA yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program, sementara Indikator Sasaran Strategis adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis BBSPJIA.

Seluruh indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab BBSPJIA adalah turunan dari tingkat BSKJI sesuai dengan metode cascading, ditambah dengan indikator yang merupakan tugas pokok dan fungsi BBSPJIA. Peta strategis BBSPJIA pohon kinerja dapat dilihat pada Gambar 2.1.



**Gambar 2.1. Peta strategis BBSPJIA**

Seluruh indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab BBSPJIA adalah turunan dari tingkat BSKJI sesuai dengan metode cascading. Pada Tahun 2025 memiliki 1 Tujuan dan 7 (tujuh) Sasaran Strategis/Kegiatan BBSPJIA dengan 18 (delapan belas) indikator sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri (TJ):
  - a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (indeks);
  - b. Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/ instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri (Perusahaan Industri).
- 2) Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional (SK1):
  - a. Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai Service Level Agreement (SLA) (Persen);
  - b. Nilai Net Promoter Score (NPS) (Nilai).
- 3) Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri (SK2):
  - a. Indeks Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (Indeks);
  - b. Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri (Hasil Layanan);
  - c. Nilai Revenue on Asset (RoA) (Persen);
  - d. Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO) (Persen).
- 4) Terwujudnya SDM yang profesional (SK3) :
  - a. Rata-rata indeks profesionalitas ASN (Indeks).
- 5) Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik (SK4) :
  - a. Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI (Persen);
  - b. Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Persen);
  - c. Indeks Pelayanan Publik (IPP) (Indeks).
- 6) Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien (SK5) :
  - a. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker (Persen);
  - b. Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan) (Nilai).
- 7) Terwujudnya akuntabilitas organisasi (SK6) :
  - a. Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker (Nilai);
  - b. Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) (Nilai);
  - c. Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan (Nilai).

8) Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri (SK7) :

- a. Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah Nilai minimal laporan keuangan (Persen).

## 2.2. Rencana Kinerja

Dalam rangka pengukuran dan evaluasi kinerja kegiatan BBSPJIA, maka perlu diuraikan dan ditetapkan sasaran strategis kegiatan dan indikator kinerjanya. Sasaran strategis merupakan *outcome* dari kegiatan dan *outcome* kegiatan diperoleh apabila *output* kegiatan dapat berfungsi. Tabel 2.1 berikut menggambarkan Sasaran Strategis BBSPJIA dan Rencana Kinerja BBSPJIA Tahun 2025.

**Tabel 2.1.**  
**Sasaran Strategis dan Target Indikator Kinerja BBSPJIA TA. 2025**

Kode	Sasaran Strategis (SS)		Indikator Kinerja	Target	Satuan	Ket
TJ	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,72	Indeks	IKU
		2	Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri	3.750	Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha/ Instansi	IKU
SK.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	1	Persentase pelayanan tepat waktu Layanan sesuai <i>Service Level Agreement (SLA)</i>	95,00	Persen	Non IKU
		2	Nilai <i>Net Promoter Score (NPS)</i>	50	Nilai	Non IKU
SK.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	1	Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	1	Indeks	Non IKU
		2	Jumlah hasil layanan jasa industri	20.600	Hasil Layanan	Non IKU
		3	Nilai <i>Revenue on Asset (RoA)</i>	8,40	Persen	Non IKU
		4	Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)	75,00	Persen	Non IKU
SK.3	Terwujudnya SDM yang profesional	1.	Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	81,3	Indeks	Non IKU
SK.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik	1	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	20,00	Persen	Non IKU
		2	Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	77	Persen	Non IKU
		3	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,20	Indeks	Non IKU
SK.5	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker	60	Persen	Non IKU

Kode	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja		Target	Satuan	Ket
		2	Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)	85	Nilai	Non IKU
SK.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi	1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	79,90	Nilai	Non IKU
		2	Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95,00	Nilai	Non IKU
		3	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan	75	Nilai	Non IKU
SK.7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri	1	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	81	Persen	Non IKU

### 2.3. Rencana Anggaran

Untuk melaksanakan program dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI), maka Balai Besar Industri Agro (BBIA) menyusun kegiatan dan *output*, sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) BBIA Tahun Anggaran (TA) 2025–2029 dan Rencana Kinerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) TA. 2029.

Total pagu awal anggaran BBSPJIA TA. 2025 sebesar Rp 43.216.257.000,- (Empat puluh tiga milyar dua ratus enam belas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp 13.416.257.000,- (Tiga belas milyar empat ratus enam belas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan PNBPN BLU sebesar Rp 29.800.000.000,- (Dua puluh sembilan milyar delapan ratus juta rupiah). Sehubungan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, revisi 1 tahun 2025 BBSPJIA mendapatkan efisiensi anggaran sebesar Rp 5.985.396.000,- (Lima milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang meliputi Rupiah Murni sebesar Rp 2.520.494.000,- (Dua milyar lima ratus dua puluh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dan PNBPN sebesar Rp 3.464.902.000,- (Tiga milyar empat ratus enam puluh juta sembilan ratus dua ribu rupiah). Adapun revisi ke 9 tahun 2025 penambahan pagu PNBPN terdiri dari penggunaan saldo kas sebesar Rp. 5.890.000.000,-.

Pada Tabel 2.4. terlihat pada revisi DIPA terakhir 12 Desember 2025 total pagu anggaran BBSPJIA TA. 2025 menjadi **Rp 48.873.931.000,-** yang terdiri dari RM sebesar **Rp 13.183.931.000,-** dan PNPB sebesar **Rp. 35.690.000.000,-**.

Seiring dengan adanya kebijakan relaksasi blokir anggaran dari Kementerian Keuangan. sampai akhir tahun 2025 pagu efektif BBSPJIA menjadi Rp 40.695.763.000,- (Empat puluh milyar enam ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp 10.895.763.000,- (Sepuluh milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan PNPB BLU sebesar Rp 29.800.000.000,- (Dua puluh sembilan milyar delapan ratus juta rupiah). Pada tahun 2025 DIPA BBSPJIA mengalami revisi sebanyak 14 (empat belas) kali seperti Tabel 2.4.

**Tabel 2.4.**

**Histori revisi DIPA BBSPJIA Tahun 2025**

Revisi	Nomor Revisi DIPA	Tanggal	Pagu (ribuan Rupiah)			Lokasi Revisi	Keterangan
			RM	BLU	Total		
1	SP DIPA-019.07.2.247 136/2024	21 Februari 2025	13,416,257	29,800,000	43,216,257	DJA	Efisiensi Anggaran berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 2025 sebesar Rp. 5.985.396.000,-
2	SP DIPA-019.07.2.247 136/2024	3 Maret 2025	13,416,257	29,800,000	43,216,257	DJA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Efisiensi Anggaran berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 2025</li> <li>Perubahan atau Pergeseran Rincian Anggaran dalam hal pagu anggaran tetap</li> </ul>
3	SP DIPA-019.07.2.247 136/2024	Maret 2025	13,416,257	29,800,000	43,216,257	Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov Jabar	Perubahan atau Pergeseran Rincian Anggaran dalam hal pagu anggaran tetap
4	SP DIPA-019.07.2.247 136/2025	16 April 2025	13,416,257	29,800,000	43,216,257	Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov Jabar	Ralat rencana penarikan dana atau rencana penerimaan dalam halaman III DIPA.
5	SP DIPA-019.07.2.247 136/2025	27 Mei 2025	13,416,257	29,800,000	43,216,257	DJA	Relaksasi Efisiensi Anggaran Rp. 213.235.000,-
6	SP DIPA-019.07.2.247 136/2025	5 Juni 2025	13,416,257	29,800,000	43,216,257	Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov Jabar	Perubahan atau Pergeseran Rincian Anggaran dalam hal pagu anggaran tetap

Revisi	Nomor Revisi DIPA	Tanggal	Pagu (ribuan Rupiah)			Lokasi Revisi	Keterangan
			RM	BLU	Total		
7	SP DIPA-019.07.2.247 136/2025	8 Juli 2025	13,416,257	29,800,000	43,216,257	Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov Jabar	Perubahan atau Pergeseran Rincian Anggaran dalam hal pagu anggaran tetap
8	SP DIPA-019.07.2.247 136/2025	8 Juli 2025	13,416,257	29,800,000	43,216,257	Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov Jabar	Ralat rencana penarikan dana atau rencana penerimaan dalam halaman III DIPA.
9	SP DIPA-019.07.2.247 136/2025	23 Juli 2025	13,416,257	35,690,000	49,106,257	Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov Jabar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perubahan atau Pergeseran Rincian Anggaran dalam hal pagu bertambah</li> <li>Penggunaan Saldo Kas BLU sebesar Rp. 5,890,000,000</li> </ul>
10	SP DIPA-019.07.2.247 136/2025	22 Agustus 2025	13,416,257	35,690,000	49,106,257	DJA	Relaksasi Efisiensi Anggaran Rp. 601,556,000,-
11	SP DIPA-019.07.2.247 136/2025	6 Oktober 2025	13,416,257	35,690,000	49,106,257	Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov Jabar	Perubahan atau Pergeseran Rincian Anggaran dalam hal pagu anggaran tetap.
12	SP DIPA-019.07.2.247 136/2025	10 November 2025	13,183,931	35,690,000	48,873,931	DJA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisi dalam rangka Pagu Anggaran Berubah</li> <li>Relaksasi Efisiensi Anggaran Rp. 1.236.212.000,-</li> <li>Pengurangan belanja pegawai Rp. 232.326.000,-</li> </ul>
13	SP DIPA-019.07.2.247 136/2025	12 November 2025	13,183,931	35,690,000	48,873,931	Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov Jabar	Perubahan atau Pergeseran Rincian Anggaran dalam hal pagu anggaran tetap.
14	SP DIPA-019.07.2.247 136/2025	12 Desember 2025	13,183,931	35,690,000	48,873,931	KPA	Perubahan atau Pergeseran Rincian Anggaran dalam hal pagu anggaran tetap.

Pagu tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan Tahun 2025 yang terdiri dari 2 (dua) Program, yaitu:

- 1) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, yang terdiri 2 (dua) KRO yaitu:
  - ✓ 6077.BAD : Pelayanan Publik Kepada Industri
  - ✓ 6077.CAH : Sarana Bidang Industri dan Perdagangan
- 2) Program Dukungan Manajemen, yang terdiri 3 (tiga) KRO, yaitu :
  - ✓ 6042.EBA : Layanan Dukungan Manajemen Internal
  - ✓ 6042.EBB : Layanan Sarana dan Prasarana Internal
  - ✓ 6042.EBC : Layanan Manajemen SDM Internal

**Tabel 2.5.**  
**Program dan Klasifikasi Rincian Output (KRO) BBSPJIA TA. 2025**  
**(Pagu Awal / Revisi ke -0)**

KODE	PROGRAM/KRO	Volume KRO		Anggaran
		Volume	Satuan	
<b>019.07.EC</b>	<b>Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri</b>			<b>12.169.080.000</b>
6077.BAD	Pelayanan Publik kepada industri	2298	Industri	10.619.080.000
6077.CAH	Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	5	Unit	1.550.000.000
<b>019.07.WA</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>			<b>31.047.177.000</b>
6042.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	4	Layanan	30.437.177.000
6042.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	31	Unit	190.000.000
6042.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	80	Orang	420.000.000
	<b>Total</b>			<b>43.216.257.000</b>

Setelah dilakukan revisi ke-14 DIPA, maka rincian Program dan Klasifikasi Rincian Output (KRO) seperti Tabel 2.6.

**Tabel 2.6.**  
Program dan Klasifikasi Rincian Output (KRO) BBSPJIA  
TA. 2025 (Revisi ke 14)

KODE	PROGRAM/KRO	Volume KRO		Anggaran
		Volume	Satuan	
<b>019.07.EC</b>	<b>Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri</b>			<b>16.659.080.000</b>
6077.BAD	Pelayanan Publik kepada industri	2648	Industri	12.265.480.000
6077.CAH	Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	15	Unit	4.393.600.000
<b>019.07.WA</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>			<b>32.214.851.000</b>
6042.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	4	Layanan	31.604.851.000
6042.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	31	Unit	190.000.000
6042.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	80	Orang	420.000.000
	<b>Total</b>			<b>48.873.931.000</b>

Berdasarkan kelompok Jenis Belanja, maka rincian anggaran BBSPJIA TA. 2025 pagu awal seperti pada Tabel 2.7

**Tabel 2.7.**  
Rincian Pagu Awal BBSPJIA berdasarkan Jenis Belanja TA. 2025

NO.	JENIS BELANJA	PAGU	Persentase
<b>I</b>	<b>Rupiah Murni (RM)</b>	<b>13.183.931.000</b>	<b>31%</b>
1	Belanja Pegawai [51]	10.142.889.000	
2	Belanja Barang [52]	2.973.368.000	
3	Belanja Modal [53]	300.000.000	
<b>II</b>	<b>PNBP BLU</b>	<b>29.800.000.000</b>	<b>69%</b>
1	Belanja Pegawai [51]	-	
2	Belanja Barang [52]	28.210.000.000	
3	Belanja Modal [53]	1.590.000.000	
	<b>Total</b>	<b>43,216,257.000</b>	

Pada bulan Juli 2025 telah dilakukan revisi penambahan anggaran dari saldo kas BLU sebesar Rp 5.890.000.000,- (Lima milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) yang digunakan untuk pengadaan peralatan laboratorium, peralatan penunjang operasional, bahan baku, bahan kimia, bahan penolong serta suku cadang.

Selain itu, pada bulan Nopember 2025 sudah dilaksanakan revisi anggaran berupa relaksasi blokir anggaran tahap III, dimana pagu anggaran sebesar Rp 1.236.212.000,- (Satu milyar dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus dua belas ribu rupiah) yang tadinya diblokir, dapat digunakan untuk kegiatan layanan perkantoran berupa pengadaan peralatan laboratorium, pembelian bahan kimia serta perjalanan dinas dalam rangka layanan operasional.

Setelah dilakukan revisi ke-14 DIPA pada tanggal 12 Desember 2025, maka rincian Pagu Revisi ke-14 BBSPJIA berdasarkan Jenis Belanja seperti pada Tabel 2.8.

**Tabel 2.8.**  
Rincian Pagu Revisi ke-14 BBSPJIA berdasarkan Jenis Belanja TA. 2025

NO.	JENIS BELANJA	PAGU	Persentase
<b>I</b>	<b>Rupiah Murni (RM)</b>	<b>13.183.931.000</b>	<b>26.98%</b>
1	Belanja Pegawai [51]	9.910.563.000	
2	Belanja Barang [52]	2.973.368.000	
3	Belanja Modal [53]	300.000.000	
<b>II</b>	<b>PNBP BLU</b>	<b>29.800.000.000</b>	<b>60.97%</b>
1	Belanja Pegawai [51]	-	
2	Belanja Barang [52]	28.064.000.000	
3	Belanja Modal [53]	1.736.000.000	
<b>III</b>	<b>Saldo Awal BLU</b>	<b>5.890.000.000</b>	<b>12.05%</b>
1	Belanja Pegawai [51]	-	
2	Belanja Barang [52]	3.192.400.000	
3	Belanja Modal [53]	2.697.600.000	
	<b>Total</b>	<b>48,873,931,000</b>	

Sehubungan telah terbit Keputusan Menteri Keuangan Nomor 358/KMK.05/2018 tanggal 2 Mei 2018 tentang Penerapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Balai Besar Industri Agro pada Kementerian Perindustrian, maka tunjangan kinerja dianggarkan dari anggaran PNBP BLU sendiri dan dikategorikan sebagai Belanja Barang yang bersumber dari PNBP BLU.

Penjelasan *output* semua rencana kegiatan/komponen/subkomponen yang akan dihasilkan sebagai berikut:

### **6077.BAD. Pelayanan Publik kepada Industri**

KRO ini terdiri dari 9 (sembilan) Rincian Output (RO) sesuai dengan jenis layanan teknis yang ada di BBSPJIA. Adapun RO dan volume RO BBSPJIA pada TA. 2025 ini adalah sebagai berikut:

- 1) Jasa pelayanan teknis pengujian BBSPJIA (1.300 Industri)
- 2) Jasa pelayanan teknis kalibrasi BBSPJIA (480 Industri)
- 3) Jasa pelayanan teknis sertifikasi BBSPJIA (360 Industri)
- 4) Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis BBSPJIA (60 Industri)
- 5) Jasa pelayanan inspeksi teknik BBSPJIA (35 Industri)
- 6) Jasa optimalisasi pemanfaatan teknologi industri BBSPJIA (3 Industri)
- 7) Jasa pelayanan teknis konsultasi teknis/manajemen industri BBSPJIA (10 Industri)
- 8) Jasa penyelenggaraan uji profisiensi BBSPJIA (50 Industri)

Output yang dihasilkan berfungsi untuk :

1. Memenuhi kebutuhan dunia industri terhadap jasa layanan pengujian berbagai bahan baku dan produk pangan.
2. Membantu pemeliharaan keakuratan berbagai peralatan yang dimiliki oleh pelaku industri dan institusi melalui kalibrasi berbagai peralatan tersebut.
3. Menyelenggarakan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan masyarakat/industri dan aparat pemerintah dalam hal teknologi pengolahan (Pangan dan Non-pangan), pengujian, kalibrasi, dan sistem manajemen mutu untuk pengembangan industri kecil dan menengah.
4. Merumuskan, menetapkan, merevisi standar yang digunakan oleh Badan Standarisasi Nasional dalam perumusan SNI.
5. Membantu pelaku industri atau institusi dalam menyusun dan menerapkan sistem manajemen mutu, sistem manajemen keamanan pangan, dan *set-up* Laboratorium Uji.
6. Meningkatkan peran dan kinerja BBSPJIA dalam membantu dan melayani masyarakat industri yang membutuhkan jasa layanan sertifikasi baik produk, manajemen mutu maupun sistem keamanan pangan.

7. Membantu pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) melalui perancangan peralatan produk, proses pengolahan industri agro, dan merevitalisasi peralatan proses pengolahan industri agro.
8. Menyediakan jasa litbang untuk membantu industri pangan maupun non pangan dalam meningkatkan mutu maupun diversifikasi produk, pengkajian teknologi untuk proses pengolahan maupun minimalisasi kerusakan mutu produk selama proses pengolahan maupun penyimpanan, uji coba produksi untuk studi pasar (*market research*), dan pengembangan produk baru.
9. Membantu dunia industri dalam hal menjaga keamanan pangan melalui jasa uji kecukupan panas, penanganan pencemaran lingkungan, dan uji profisiensi.

#### **6077. CAH Sarana Bidang Industri Dan Perdagangan**

KRO ini terdiri dari 1 (satu) Rincian Output (RO). Adapun RO dan volume RO BBSPJIA pada TA. 2025 ini adalah sebagai berikut:

- 1) Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan BBSPJIA (5 unit)

Output ini bertujuan untuk pengadaan Peralatan Laboratorium Pengujian, Penyelenggaraan Uji Profisiensi dan Inspeksi Teknis.

#### **6042.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal**

KRO ini terdiri dari 2 (dua) Rincian Output (RO). Adapun RO dan volume RO BBSPJIA pada TA 2025 ini adalah sebagai berikut:

- 1) 958. Layanan Hubungan Masyarakat (3 layanan), yang bertujuan sebagai sarana promosi layanan jasa teknis yang ada di BBSPJIA.
- 2) 994. Layanan Perkantoran (1 layanan), bertujuan untuk memenuhi hak atau kompensasi yang diterima oleh pegawai serta untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tupoksi BBSPJIA.

#### **6042.EBB. Layanan Sarana dan Prasarana Internal**

KRO ini terdiri dari 1 (satu) Rincian Output (RO). Adapun RO dan volume RO BBSPJIA pada TA. 2025 ini adalah sebagai berikut:

- 1) Layanan Sarana Internal (31 Unit)

Output ini terdiri atas 2 (dua) komponen, yaitu:

- 052. Pengadaan perangkat pengolahan data dan komunikasi

- 053. Pengadaan peralatan inventaris perkantoran

#### 6042.EBC. Layanan Manajemen SDM Internal

KRO ini terdiri dari 1 (satu) Rincian Output (RO). Adapun RO dan volume RO BBSPJIA pada TA. 2025 ini adalah sebagai berikut:

##### 1) Layanan Pendidikan dan Pelatihan (80 orang).

Pegawai BBSPJIA per bulan Nopember 2025 berjumlah 179 orang, yang terdiri dari PNS sebanyak 116 orang (64,8%), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K) sebanyak 28 orang (15,6%) dan Pegawai Non PNS (PHL) 35 orang (19,6%). Latar belakang pendidikan SDM BBSPJIA sebagian besar berpendidikan teknis seperti Teknik Pertanian, Teknologi Industri Pertanian, Teknologi Pangan, Teknik Kimia, Teknik Mesin, Teknik Fisika, MIPA, Kimia Analisis dan tenaga non teknis seperti Magister Manajemen, Ilmu Administrasi, Ilmu Hukum, Ekonomi Akuntansi dan Ekonomi Manajemen. SDM yang berlatar pendidikan SMP ke bawah ditempatkan pada posisi keamanan dan kebersihan.

Komposisi pegawai BBSPJIA per tanggal 31 Desember 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.4 sebagai berikut :

**Tabel 2.4. Komposisi Pegawai BBSPJIA berdasarkan status pegawai**

No	Status pegawai	Jumlah (Orang)
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	116
2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)	28
3	P3K Paruh Waktu	-
4	Pegawai Harian Lepas (PHL)	11
5	Pegawai Alih Daya ( <i>Outsourcing</i> )	24
	<b>Total</b>	<b>179</b>

Dengan penambahan sumber daya manusia baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K) yang cukup banyak di tahun 2023 sampai 2025 maka diharapkan dapat memperkuat layanan jasa teknis maupun dukungan penyelenggaraan administrasi BBSPJIA.

## 2.4. Dokumen Perjanjian Kinerja.

Dokumen Perjanjian Kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dokumen Perjanjian Kinerja disusun dengan berpedoman pada Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 5 (lima) tahunan. Dokumen Perjanjian Kinerja yang dimaksud hal ini adalah perjanjian antara Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) dengan Kepala BBSPJIA Tahun 2025, seperti Tabel 2.9 :

**Tabel 2.9.**  
**Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BBSPJIA TA. 2025**

 <p><b>Kementerian Perindustrian</b> REPUBLIK INDONESIA</p>	<p>BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI <b>BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI AGRO</b></p> <p>Jl. Ir. H. Juanda No. 11, Bogor 16122 Telp. (0251) 8324668, 8323339, Fax. (0251) 8323389 Website : www.bbbs.go.id, Email : cab@bbbs.go.id</p>
<p>PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI AGRO</p>	
<p>Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:</p>	
<p>Nama : Yuni Herlina Harahap Jabatan : Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro Selanjutnya disebut Pihak Pertama</p>	
<p>Nama : Andi Rizaldi Jabatan : Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua</p>	
<p>Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahun 2025 sesuai dengan Lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.</p>	
<p>Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.</p>	
<p>Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri</p>	<p>Jakarta, 31 Januari 2025 Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro</p>
 Andi Rizaldi	 Yuni Herlina Harahap

LAMPIRAN  
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI AGRO

Kode	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target	
TJ	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*	Indeks	3,72
		2	Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri*	Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha/ Instansi	3.750
SK.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	1	Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	Persen	95,00
		2	Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)	Nilai	30
SK.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	1	Persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persen	4,35
		2	Jumlah hasil layanan jasa industri	Hasil Layanan	20.600
		3	Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)	Persen	8,40
		4	Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)	Persen	75,00
SK.3	Terwujudnya SDM yang profesional	1	Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	Indeks	81,3
SK.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik	1	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	Persen	20,00
		2	Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Persen	80
		3	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	4,20

SK.5	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker	Persen	50
		2	Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)	Nilai	65,00
SK.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi	1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	Nilai	79,90
		2	Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai	95,00
SK.7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri	1	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	Persen	75

\*) Indikator Kinerja Utama

Kode	Program	Anggaran (Rp)
EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing	12.169.080.000
WA	Program Dukungan Manajemen	31.047.177.000
TOTAL		43.216.257.000

Jakarta, 31 Januari 2025

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri

Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro

  
Andi Rizaldi

  
Yuni Herlina Harahap

Berdasarkan hasil rapat reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025 UPT di lingkungan BSKJI dengan unit pembina yaitu Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI), maka telah disepakati untuk merevisi beberapa indikator kinerja dari sasaran strategis yang ada.

Adapun dokumen Revisi Perjanjian Kinerja Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro (BBSPJIA) Tahun 2025 adalah sebagai berikut :



**BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI  
BALAI BESAR STANDARDISASI  
DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI AGRO**

Jl. Ir. H. Juanda No. 11, Bogor 16122  
Telp. (0251) 8324068, 8323335, Fax. (0251) 8323339  
Website : www.bbja.go.id, Email : cobi@bbja.go.id

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI  
AGRO**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuni Herlina Harahap  
Jabatan : Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Emmy Suryandari  
Jabatan : Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri  
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahun 2025 sesuai dengan Lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2025

<p>Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri</p>  <p>Emmy Suryandari</p>	<p>Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro</p>  <p>Yuni Herlina Harahap</p>
--	---

LAMPIRAN  
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI AGRO

Kode	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target	
TJ	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*	Indeks	3,72
		2	Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri*	Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha/ Instansi	3.750
SK.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	1	Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	Persen	95,00
		2	Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)	Nilai	50
SK.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	1	Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Indeks	1
		2	Jumlah hasil layanan jasa industri	Hasil Layanan	20.600
		3	Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)	Persen	8,40
		4	Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)	Persen	75,00
SK.3	Terwujudnya SDM yang profesional	1	Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	Indeks	81,3
SK.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik	1	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	Persen	20,00
		2	Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Persen	77
		3	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	4,20

Kode	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran		Satuan	Target
SK.5	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker	Persen	60
		2	Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)	Nilai	85,00
SK.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi	1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	Nilai	79,90
		2	Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai	95,00
		3	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan	Nilai	75
SK.7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri	1	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	Persen	81

\*) Indikator Kinerja Utama

Kode	Program	Anggaran (Rp)
EC	Program Nilai Tambah dan DayaSaing	16.659.080.000
WA	Program Dukungan Manajemen	32.447.177.000
TOTAL		49.106.257.000

Jakarta, Desember 2025

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri



Emmy Suryandari

Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro



Yuni Herlina Harahap

Dalam rangka pencapaian Perjakin, maka perlu disusun Rencana Aksi Kegiatan TA.2024 untuk perjanjian kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.10.

**Tabel 2.10.**  
**Rencana Aksi Kegiatan TA.2025**

Kode.	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Sampai dengan Triwulan I		Sampai dengan Triwulan II		Sampai dengan Triwulan III		Sampai dengan Triwulan IV		
					Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	
TJ	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,72	Indeks	25	Membuat kuesioner survei di google form; Melaksanakan Survei; Mengolah data hasil survei	50	Membuat kuesioner survei di google form; Melaksanakan Survei; Mengolah data hasil survei	75	Membuat kuesioner survei di google form; Melaksanakan Survei; Mengolah data hasil survei	100	Membuat kuesioner survei di google form; Melaksanakan Survei; Mengolah data hasil survei
		2	Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri	3,750	Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha/ Instansi	25	Mengidentifikasi utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri yang meliputi, rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, standarisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi serta bombing dan pendampingan teknis	50	Mengidentifikasi utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri yang meliputi, rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, standarisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi serta bombing dan pendampingan teknis	75	Mengidentifikasi utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri yang meliputi, rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, standarisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi serta bombing dan pendampingan teknis	100	Mengidentifikasi utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri yang meliputi, rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, standarisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi serta bombing dan pendampingan teknis
SK1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	1	Persentase pelayanan tepat waktu Layanan sesuai Service Level Agreement (SLA)	95,00	Persen	25	Melakukan pelayanan sesuai SPM	50	Melakukan pelayanan sesuai SPM	75	Melakukan pelayanan sesuai SPM	100	Melakukan pelayanan sesuai SPM
		2	Nilai Net Promoter Score (NPS)	50	Nilai	25	Melakukan perhitungan nilai NPS Triwulan I	50	Melakukan perhitungan nilai NPS Triwulan II	75	Melakukan perhitungan nilai NPS Triwulan III	100	Melakukan perhitungan nilai NPS Triwulan IV

Kode.	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Sampai dengan Triwulan I		Sampai dengan Triwulan II		Sampai dengan Triwulan III		Sampai dengan Triwulan IV		
					Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	
SK2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	1	Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	1	Indeks	25	Mengimdetifikasi utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri yang meliputi, rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, standardisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi serta pelatihan teknis	50	Pengadaan utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri yang meliputi, rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, standardisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi serta pelatihan teknis	75	Pengadaan utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri yang meliputi, rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, standardisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi serta pelatihan teknis	100	Laporan pengadaan dan aplikasi utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri yang meliputi, rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, standardisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi serta pelatihan teknis
		2	Jumlah hasil layanan jasa industri	20,600	Hasil Layanan	25	Mengimdetifikasi utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri yang meliputi, rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, standardisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi serta pelatihan teknis	50	Pengadaan utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri yang meliputi, rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, standardisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi serta pelatihan teknis	75	Pengadaan utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri yang meliputi, rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, standardisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi serta pelatihan teknis	100	Laporan pengadaan dan aplikasi utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri yang meliputi, rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, standardisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi serta pelatihan teknis
		3	Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)	8,40	Persen	25	Melakukan perhitungan nilai RoA triwulan I	50	Melakukan perhitungan nilai RoA triwulan II	75	Melakukan perhitungan nilai RoA triwulan III	100	Melakukan perhitungan nilai RoA triwulan IV
		4	Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)	75,00	Persen	25	Melakukan perhitungan nilai rasio POBO Triwulan I	50	Melakukan perhitungan nilai rasio POBO Triwulan II	75	Melakukan perhitungan nilai rasio POBO Triwulan III	100	Melakukan perhitungan nilai rasio POBO Triwulan IV

Kode.	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Sampai dengan Triwulan I		Sampai dengan Triwulan II		Sampai dengan Triwulan III		Sampai dengan Triwulan IV	
					Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
SK3	Terwujudnya SDM yang profesional	1 Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	81,3	Indeks	25	Menginventarisir kebutuhan pelatihan Pegawai, memantau tingkat disiplin pegawai	50	Melaksanakan pelatihan/diklat peningkatan kompetensi Pegawai sesuai dengan kebutuhan, dan memantau tingkat disiplin pegawai	75	Melaksanakan pelatihan/diklat peningkatan kompetensi Pegawai sesuai dengan kebutuhan, dan memantau tingkat disiplin pegawai	100	Melaksanakan pelatihan/diklat peningkatan kompetensi Pegawai sesuai dengan kebutuhan, memantau tingkat disiplin pegawai
SK4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik	1 Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	20,00	Persen	25	Persiapan dan Koordinasi dengan Sekretariat BSKJI	50	Persiapan dan Koordinasi dengan Sekretariat BSKJI	75	Persiapan dan Koordinasi dengan Sekretariat BSKJI	100	Persiapan dan Koordinasi dengan Sekretariat BSKJI
		2 Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	77	Persen	25	Perhitungan dan evaluasi tingkat SPBE Triwulan	50	Perhitungan dan evaluasi tingkat SPBE Triwulan	75	Perhitungan dan evaluasi tingkat SPBE Triwulan	100	Perhitungan dan evaluasi tingkat SPBE Triwulan
		3 Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,20	Indeks	25	Melakukan pelayanan sesuai SPM	50	Melakukan pelayanan sesuai SPM	75	Melakukan pelayanan sesuai SPM	100	Melakukan pelayanan sesuai SPM
SK5	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	1 Persentase Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker	60	Persen	25	Mengoptimalkan fungsi SPI secara independen	50	Mengoptimalkan fungsi SPI secara independen	75	Mengoptimalkan fungsi SPI secara independen	100	Mengoptimalkan fungsi SPI secara independen
		2 Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)	85,00	Nilai	25	Pelaksanaan sistem kearsipan secara tertib dan sistematis	50	Pelaksanaan sistem kearsipan secara tertib dan sistematis	75	Pelaksanaan sistem kearsipan secara tertib dan sistematis	100	Pelaksanaan sistem kearsipan secara tertib dan sistematis

Kode.	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Sampai dengan Triwulan I		Sampai dengan Triwulan II		Sampai dengan Triwulan III		Sampai dengan Triwulan IV		
					Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	
SK6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi	1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	79,90	Nilai	25	Menyusun dokumen AKIP sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu serta diarsipkan dengan baik	50	Menyusun dokumen AKIP sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu serta diarsipkan dengan baik	75	Menyusun dokumen AKIP sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu serta diarsipkan dengan baik	100	Menyusun dokumen AKIP sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu serta diarsipkan dengan baik
		2	Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95,00	Nilai	25	Melaporkan keuangan secara transparan dan tepat waktu	50	Melaporkan keuangan secara transparan dan tepat waktu	75	Melaporkan keuangan secara transparan dan tepat waktu	100	Melaporkan keuangan secara transparan dan tepat waktu
		3	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan	75	Nilai	25	Penyusunan laporan keuangan secara sistematis, akuntabel dan tepat waktu	50	Penyusunan laporan keuangan secara sistematis, akuntabel dan tepat waktu	75	Penyusunan laporan keuangan secara sistematis, akuntabel dan tepat waktu	100	Penyusunan laporan keuangan secara sistematis, akuntabel dan tepat waktu
SK7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri	1	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	81	Persen	25	Penyusunan dokumen Pengadaan barang dan jasa dari perusahaan lokal yang kompetitif	50	Pengadaan barang dan jasa dari perusahaan lokal yang kompetitif	75	Pengadaan barang dan jasa dari perusahaan lokal yang kompetitif	100	Pengadaan barang dan jasa dari perusahaan lokal yang kompetitif

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1. Analisis Capaian Kinerja

Keberhasilan kinerja Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro (BBSPJIA) sampai dengan tahun 2025 dapat dilihat dari target dan capaian Sasaran Strategis yang telah dirumuskan di Renstra Bisnis BBSPJIA yang selanjutnya diturunkan pada Rencana Kerja/Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2025. Tujuan dan Sasaran Strategis BBSPJIA dapat tercapai jika asumsi-asumsi yang telah ditetapkan teenuhi dan didukung oleh SDM yang berintegritas serta kompeten serta dukungan dari sarana prasarana yang memadai. Hasil yang telah dicapai untuk setiap indikator kinerja Sasaran Strategis kegiatan sampai dengan akhir Tahun 2025 seperti pada Tabel 3.1.

**Tabel 3.1.**  
**Capaian Sasaran Strategis BBSPJIA Tahun 2025**

Kode	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran		Target	Satuan	Capaian	
						Realisasi	%
1	2	3		5	4	6	7
TJ	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3.72	Indeks	3.76	101.08%
		2	Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/ instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri	3750	Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha/ Instansi	3,734	99.57%
SK.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	1	Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai <i>Service Level Agreement (SLA)</i>	95.00	Persen	100	105.26%
		2	Nilai <i>Net Promote Score (NPS)</i>	50.00	Nilai	72.99	145.98%
SK.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	1	Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	1	Indeks	2	200.00%
		2	Jumlah hasil layanan jasa industri	20600	Hasil Layanan	23090	112.09%
		3	Nilai <i>Revenue on Asset (RoA)</i>	8.40	Persen	9.27	110.36%
		4	Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)	75.00	Persen	97.48	129.97%

Kode	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran		Target	Satuan	Capaian	
						Realisasi	%
1	2	3		5	4	6	7
SK.3	Terwujudnya SDM yang profesional	1	Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	81.30	Indeks	78..03	95.98%
SK.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik	1	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	20.00	Persen	20.00	100.00%
		2	Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	77.00	Persen	78.3	101.69%
		3	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4.20	Indeks	4.35	103.57%
SK.5	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	1	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal telah ditindaklanjuti oleh Satker	60	Persen	100	166.67%
		2	Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)	85.00	Nilai	89.50	105.29%
SK.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi	1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	79.90	Nilai	83.00	103.88%
		2	Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95.00	Nilai	97.14	102.25%
		3	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan	75.00	Nilai	93.00	124.00%
SK.7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri	1	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	81.00	Persen	71.84	88.69%
<b>Rata-Rata Capaian</b>							<b>116.46%</b>

Tabel 3.1. menunjukkan bahwa pada tahun 2025 rata-rata capaian indikator sasaran strategis sebesar 116,46% dari 18 (delapan belas) indikator, dengan rincian 15 (lima belas) indikator kinerja capaian sama/lebih dari 100 % dan 3 (tiga) indikator capaian masih dibawah 100 % yaitu Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/ instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri (99.57%), Indeks Profesionalitas ASN (IPASN) (95.98%) dan Persentase

penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah (88.69%). Adapun, penjelasan hasil capaian kinerja yang telah dilaksanakan dari masing-masing Sasaran Strategis adalah sebagai berikut:

### 3.1.1. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Untuk mendukung tercapainya target pada Perjanjian Kinerja BBSPJIA Tahun 2025, maka telah disusun Rencana Aksi. Hasil yang telah dicapai untuk setiap indikator kinerja sasaran strategis kegiatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

#### 1. Tujuan Tahun 2025

Realisasi dan capaian detail Program/Kegiatan akan disampaikan pada Tabel 3.2 sd Tabel 3.3.

- a. Tujuan: Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri
  - Indikator Tujuan 1 : Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Persen
Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,72	3,76	101,08
<b>Total</b>			<b>3,72</b>	<b>3,76</b>	<b>101,08</b>

Tabel 3.2. Target dan Realisasi Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Berdasarkan data diatas, dengan membandingkan realisasi dan target, maka indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2025 telah **Berhasil** mencapai target yang ditetapkan. Berdasarkan pengolahan data kuesioner yang diisi oleh pelanggan, 2 (dua) unsur yang paling rendah nilainya adalah Waktu pelayanan dan Biaya/tarif. Oleh karena itu BBSPJIA perlu meningkatkan lagi kecepatan waktu layanan dan meninjau ulang tarif yang diberlakukan saat ini.

- Indikator Tujuan 2: Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri.

Tujuan 2	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Persen
Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri	Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri	3.750	3.734	99,57

Tabel 3.3. Target dan Realisasi Indikator Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri

Berdasarkan data diatas, dengan membandingkan realisasi dan target maka indikator Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri pada tahun 2025 belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan ada beberapa layanan yang volumenya turun dibandingkan tahun lalu. Layanan yang turun cukup signifikan adalah Layanan Sertifikasi dan Layanan Bimbingan Teknis (Pelatihan).

Adapun, penjelasan hasil capaian kinerja yang telah dilaksanakan dari masing-masing Sasaran Strategis adalah sebagai berikut:

## 2. Sasaran Strategis I (SK1): Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional.

Arah kebijakan diupayakan untuk dapat menciptakan kondisi layanan jasa industri yang berkontribusi penting dalam pertumbuhan sektor industri. Hal ini sesuai dengan Sasaran Program keempat (SP 4) yang menekankan pada aspirasi “Meningkatnya jasa industri dalam rangka mendukung penumbuhan dan pengembangan industri yang inklusif”. Upaya untuk mencapai SP 4 tersebut didukung dengan dua Sasaran Kegiatan (SK) BBSPJIA, yaitu SK 6.1 Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional dan SK 6.2 Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri. Terwujudnya jasa industri yang profesional (SK 6.1) mempunyai dua indikator kinerja kegiatan yaitu IKK 6.1.1 Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai Service Level Agreement (SLA) dan IKK 6.1.2 Nilai Net Promoter Score (NPS) seperti dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut :



1) Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja SK1 Indikator 1 Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai *Service Level Agreement* (SLA).

a) Capaian dan Hasil

Indikator Sasaran Strategis (SK1) mempunyai Indikator Kinerja 1 (satu) yaitu Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai *Service Level Agreement* (SLA), target dan realisasi indikator kinerja SK1 dapat dilihat seperti pada Tabel 3.4.

**Tabel 3.4.**  
Target dan Realisasi Indikator Kinerja SK1

Sasaran Strategis (SK1)	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	95,00	100	105,26

Tabel 3.4 menunjukkan bahwa Indikator Kinerja SK1 Indikator Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai *Service Level Agreement* (SLA) dengan Target 95,00% dan Realisasi 100% sehingga capaian tahun 2025 sebesar 105,26 % dari target.

*Service Level Agreement* (SLA) pada BBSPJIA adalah komitmen tertulis antara BBSPJIA dan pihak yang menerima layanan (misalnya, perusahaan/pelakuusaha industri/pelanggan) mengenai kualitas, cakupan,

dan standar layanan yang diberikan. SLA ini biasanya mencakup beberapa elemen penting untuk memastikan layanan yang diberikan sesuai dengan harapan dan kebutuhan penerima layanan. SLA pada UPT merujuk pada Standar Pelayanan Minimum (SPM). Waktu layanan pada SLA adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu layanan. Menghitung jumlah order/SPK/transaksi yang berhasil diselesaikan tepat waktu sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) atau SLA pada tahun ke-n dibagi total order/SPK/transaksi pada tahun ke-n dikalikan 100%.

$$\begin{aligned}
 & \text{Persentase pemenuhan waktu layanan sesuai SLA} \\
 &= \frac{\sum \text{Pelayanan yang terselesaikan tepat waktu sesuai SLA}}{\sum \text{Pelayanan yang diberikan}} \times 100\% \\
 &= \frac{100}{100} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Untuk layanan yang bersifat kontrak, waktu SPM ditetapkan berdasarkan durasi kontrak. Setelah dilakukan perhitungan dan evaluasi jumlah transaksi yang berhasil diselesaikan tepat waktu terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada layanan jasa teknis pengujian, kalibrasi, sertifikasi dan inspeksi teknis pada periode Januari hingga Desember 2025 maka rata-rata ketepatan waktu bulan Desember 2025 =100 % (capaian target 95 % per bulan: 105,26 %).

Berdasarkan data diatas, dengan membandingkan realisasi dan target, maka indikator Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai *Service Level Agreement* (SLA) telah **berhasil** mencapai target yang ditetapkan tahun 2025.

Adapun sebagai perbandingan pada tahun 2025 capaian BBSPJIA dengan Satker lain dilingkungan BSKJI dengan Indikator Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai *Service Level Agreement* (SLA) dalam hal ini Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik (BBSPJIBBT) 102,86% dan Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) 107,08% sesuai tabel 3.5 menunjukkan bahwa capaian

indikator BBSPJPPI lebih tinggi serta BBSPJIBBT lebih rendah dibandingkan dengan capaian indikator BBSPJIA 105,26%.

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan Capaian 2025**  
**Sasaran Strategis Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional**

No	Indikator	Satker	Capaian 2025
1	Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	BBSPJPPI	107,08%
		BBSPJIA	105,26 %
		BBSPJIBBT	102,86%

**Tabel 3.6**  
**Target dan Realisasi Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement (SLA)**  
**Tahun 2025 - 2029**

Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	2025			2026	2027	2028	2029	
	T	R	%	T	T	T	T	
3	3	4	5	6	7	8	9	
<b>SK.1 Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional</b>								
1	Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai	95,00	100	105,26%	95,00	96,00	96,00	97,00

T= Target, R: Realisasi

Tabel 3.6 menunjukkan indikator Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement (SLA) pada tahun 2025 capaian sebesar 105,26% dengan target 95,00% dan realisasi sebesar 100%, sedangkan untuk target tahun 2026 : 95%, 2027 : 96%, 2028 : 96% dan 2029 sebesar 97%.

Berdasarkan tabel 3.7 Total Target Renstra Tahun 2025 - 2029 sebesar 479% dengan realisasi sampai tahun 2025 sebesar 100% sehingga capaian sampai tahun 2025 sebesar 20,88 % dari target.

**Tabel 3.7**  
**Target dan Realisasi Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement (SLA) Tahun 2025 – 2029**

Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	2025			2026	2027	2028	2029	TOTAL 2025-2029			
	T	R	%	T	T	T	T	Total Target Renstra	Realisasi sd 2025	%	
3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>SK.1 Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional</b>											
1	Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai	95,00	100	105,26%	95,00	96,00	96,00	97,00	479	100	20,88%

## b) Kendala

Adanya kebijakan efisiensi anggaran mengakibatkan kegiatan sempat terhenti sementara.

### c) Rekomendasi/Tindak Lanjut

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini realisasi penyelesaian layanan tahun 2025 secara umum masih memenuhi target, namun tetap perlu dilakukan monitoring penyelesaian pekerjaan yang bisa dimonitoring melalui SIL.

Rencana perbaikan melakukan penyesuaian pelaksanaan kegiatan memonitoring proses layanan pengujian jika ada keterlambatan segera diselesaikan dan memberitahukan informasi tersebut kepada pelanggan. serta untuk mendukung kelancaran operasional layanan pengujian agar turut dilakukan upaya pemeliharaan mesin peralatan berkala, evaluasi ketersediaan stok bahan kimia dan sparepart secara berkala.

## 2) Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja SK1 Indikator 2

Nilai Net Promote Score (NPS)

### a. Capaian

Indikator Sasaran Strategis (SK1) mempunyai Indikator Kinerja 2 (dua) yaitu Nilai Net Promote Score (NPS) target dan realisasi indikator kinerja SK1 dapat dilihat seperti pada Tabel 3.8.

**Tabel 3.8**  
Target dan Realisasi Indikator Kinerja

Sasaran Strategis (SK1)	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	Nilai Net Promote Score (NPS)	50,00	72,99	145,98%

Tabel 3.8 menunjukkan bahwa Indikator Kinerja SK1 Indikator Nilai Net Promote Score (NPS) dengan Target 50 dan Realisasi 72,99 sehingga capaian tahun 2025 sebesar 145,98% dari target.

*Net Promoter Score* (NPS) adalah metode untuk mengukur loyalitas pelanggan terhadap suatu perusahaan dan seberapa besar kemungkinan mereka untuk merekomendasikan produk atau layanan

tersebut kepada orang lain. NPS diukur dengan mengajukan pertanyaan tunggal kepadapelanggan: “Seberapa besar kemungkinan Anda merekomendasikan Balai/produk/layanan kami kepada teman atau kolega?” Pelanggan diminta untuk menjawab pada skala 0 hingga 10. Kategorisasi responden terdiri dari 3 kategori yaitu:

- *Promoters* (9-10): Pelanggan yang sangat puas dan cenderung merekomendasikan perusahaan kepada orang lain.
- *Passives* (7-8): Pelanggan yang cukup puastetapi tidak cukup antusias untuk menjadi promotor.
- *Detractors* (0-6): Pelanggan yang tidak puas dan mungkin memberikan ulasan negatif atau tidak merekomendasikan perusahaan.

NPS dihitung dengan mengurangi persentase *Detractors* dari persentase *Promoters*:

$$NPS = \% Promoters - \% Detractors$$

Setelah dilakukan perhitungan NPS dari pelanggan yang menggunakan jasa layanan pengujian, kalibrasi, sertifikasi, pelatihan, inspeksi teknis, dan verifikasi TKDN pada periode hingga Desember 2025 maka nilai NPS pelanggan BBSPJIA pada tahun 2025 adalah **72,99**. Artinya pengguna jasa industri (pelanggan BBSPJIA) **sangat puas** dan **cenderung merekomendasikan** layanan BBSPJIA kepada orang lain.

Adapun sebagai perbandingan pada tahun 2025 capaian BBSPJIA dengan Satker lain dilingkungan BSKJI dengan Indikator Nilai Net Promote Score (NPS) dalam hal ini Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik (BBSPJIBBT) 313,04% dan Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) 157,50% sesuai tabel 3.9 menunjukkan bahwa capaian indikator BBSPJIBBT dan BBSPJPPI lebih tinggi serta BBSPJIBBT lebih rendah dibandingkan dengan capaian indikator BBSPJIA 145,98%.

**Tabel 3.9**  
**Perbandingan Capaian 2025**  
**Sasaran Strategis Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional**

No	Indikator	Satker	Capaian 2025
1	Nilai Net Promoter Score (NPS)	BBSPJIBBT	313,04%
		BBSPJPPI	157,50%
		BBSPJIA	145,98%

**Tabel 3.10**  
**Target dan Realisasi Nilai Net Promoter Score (NPS)**  
**Tahun 2025 – 2029**

Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	2025			2026	2027	2028	2029	
	T	R	%	T	T	T	T	
3	3	4	5	6	7	8	9	
<b>SK.1 Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional</b>								
2	Nilai <i>Net Promote Score</i> (NPS)	50,00	72,99	145,98%	55	60	65	70

T= Target, R: Realisasi

Tabel 3.10 menunjukkan indikator Nilai Net Promoter Score (NPS) pada tahun 2025 capaian sebesar 145,98% dengan target 50,00 dan realisasi sebesar 72,99 sedangkan untuk target tahun 2026 : 55, 2027 : 60, 2028 : 65 dan 2029 sebesar 70.

Berdasarkan tabel 3.11 Total Target Renstra Tahun 2025 - 2029 sebesar 300 dengan realisasi sampai dengan tahun 2025 sebesar 72,99 atau sebesar 24,33 % dari target.

**Tabel 3.11**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025-2029 dengan**  
**Target Renstra Tahun 2025-2029**

Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	2025			2026	2027	2028	2029	TOTAL 2025-2029			
	T	R	%	T	T	T	T	Total Target Renstra	Realisasi sd 2025	%	
3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>SK.1 Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional</b>											
2	Nilai <i>Net Promote Score</i> (NPS)	50,00	72,99	145,98%	55	60	65	70	300	72,99	24,33%

**a) Kendala**

1. Belum stabilnya tingkat respons responden terhadap pengisian survei
2. Bias dalam pengisian survei
3. Kurangnya pemahaman pelanggan terhadap NPS
4. Hambatan teknis dalam pengumpulan data

### b) Rekomendasi/Tindak Lanjut

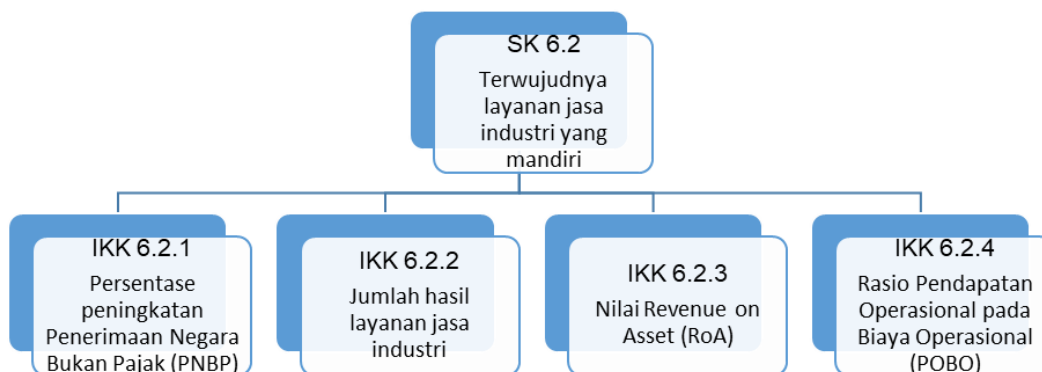
Evaluasi dari kegiatan ini adalah jumlah sampel kuesioner NPS yang diterima masih belum memenuhi/mencerminkan populasi jumlah pelanggan yang dilayani sampai dengan Desember 2025 sehingga perlu dilakukan strategi untuk menghimpun pengisian kuesioner yang umpan baliknya dapat langsung diterima atau kembali ke BBSPJIA seperti misalnya dengan menysasar pelanggan yang datang langsung ke BBSPJIA agar dapat langsung melakukan pengisian form kuesioner yang telah disampaikan petugas layanan.

Rencana Perbaikan:

1. Perlunya komunikasi yang persuasif kepada pelanggan untuk mengisi kuesioner, dan mensosialisasikan terkait penilai tersebut terhadap kredibilitas instansi.
2. Memonitor jumlah pengisian kuesioner, jika terdapat pelanggan yang belum mengisi maka petugas akan mengirimkan kuesioner ulang melalui aplikasi whatsapp atau email.

### 3. Sasaran Strategis II (SK2): Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri

Sasaran yang kedua adalah “Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri” (SK 6.2) yang pencapaiannya diukur melalui empat Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), antara lain IKK 6.2.1 Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), IKK 6.2.2 Jumlah hasil layanan jasa industri, IKK 6.2.3 Nilai Revenue on Asset (RoA) dan IKK 6.2.4 Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO) seperti dapat dilihat pada gambar 1.2 berikut :



**1) Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja SK2 Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri dengan Indikator 1 Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)**

**a. Capaian**

Indikator Sasaran Strategis (SK2) dengan Indikator Kinerja 1 (satu) yaitu Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) target dan realisasi indikator kinerja SK2 dapat dilihat seperti pada Tabel 3.12.

**Tabel 3.12**  
Target dan Realisasi Indikator Kinerja

Sasaran Strategis (SK2)	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	1	2	200%

Tabel 3.12 menunjukkan bahwa Indikator Kinerja SK1 Indikator Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan Target 1 (indeks) dan Realisasi 2 (indeks) sehingga capaian tahun 2025 sebesar 200% dari target.

Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah Salah satu tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh UPT adalah kegiatan pelayanan jasa industri yang meliputi inspeksi teknik, sertifikasi, pengujian, kalibrasi, pelatihan teknis dan layanan jasa industri lainnya. Realisasi target PNBP tersebut perlu diukur peningkatannya setiap tahun sebagai landasan kinerja UPT BSKJI. Melalui peningkatan PNBP layanan jasa industri yang diselenggarakan UPT di lingkungan BSKJI diharapkan peran BSKJI dalam mendukung penerapan kebijakan standardisasi industri dapat semakin luas dan dapat mewujudkan layanan jasa industri yang mandiri.

Pada tahun 2025 jumlah penerimaan PNBPN BBSPJIA adalah sebesar 32.650.692.572,- sedangkan target PNBPN pada tahun 2025 adalah sebesar Rp29.800.000.000,-. *Baseline* yang digunakan adalah target penerimaan di tahun 2024 yaitu sebesar Rp29.700.000.000,-. Pada bulan Desember 2025, telah dilakukan revisi indikator kinerja dimana indikator kinerja mengalami perubahan redaksional menjadi indeks peningkatan PNBPN.

Adapun cara perhitungannya adalah sebagai berikut:

- 1) Menghitung persentase peningkatan PNBPN dengan menghitung selisih jumlah PNBPN pada tahun ke-n (B) dan target PNBPN pada tahun 2024 sebagai *baseline* (A) dibagi A dikalikan 100%

$$\frac{(32.650.692.572 - 29.700.000.000)}{29.700.000.000} \times 100\% = 9,93\%$$

- 2) Indeks ditentukan berdasarkan *range* persentase peningkatan PNBPN sebagai berikut:

<i>Indeks</i>	<i>Range Peningkatan PNBPN</i>
1	$\leq 5\%$
2	$5 < x \leq 20$
3	$20 < x \leq 50$
4	$50 < x \leq 100$
5	$> 100$

Dari tabel diatas diperoleh bahwa indeks peningkatan PNBPN BBSPJIA Tahun 2025 ada di indeks 2. Realisasi ini mencapai 200% dari target yaitu indeks 1.

Adapun sebagai perbandingan pada tahun 2025 capaian BBSPJIA dengan Satker lain dilingkungan BSKJI Indikator Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN) dalam hal ini dengan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik (BBSPJIBBT) 100% dan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) 100% sesuai tabel 3.13 menunjukkan bahwa capaian indikator BBSPJIBBT dan BBSPJPPI sama dengan capaian indikator BBSPJIA 100%.

**Tabel 3.13**  
Perbandingan Capaian 2025  
Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri

No	Indikator	Satker	Capaian 2025
1	Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	BBSPJIA	100 %
		BBSPJIBBT	100 %
		BBSPJPPI	100 %

**Tabel 3.14**  
Target dan Realisasi Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)  
Tahun 2025 – 2029

Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	2025			2026	2027	2028	2029	
	T	R	%	T	T	T	T	
3	3	4	5	6	7	8	9	
<b>SK.2 Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri</b>								
1	Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	1	2	200,00%	1	2	2	2

T= Target, R: Realisasi

Tabel 3.14 menunjukkan indikator Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tahun 2025 capaian sebesar 200% dengan target 1 dan realisasi sebesar 2 sedangkan untuk target tahun 2026 : 1, 2027 : 2, 2028 : 2 dan 2029 sebesar 2.

Berdasarkan tabel 3.15 Total Target Renstra Tahun 2025 - 2029 sebesar 8 dengan realisasi sampai dengan tahun 2025 sebesar 2 atau sebesar 25 % dari target.

**Tabel 3.15**  
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025-2029 dengan  
Target Renstra Tahun 2025-2029

Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	2025			2026	2027	2028	2029	TOTAL 2025-2029			
	T	R	%	T	T	T	T	Total Target Renstra	Realisasi sd 2025	%	
3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>SK.2 Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri</b>											
1	Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	1	2	200,00%	1	2	2	2	8	2	25,00%

#### b. Kendala

- Beberapa peralatan laboratorium mengalami kerusakan seperti TOC meter, Karl fischer (sehingga harus sub kontrak pengujian ke lab lain) AAS GTA, ruang asam beengaruh terhadap kapasitas laboratorium.
- Keterbatasan peralatan pendukung mikrobiologi seperti : membran filtrasi, dan tabung uji.

### c. Rekomendasi/Tindak Lanjut

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah diperlukan peningkatan penerimaan PNBPN dari seluruh layanan jasa BBSPJIA (tidak hanya teaku penerimaan dari layanan utama), perlunya monitoring setiap bulan pihak manajemen terkait kendala ataupun realisasi inovasi baik dari segi layanan, proses maupun penyelesaian keuangan terkait progres penagihan.

Rencana Perbaikan, antara lain Pengadaan dan perbaikan infrastruktur standardisasi serta BBPSJIA perlu mengembangkan layanan lain untuk mencapai target penerimaan PNBPN BLU yang telah ditetapkan.

## 2) Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja SK2 Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri dengan Indikator 2 Jumlah hasil layanan jasa industri

### a. Capaian

Indikator Sasaran Strategis (SK2) dengan Indikator Kinerja 2 (dua) yaitu Jumlah hasil layanan jasa industri target dan realisasi indikator kinerja SK2 dapat dilihat seperti pada Tabel 3.16.

**Tabel 3.16**  
Target dan Realisasi Indikator Kinerja

Sasaran Strategis (SK2)	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	Jumlah hasil layanan jasa industri	20.600	23.090	112.09%

Tabel 3.16 menunjukkan bahwa Indikator Kinerja SK2 Indikator Jumlah hasil layanan jasa industri dengan Target 20.600 (hasil layanan) dan Realisasi 23.090 (hasil layanan) sehingga capaian tahun 2025 sebesar 112,09 % dari target.

Jumlah hasil layanan jasa industri adalah salah satu tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh UPT adalah kegiatan pelayanan jasa

industri yang meliputi inspeksi teknik, sertifikasi, pengujian, kalibrasi, pelatihan teknis dan layanan jasa industri lainnya.

Pada tahun 2025, realisasi jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan BBPSJIA mencapai 23.090 layanan jasa atau 112,09% dari target 20.600 layanan jasa. Rincian realisasi volume per jasa layanan pada Tabel 3.17, sebagai berikut:

**Tabel 3.17 Realisasi Volume Layanan BBPSJIA TA. 2025**

No.	Jenis Layanan	Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Persentase
1	Pengujian	10.341	11.501	111.22%
2	Kalibrasi	7.519	7.959	105.85%
3	Sertifikasi	721	767	106.38%
4	Sampling	299	267	89.30%
5	Uji Profisiensi	731	803	109.85%
6	Bimbingan dan pendampingan teknis industri	848	1539	181.49%
7	Konsultasi	10	12	120.00%
8	Optimalisasi pemanfaatan teknologi industri	6	4	66.67%
9	Inspeksi Teknis	125	238	190.40%
	<b>Total</b>	<b>20,600</b>	<b>23.745</b>	<b>112.09%</b>

Adapun sebagai perbandingan pada tahun 2025 capaian BBSPJIA dengan Satker lain dilingkungan BSKJI Indikator Jumlah hasil layanan jasa industri dalam hal ini dengan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik (BBSPJIBBT) 103,88% dan Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) 114,32%% sesuai tabel 3.18 menunjukkan bahwa capaian indikator BBSPJPPI sedikit lebih tinggi dengan capaian indikator BBSPJIA 112,09% dan capaian BBSPJIBBT lebih rendah dibandingkan BBSPJIA sesuai dengan tabel 3.19.

**Tabel 3.18**  
Perbandingan Capaian 2025  
Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri

No	Indikator	Satker	Capaian 2025
1	Jumlah hasil layanan jasa industri dalam	BBSPJPPI	114,32%
		BBSPJIA	112,09%
		BBSPJIBBT	103,88%

**Tabel 3.19**  
Target dan Realisasi Jumlah hasil layanan jasa industri dalam  
Tahun 2025 – 2029

Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	2025			2026	2027	2028	2029	
	T	R	%	T	T	T	T	
3	3	4	5	6	7	8	9	
<b>SK.2 Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri</b>								
2	Jumlah hasil layanan jasa industri	20.600	23.090	112,09%	21.218	21.960	22.729	23.836

T= Target, R: Realisasi

Tabel 3.19 menunjukkan indikator Jumlah hasil layanan jasa industri dalam pada tahun 2025 capaian sebesar 112,09% dengan target 20.600 dan realisasi sebesar 23.090 sedangkan untuk target tahun 2026 : 21.218, 2027 : 21.960, 2028 : 22.729 dan 2029 sebesar 23.836 dengan satuan Hasil Layanan.

Berdasarkan tabel 3.20 Total Target Renstra Tahun 2025 - 2029 sebesar 110.343 (hasil layanan) dengan realisasi sampai dengan tahun 2025 sebesar 23.090 (hasil layanan) atau sebesar 20,93% dari target.

**Tabel 3.20**  
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025-2029 dengan  
Target Renstra Tahun 2025-2029

Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	2025			2026	2027	2028	2029	TOTAL 2025-2029			
	T	R	%	T	T	T	T	Total Target Renstra	Realisasi sd 2025	%	
3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>SK.2 Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri</b>											
2	Jumlah hasil layanan jasa industri	20.600	23.090	112,09%	21.218	21.960	22.729	23.836	110.343	23.090	20,93%

#### b. Kendala

Kendala yang dihadapi antara lain persaingan dengan lembaga sejenis terutama dengan Laboratorium/Perusahaan swasta semakin ketat.

### c. Rekomendasi/Tindak Lanjut

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini diperlukan pendekatan kembali kepada pelanggan yang beralih dari BBSPJIA dengan tetap mendorong upaya peningkatan kapasitas layanan dan kualitas layanan.

Rencana Perbaikan: Meningkatkan kualitas dan waktu layanan (delivery time) agar dapat bersaing dengan kompetitor.

### 3) Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja SK2 Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri dengan Indikator 3 Nilai Revenue on Asset (RoA)

#### a. Capaian

Indikator Sasaran Strategis (SK2) dengan Indikator Kinerja 3 (tiga) yaitu Nilai Revenue on Asset (RoA) target dan realisasi indikator kinerja SK2 dapat dilihat seperti pada Tabel 3.21.

**Tabel 3.21**  
Target dan Realisasi Indikator Kinerja

Sasaran Strategis (SK2)	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)	8,40	9,27	110,36

Tabel 3.21 menunjukkan bahwa Indikator Kinerja SK2 Indikator Nilai *Revenue on Asset* (RoA) dengan Target 8,40 (persen) dan Realisasi 9,27% (hasil layanan) sehingga capaian tahun 2025 sebesar 110,36% dari target.

*Revenue on Asset* (RoA) adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur seberapa efisien sebuah perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari aset yang dimilikinya. Rasio ini menunjukkan seberapa banyak pendapatan yang dihasilkan perusahaan untuk setiap unit aset yang dimiliki.

Pada tahun 2025, nilai *Revenue on Asset* (RoA) BBSPJIA dapat dilihat sebagai berikut:

**Penerimaan PNPB (per tanggal 31 Desember) = Rp. 32.650.692.572,-**

**Nilai asset BBSPJIA (Tahun 2024) = Rp. 352.152.176.797,-**

$$\text{Nilai RoA} = \frac{\text{Penerimaan PNPB}}{\text{Nilai Asset}} \times 100\%$$

Nilai RoA =	$\frac{32.650.692.572}{352.152.176.797}$	x 100%
-------------	--	--------

Nilai RoA =	9,27%
-------------	-------

Adapun sebagai perbandingan pada tahun 2025 capaian BBSPJIA dengan Satker lain dilingkungan BSKJI Indikator Jumlah hasil layanan jasa industri dalam hal ini dengan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik (BBSPJIBBT) 100,83% dan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) 109,66%% sesuai tabel 3.22 menunjukkan bahwa capaian indikator BBSPJIA 110,36% lebih tinggi dibandingkan capaian BBSPJIBBT dan BBSPJPPI

**Tabel 3.22**  
**Perbandingan Capaian 2025**  
**Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri**

No	Indikator	Satker	Target	Realisasi	Capaian 2025
1	Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)	BBSPJIA	8,40	9,27	110,36%
		BBSPJPPI	14,5	15,9	109,66%
		BBSPJIBBT	23,00	23,19	100,38%

**Tabel 3.23**  
**Target dan Realisasi Jumlah hasil layanan jasa industri dalam**  
**Tahun 2025 – 2029**

Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	2025			2026	2027	2028	2029	
	T	R	%	T	T	T	T	
3	3	4	5	6	7	8	9	
<b>SK.2 Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri</b>								
3	Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)	8,40	9,27	110,36%	8,50	8,50	8,75	9,00

T= Target, R: Realisasi

Tabel 3.23 menunjukkan indikator Nilai Revenue on Asset (RoA) pada tahun 2025 capaian sebesar 110,36% dengan target 8,40 dan realisasi sebesar 9,27 sedangkan untuk target tahun 2026 : 8,50, 2027 : 8,50, 2028 : 8,75 dan 2029 sebesar 9,00 dengan satuan persen.

Berdasarkan tabel 3.24 Total Target Renstra Tahun 2025 - 2029 sebesar 43,15 (persen) dengan realisasi sampai dengan tahun 2025 sebesar 9,27 (persen) atau sebesar 21,48% dari target.

**Tabel 3.24**  
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025-2029 dengan Target Renstra Tahun 2025-2029

Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	2025			2026	2027	2028	2029	TOTAL 2025-2029			
	T	R	%	T	T	T	T	Total Target Renstra	Realisasi sd 2025	%	
3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>SK.2 Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri</b>											
3	Nilai Revenue on Asset (RoA)	8,40	9,27	110,36%	8,50	8,50	8,75	9,00	43,15	9,27	21,48%

#### b. Kendala

Tidak ada kendala yang berarti

#### c. Rekomendasi/Tindak Lanjut

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah belum seluruh aset tetap yang dimiliki khususnya aset bangunan dan mesin peralatan dioptimalkan untuk mendorong peningkatan penerimaan.

Rencana perbaikan yaitu dengan melakukan monitoring penerimaan dan pemutakhiran nilai buku aset satuan kerja dilaksanakan sesuai prosedur dan tepat.

#### 4) Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja SK2 Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri dengan Indikator 4 Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)

##### a. Capaian

Indikator Sasaran Strategis (SK2) dengan Indikator Kinerja 4 (empat) yaitu Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO) target dan realisasi indikator kinerja SK2 dapat dilihat seperti pada Tabel 3.25.

**Tabel 3.25**  
Target dan Realisasi Indikator Kinerja

Sasaran Strategis (SK2)	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)	75,00	97,48	129,97

Tabel 3.25 menunjukkan bahwa Indikator Kinerja SK2 Indikator Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO) dengan Target 75,00 (persen) dan Realisasi 97,48 (persen) sehingga capaian tahun 2025 sebesar 129,97% dari target.

Rasio Pendapatan Operasional terhadap Beban Operasional (POBO) adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur seberapa baik suatu UPT dalam menghasilkan pendapatan dari aktivitas operasionalnya dibandingkan dengan biaya atau beban yang harus dikeluarkan untuk menjalankan operasionalnya. Rasio ini menunjukkan efisiensi operasional perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari aktivitas intinya

Rasio POBO digunakan dalam mengukur kemandirian UPT atas operasional layanannya dari beban operasional yang telah dikeluarkan untuk layanan publik, sering disebut juga sebagai rasio kemandirian UPT. Pada Tahun 2025, nilai POBO BBSPJIA dapat diuraikan sebagai berikut :

**Penerimaan PNBPN (per tanggal 30 Desember) =  
Rp. 37.625.730.339,-**  
**Biaya operasional selama Januari – Desember =  
Rp. 38.599.691.615**

$$\text{Rasio POBO} = \frac{\text{Penerimaan PNBPN}}{\text{Biaya operasional}} \times 100\%$$

POBO =	$\frac{37.625.730.339}{38.599.691.615}$	x100%
--------	---	-------

POBO =	97,48%
--------	--------

Adapun sebagai perbandingan pada tahun 2025 capaian BBSPJIA dengan Satker lain dilingkungan BSKJI Indikator Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO) dalam hal ini dengan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik (BBSPJIBBT) 105,61% dan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) 104,17% sesuai tabel 3.26 menunjukkan bahwa capaian indikator BBSPJIA 129,97% lebih tinggi dibandingkan capaian BBSPJIBBT dan BBSPJPPI.

**Tabel 3.26**  
**Perbandingan Capaian 2025**  
**Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri**

No	Indikator	Satker	Target	Realisasi	Capaian 2025
1	Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)	BBSPJIA	75,00	97,48	129,97%
		BBSPJIBBT	127,00	134,12	105,61%
		BBSPJPPI	59	61,46	104,17%

**Tabel 3.27**  
**Target dan Realisasi Jumlah hasil layanan jasa industri dalam**  
**Tahun 2025 – 2029**

Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	2025			2026	2027	2028	2029	
	T	R	%	T	T	T	T	
3	3	4	5	6	7	8	9	
<b>SK.2 Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri</b>								
4	Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)	75,00	97,48	129,97%	76,00	78,00	80,00	82,00

T= Target, R: Realisasi

Tabel 3.27 menunjukkan indikator Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO) pada tahun 2025 capaian sebesar 129,97% dengan target 75,00 % dan realisasi sebesar 97,48% sedangkan untuk target tahun 2026 : 76,00, 2027 : 78,00, 2028 : 80,00 dan 2029 sebesar 82,00 dengan satuan persen.

Berdasarkan tabel 3.28 Total Target Renstra Tahun 2025 - 2029 sebesar 391 (persen) dengan realisasi sampai dengan tahun 2025 sebesar 97,48 (persen) atau sebesar 24,93% dari target.

**Tabel 3.28**  
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025-2029 dengan  
Target Renstra Tahun 2025-2029

Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	2025			2026	2027	2028	2029	TOTAL 2025-2029			
	T	R	%	T	T	T	T	Total Target Renstra	Realisasi sd 2025	%	
3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>SK.2 Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri</b>											
4	Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)	75,00	97,48	129,97%	76,00	78,00	80,00	82,00	391	97,48	24,93%

**b. Kendala**

Tidak ada kendala yang berarti

**c. Rekomendasi/Tindak Lanjut**

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah memonitoring capaian nilai Pendapatan Diterima di Muka (PDDM) setiap bulan. Rencana perbaikan adalah segera menyelesaikan pekerjaan yang menjadi PDDM.

**4. Sasaran Strategis III (SK3): Terwujudnya SDM yang profesional dengan Indikator Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)**

Sasaran yang ketiga BBSPJIA Adalah “Terwujudnya SDM yang profesional” (SK 6.3) yang pencapaiannya diukur melalui 1(satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Indikator Indeks Profesionalitas ASN (IPASN) sesuai gambar 3.3. Guna mewujudkan SDM yang professional, BBSPJIA telah menyusun berbagai program pelatihan teknis maupun non teknis kepada para pegawai. Pelatihan tersebut dilakukan dengan mengirimkan pegawai untuk mengikuti pelatihan diberbagai lembaga pelatihan dan juga bisa dilakukan melalui pelaksanaan Inhouse Training.



### 1) Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja indikator Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)

Pada tahun 2025, hasil perhitungan rata-rata indeks profesionalitas ASN BBSPJIA mencapai nilai 78,03. Hasil ini bersumber dari rekapitulasi nilai IPASN yang ada pada website intranew Kementerian Perindustrian. Realisasi ini mencapai 95,98 % dari target.

**Tabel 3.29**

Target dan Realisasi Indikator Kinerja SK3.1

Indikator Kinerja SK 3.1.	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	81,30	78,03	95,98

Tabel 3.29 menunjukkan bahwa realisasi indikator kinerja SK3.1 Indeks Profesionalitas ASN (IPASN) sebesar 95,98 % dari target.

Berdasarkan data diatas, membandingkan realisasi dan target pada tahun 2025, maka Sasaran Strategis (SK3) Indikator Indeks Profesionalitas ASN (IPASN) **Belum Berhasil** mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun sebagai perbandingan pada tahun 2025 capaian BBSPJIA dengan Satker lain dilingkungan BSKJI Indikator Indeks Profesionalitas ASN (IPASN) dalam hal ini dengan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik (BBSPJIBBT) 103,64% dan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) 102,62% sesuai tabel 3.30 menunjukkan bahwa capaian indikator

BBSPJIA 96,31% lebih rendah dibandingkan capaian BBSPJIBBT dan BBSPJPPI.

**Tabel 3.30**  
Perbandingan Capaian 2025  
Terwujudnya SDM yang profesional

No	Indikator	Satker	Target	Realisasi	Capaian 2025
1	Terwujudnya SDM yang profesional	BBSPJIBBT	81,30	84,26	103,64%
		BBSPJPPI	81,3	83,43	102,62%
		BBSPJIA	81,30	78,03	95,98%

**Tabel 3.31**  
Perbandingan Target dan Realisasi Terwujudnya SDM yang profesional  
Tahun 2025 – 2029

Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	2025			2026	2027	2028	2029	
	T	R	%	T	T	T	T	
<b>SK.3 Terwujudnya SDM yang profesional</b>								
1	Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	81,30	78,03	95,98%	81,40	83,50	84,00	84,50

T= Target R=Realisasi

Tabel 3.31 menunjukkan indikator Indeks Profesionalitas ASN (IPASN) pada tahun 2025 capaian sebesar 95,98% dengan target 81,30 (indeks) dan realisasi sebesar 78,03 (indeks) sedangkan untuk target tahun 2026 : 81,40, 2027 : 83,50, 2028 : 84,00 dan 2029 sebesar 84,50 dengan satuan indeks.

Berdasarkan tabel 3.32 Total Target Renstra Tahun 2025 - 2029 sebesar 441,7 (indeks) dengan realisasi sampai dengan tahun 2025 sebesar 78,03 (indeks) atau sebesar 18,82% dari target.

**Tabel 3.32**  
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025-2029 dengan  
Target Renstra Tahun 2025-2029

Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	2025			2026	2027	2028	2029	TOTAL 2025-2029			
	T	R	%	T	T	T	T	Total Target Renstra	Realisasi sd 2025	%	
<b>SK.3 Terwujudnya SDM yang profesional</b>											
1	Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	81,30	78,03	95,98%	81,40	83,50	84,00	84,50	414,7	78,03	18,82%

T= Target R=Realisasi

#### a. Kendala

Tidak ada kendala yang berarti

#### b. Rekomendasi/Tindak Lanjut

Evaluasi dari pelaksanaan ini adalah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelatihan dengan rencana pelatihan 2026 dan

juga evaluasi nilai indeks profesionalitas ASN setiap periodik sehingga di akhir tahun dapat mencapai target yang ditetapkan.

Rencana perbaikan adalah :

1. Mengoptimalkan inhouse training dan pelatihan daring untuk pelatihan teknis/ Workshop/ Bimtek/ Sosialisasi.
2. Mengevaluasi capaian peningkatan kompetensi pegawai yang telah diklat.
3. Melakukan simulasi progress perhitungan IPASN yang telah dicapai.

#### **5. Sasaran Strategis 4 (SK4): Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik**

Sasaran keempat (SK 6.4) BBSPJIA adalah “Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik“, selaras dengan Sasaran Program 7 BSKJI yaitu Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi, dan pelayanan publik. Sasaran kegiatan ini memiliki tiga Indikator Kinerja Kegiatan 1. Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI, 2. Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan 3. Indeks Pelayanan Publik (IPP). Integrasi data dalam layanan jasa industri sangat penting karena memungkinkan aliran informasi yang lebih lancar, koordinasi yang lebih baik, serta pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Oleh karena itu, BSKJI menyiapkan sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem pada UPT dimana sistem ini dapat memberikan data terbaru terkait layanan yang diberikan oleh UPT di lingkungan BSKJI.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Perindustrian yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan Layanan kepada pengguna yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian. Upaya untuk menerapkan Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yaitu memastikan tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE terselenggara dengan baik.

Upaya untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik dengan memastikan kualitas layanan yang diberikan sesuai dengan harapan publik/masyarakat.

BBSPJIA melakukan survei kepuasan masyarakat (SKM) secara rutin sesuai Permen PANRB Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik dan Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023.

Sasaran kelima (SK 6.5) BBSPJIA adalah seperti dapat dilihat pada gambar 1.4 berikut :



**1) Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja SK4 Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik dengan Indikator 1 Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI**

**a. Capaian**

Indikator Sasaran Strategis (SK4) dengan Indikator Kinerja 1 (satu) yaitu Indeks Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI target dan realisasi indikator kinerja SK2 dapat dilihat seperti pada Tabel 3.33.

**Tabel 3.33**  
Target dan Realisasi Indikator Kinerja

Sasaran Strategis (SK4)	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	20	20	100%

Tabel 3.33 menunjukkan bahwa Indikator Kinerja SK4 Indikator Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI dengan Target 20 (persen) dan Realisasi 20 (persen) sehingga capaian tahun 2025 sebesar 100% dari target.

Integrasi data dalam layanan jasa industri sangat penting karena memungkinkan aliran informasi yang lebih lancar, koordinasi yang lebih baik, serta pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Dalam dunia industri yang semakin kompleks dan terhubung secara digital, integrasi data menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan inovasi

Adapun sebagai perbandingan pada tahun 2025 capaian BBSPJIA dengan Satker lain dilingkungan BSKJI Indikator Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam hal ini dengan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik (BBSPJIBBT) 200% dan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) 100% sesuai tabel 3.34 menunjukkan bahwa capaian indikator BBSPJIBBT lebih tinggi dari capaian BBSPJIA serta BBSPJPPI sama dengan capaian indikator BBSPJIA 100%.

**Tabel 3.34**  
**Perbandingan Capaian 2025**  
**Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan public**

No	Indikator	Satker	Capaian 2025
1	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	BBSPJIBBT	200 %
		BBSPJIA	100 %
		BBSPJPPI	100 %

**Tabel 3.35**  
Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI  
Tahun 2025 – 2029

Sasaran Kegiatan (output)/Indikator		2025			2026	2027	2028	2029
		T	R	%	T	T	T	T
3		3	4	5	6	7	8	9
<b>SK.4 Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik</b>								
1	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	20,00	20,00	100,00%	40,00	60,00	80,00	100,00

T= Target, R: Realisasi

Tabel 3.35 menunjukkan indikator Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI pada tahun 2025 capaian sebesar 100% dengan target 20 dan realisasi sebesar 20 sedangkan untuk target tahun 2026 : 40, 2027 : 60, 2028 : 80 dan 2029 sebesar 100 dengan satuan persen.

Berdasarkan tabel 3.36 Total Target Renstra Tahun 2025 - 2029 sebesar 300% dengan realisasi sampai dengan tahun 2025 sebesar 20% atau sebesar 6,67 % dari target.

**Tabel 3.36**  
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025-2029 dengan Target Renstra Tahun 2025-2029

Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	2025			2026	2027	2028	2029	TOTAL 2025-2029			
	T	R	%	T	T	T	T	Total Target Renstra	Realisasi sd 2025	%	
3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>SK.4 Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik</b>											
1	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	20,00	20,00	100,00%	40,00	60,00	80,00	100,00	300	20	6,67%

**b. Kendala**

Tidak ada

**c. Rekomendasi/Tindak Lanjut**

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah koordinasi intensif dengan BSKJI terkait respon sistem SIPPT.

Rencana perbaikan di triwulan selanjutnya adalah Melakukan konsultasi dengan admin SIPPT BSKJI melalui forum grup integrasi data BSJKI agar dapat memberikan solusi untuk pengiriman data yang tertunda atau tidak dapat di terima pada sisi server SIPPT.

**2) Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja SK4 Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik dengan Indikator 2 Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**

**a. Capaian**

Indikator Sasaran Strategis (SK4) dengan Indikator Kinerja 2 (dua) yaitu Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik (SPBE), Capaian indikator kinerja SK4 dapat dilihat seperti pada Tabel 3.37.

**Tabel 3.37**  
Target dan Realisasi Indikator Kinerja

Sasaran Strategis (SK4)	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik	Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	77,00	78,30	101,69%

Tabel 3.37 menunjukkan bahwa Indikator Kinerja SK4 Indikator Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Target 77,00 (persen) dan Realisasi 78,30 (persen) sehingga capaian tahun 2025 sebesar 101,69 % dari target.

Sehubungan dengan diterapkannya Keputusan Menteri Perindustrian No. 2343 Tahun 2024 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Perindustrian, maka roadmap yang telah ditetapkan harus segera ditindaklanjuti.

Pada tanggal 2 Januari 2026, Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Perindustrian telah mengirimkan Nota Dinas Nomor 2/SJ-IND.7/TIK/I/2026 tentang Hasil Akhir Penilaian Perkin SPBE Tahun 2025, dimana penilaian Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk satuan kerja BBSPJIA memperoleh nilai 78,30. Realisasi ini mencapai 101,69% dari nilai SPBE yang ditargetkan sebesar nilai 77.

Adapun sebagai perbandingan pada tahun 2025 capaian BBSPJIA dengan Satker lain dilingkungan BSKJI Indikator Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam hal ini dengan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik (BBSPJIBBT) 87,23% dan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) 115,34% sesuai tabel 3.38 menunjukkan bahwa capaian indikator BBSPJPPI sedikit lebih tinggi dengan capaian indikator

BBSPJIA 101,69% dan capaian BBSPJIBBT lebih rendah dibandingkan BBSPJIA.

**Tabel 3.38**  
Perbandingan Capaian 2025  
Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan public

No	Indikator	Satker	Capaian 2025
1	Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	BBSPJPPI	115,34%
		BBSPJIA	101,69%
		BBSPJIBBT	87,23%

**Tabel 3.39**  
Target dan Realisasi  
Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)  
Tahun 2025 – 2029

Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	2025			2026	2027	2028	2029	
	T	R	%	T	T	T	T	
3	3	4	5	6	7	8	9	
<b>SK.4 Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik</b>								
2	Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	77,00	78,3	101,69%	78,00	82,00	83,00	85,00

T= Target, R: Realisasi

Tabel 3.39 menunjukkan indikator Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada tahun 2025 capaian sebesar 101,69% dengan target 77,00 dan realisasi sebesar 78,3% sedangkan untuk target tahun 2026 : 78, 2027 : 82, 2028 : 83 dan 2029 sebesar 85 dengan satuan Persen.

Berdasarkan tabel 3.40 Total Target Renstra Tahun 2025 - 2029 sebesar 405 (persen) dengan realisasi sampai dengan tahun 2025 sebesar 78,3 (persen) atau sebesar 19,33% dari target.

**Tabel 3.40**  
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025-2029 dengan  
Target Renstra Tahun 2025-2029

Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	2025			2026	2027	2028	2029	TOTAL 2025-2029			
	T	R	%	T	T	T	T	Total Target Renstra	Realisasi sd 2025	%	
3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>SK.4 Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik</b>											
2	Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	77,00	78,3	101,69%	78,00	82,00	83,00	85,00	405	78,3	19,33%

**b. Kendala**

Pemenuhan bukti dukung dalam pengisian LKE SPBE belum ada panduan baku berupa juknis yang memudahkan dalam penyusunan bukti dukung implementasi SPBE

**c. Rekomendasi/Tindak Lanjut**

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah berkoordinasi baik secara internal maupun eksternal terkait pemenuhan bukti dukung SPBE.

Rencana perbaikan selanjutnya adalah melakukan diskusi, bimbingan serta mengikuti kegiatan yang terkait SPBE dengan Pusdatin dalam rangka memahami pemenuhan bukti dukung pada pengisian LKE.

### 3) Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja SK4 Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik dengan Indikator 3 Indeks Pelayanan Publik (IPP)

**a. Capaian**

Indikator Sasaran Strategis (SK4) dengan Indikator Kinerja 3 (tiga) yaitu Indeks Pelayanan Publik (IPP) target dan realisasi indikator kinerja SK4 dapat dilihat seperti pada Tabel 3.41.

**Tabel 3.41**  
Target dan Realisasi Indikator Kinerja

Sasaran Strategis (SK4)	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,20	4,35	103,57

Tabel 3.41 menunjukkan bahwa Indikator Kinerja SK2 Indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP) dengan Target 4,20 (indeks) dan Realisasi 4,35 (indeks) sehingga capaian tahun 2025 sebesar 103,57% dari target.

Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Pada tanggal 18 Desember 2025, Sekretariat BSKJI telah mengirimkan Nota Dinas nomor 5685/BSKJI.1/LP/XII/2025 tentang penyampaian nilai akhir pelaksanaan PEKPPP Mandiri di lingkungan BSKJI, dimana indeks pelayanan publik BBSPJIA memperoleh hasil PEKPPP sebesar 4,35, Nilai A- dan kategori Sangat Baik.

Realisasi Nilai Indeks Pelayanan Publik 4,35 ini, melebihi dari yang ditargetkan sebesar 4,20 dengan capaian sebesar 103,57%.

Adapun sebagai perbandingan pada tahun 2025 capaian BBSPJIA dengan Satker lain di lingkungan BSKJI Indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP) dalam hal ini dengan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik (BBSPJIBBT) 105,64% dan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) 107,14% sesuai tabel 3.42 menunjukkan bahwa capaian indikator BBSPJIA 103,57% lebih rendah dibandingkan capaian BBSPJIBBT dan BBSPJPPI

**Tabel 3.42**  
**Perbandingan Capaian 2025**  
**Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan public**

No	Indikator	Satker	Capaian 2025
1	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	BBSPJPPI	107,14%
		BBSPJIBBT	105,64%
		BBSPJIA	103,57%

**Tabel 3.43**  
**Target dan Realisasi Jumlah hasil layanan jasa industri dalam**  
**Tahun 2025 – 2029**

Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	2025			2026	2027	2028	2029	
	T	R	%	T	T	T	T	
3	3	4	5	6	7	8	9	
<b>SK.4 Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik</b>								
3	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,20	4,35	103,57%	4,51	4,52	4,53	4,54

T= Target, R: Realisasi

Tabel 3.43 menunjukkan indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP) pada tahun 2025 capaian sebesar 103,57% dengan target 4,20 dan realisasi sebesar 4,35 sedangkan untuk target tahun 2026 : 4,51, 2027 : 4,52, 2028 : 4,53 dan 2029 sebesar 4,54 dengan satuan indeks.

Berdasarkan tabel 3.44 Total Target Renstra Tahun 2025 - 2029 sebesar 22,3 (indeks) dengan realisasi sampai dengan tahun 2025 sebesar 4,35 (indeks) atau sebesar 19,51% dari target.

**Tabel 3.44**  
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025-2029 dengan Target Renstra Tahun 2025-2029

Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	2025			2026	2027	2028	2029	TOTAL 2025-2029			
	T	R	%	T	T	T	T	Total Target Renstra	Realisasi sd 2025	%	
3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>SK.4 Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik</b>											
3	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,20	4,35	103,57%	4,51	4,52	4,53	4,54	22,3	4,35	19,51%

#### b. Kendala

Tim penilai PEKPPP mandiri dari Sekretariat BSKJI kurang komunikatif dan berkoordinasi pada saat penilaian sehingga menyulitkan tim BBSPJIA dalam memenuhi data dukung yang diperlukan.

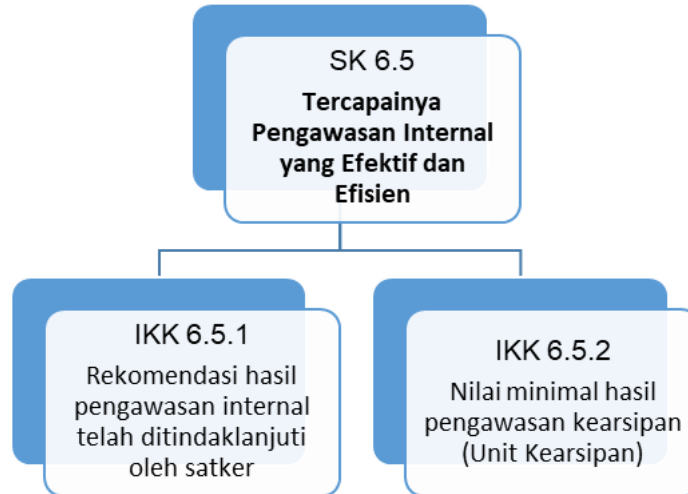
#### c. Rekomendasi/Tindak Lanjut

Evaluasi dari kegiatan ini adalah meningkatkan koordinasi dengan Sekretariat BSKJI dalam proses penilaian indeks pelayanan publik berikutnya. Rencana tindak lanjut:

- Memelihara penyampaian informasi dan pelayanan kehumasan kepada pelanggan tersampaikan dengan baik dan benar.
- Penyampaian informasi dan pelayanan kehumasan melalui semua media di BBSPJIA (elektronik dan non elektronik).
- Menindaklanjuti keluhan pelanggan/ pengaduan/ saran dan masukan yang muncul dari pelayanan.

## 6. Sasaran Strategis 5 (SK5): Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien

Sasaran kelima (SK 6.5) BBSPJIA adalah “Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien “. Sasaran kegiatan ini memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan, SK.5.1 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal telah ditindaklanjuti oleh Satker dan SK.5.2 Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan), seperti dapat dilihat pada gambar 1.5 berikut :



### 1) Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja SK5 Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien dengan Indikator 1 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal telah ditindaklanjuti oleh Satker

#### a. Capaian

Indikator Sasaran Strategis (SK5) dengan Indikator Kinerja 1 (satu) yaitu Indeks Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal telah ditindaklanjuti oleh Satker target dan realisasi indikator kinerja SK5 dapat dilihat seperti pada Tabel 3.45.

**Tabel 3.45**  
Target dan Realisasi Indikator Kinerja

Sasaran Strategis (SK5)	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal telah ditindaklanjuti oleh Satker	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal telah ditindaklanjuti oleh Satker	60	100	166,67%

Tabel 3.45 menunjukkan bahwa Indikator Kinerja SK5 Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal telah ditindaklanjuti oleh Satker dengan Target 60 (persen) dan Realisasi 100 (persen) sehingga capaian tahun 2025 sebesar 166,67% dari target.

Pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dilakukan setiap tahun sebagai kontrol atas pelaksanaan kegiatan maupun anggaran agar tetap berada dalam koridor aturan maupun kinerja yang telah ditetapkan. Setiap tahun hasil pengawasan ini dituangkan dalam laporan hasil pengawasan internal dimana terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, dan Satker diharapkan dapat responsif melakukan tindak lanjut atas rekomendasi dimaksud.

Pada tanggal 3-7 Maret 2025. Tim APIP dari Inspektorat III telah melaksanakan audit kinerja di BBSPJIA.

BBSPJIA telah menyampaikan rencana aksi tindak lanjut hasil pengawasan kepada Inspektorat Jenderal pada tanggal 17 Maret 2025.

Pada tanggal 30 September 2025, pihak Inspektorat Jenderal telah mengirimkan surat tentang Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal pada BBSPJIA TA 2024 dimana pihak Inspektorat Jenderal menyampaikan bahwa dari hasil temuan hasil pemeriksaan sebanyak 4 (empat) temuan dan 6 (enam) saran, BBSPJIA telah menindak lanjuti seluruh hasil pemeriksaan dan dinyatakan selesai realisasi 100%, sesuai dengan program dan keuangan yang telah diaudit.

Dari yang ditargetkan sebesar 60 persen maka realisasi ini mencapai 166,67 persen.

Adapun sebagai perbandingan pada tahun 2025 capaian BBSPJIA dengan Satker lain dilingkungan BSKJI dalam hal ini dengan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik (BBSPJIBBT) 100% dan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) 166,67% sesuai tabel 3.46 menunjukkan bahwa capaian indikator

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal telah ditindaklanjuti oleh Satker BBSPJIA 166,67% sama dengan capaian BBSPJPPI dan BBSPJIBBT lebih rendah dari capaian BBSPJIA.

**Tabel 3.46**  
**Perbandingan Capaian 2025**  
**Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien**

No	Indikator	Satker	Capaian 2025
1	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	BBSPJIA	166,67 %
		BBSPJPPI	166,67 %
		BBSPJIBBT	100 %

**Tabel 3.47**  
 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal telah ditindaklanjuti oleh Satker Tahun 2025 – 2029

Sasaran Kegiatan (output)/Indikator		2025			2026	2027	2028	2029
		T	R	%	T	T	T	T
3		3	4	5	6	7	8	9
<b>SK.5 Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien</b>								
1	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal telah ditindaklanjuti oleh Satker	60	100	166,67%	62,00	65,00	67,00	70,00

T= Target, R: Realisasi

Tabel 3.47 menunjukkan indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal telah ditindaklanjuti oleh Satker pada tahun 2025 capaian sebesar 166,67% dengan target 60% dan realisasi sebesar 100% sedangkan untuk target tahun 2026 : 62, 2027 : 65, 2028 : 67 dan 2029 sebesar 70 dengan satuan persen.

Berdasarkan tabel 3.48 Total Target Renstra Tahun 2025 - 2029 sebesar 324% dengan realisasi sampai dengan tahun 2025 sebesar 100% atau sebesar 30,86% dari target.

**Tabel 3.48**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025-2029 dengan Target Renstra Tahun 2025-2029**

Sasaran Kegiatan (output)/Indikator		2025			2026	2027	2028	2029	TOTAL 2025-2029		
		T	R	%	T	T	T	T	Total Target Renstra	Realisasi sd 2025	%
3		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>SK.5 Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien</b>											
1	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal telah ditindaklanjuti oleh Satker	60	100	166,67%	62,00	65,00	67,00	70,00	324	100	30,86%

**b. Kendala**

Tidak ada kendala berarti

**c. Rekomendasi/Tindak Lanjut**

Evaluasi dari kegiatan ini yaitu BBPSJIA akan terus berkordinasi dengan pihak Inspektorat Jenderal dalam kegiatan pemeriksaan/audit. Rencana perbaikan selanjutnya adalah:

- Koordinasi dengan masing-masing Penanggung Jawab untuk menindaklanjuti hasil temuan sesuai rekomendasi.
- Monitoring penyelesaian tindak lanjut yang belum sesuai rekomendasi.
- Penyampaian dan koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan pada satker BBSPJIA dengan pihak Inspektorat Jenderal sesuai batas waktu yang ditetapkan

**2) Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja SK5 Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien dengan Indikator 2 Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)**

**a. Capaian**

Indikator Sasaran Strategis (SK5) dengan Indikator Kinerja 2 (dua) yaitu Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan), Capaian indikator kinerja SK4 dapat dilihat seperti pada Tabel 3.49.

**Tabel 3.49**  
Target dan Realisasi Indikator Kinerja

Sasaran Strategis (SK5)	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)	85,00	89,50	105,29%

Tabel 3.49 menunjukkan bahwa Indikator Kinerja SK5 Indikator Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan) dengan Target 85,00 (nilai) dan Realisasi 89,50 (nilai) sehingga capaian tahun 2025 sebesar 105,29 % dari target.

Pada tahun 2025, telah dilakukan pengawasan kearsipan internal oleh Tim Pengawas dari Biro Umum Kemenperin pada tanggal 11 September 2025. Setelah dilakukan pengawasan, ditemukan beberapa ketidaksesuaian dengan Peraturan-peraturan terkait Kearsipan sehingga diberikan waktu selama 7 hari kerja untuk dilakukan perbaikan. Perbaikan telah selesai dilakukan oleh Tim Kearsipan BBSPJIA dan telah disampaikan pada tanggal 23 September 2025 kepada Tim Pengawas dari Biro Umum Kemenperin.

Pada tanggal 18 Desember 2025, Kepala Biro Umum telah mengirimkan Nota Dinas Nomor 855/SJ-IND.6/KR/XII/2025 tentang Penyampaian Pengumuman Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Pada Unit Kearsipan dan Unit Pengolah Satuan Kerja Daerah Tahun 2025 BBSPJIA memperoleh nilai 89,50 untuk Unit Kearsipan. Realisasi ini mencapai 105,29 % dari yang ditargetkan sebesar nilai 85,00.

Adapun sebagai perbandingan pada tahun 2025 capaian BBSPJIA dengan Satker lain dilingkungan BSKJI Indikator Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan) dalam hal ini dengan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik (BBSPJIBBT) 119,54% dan Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) 123,35% sesuai tabel 3.50 menunjukkan bahwa capaian indikator BBSPJPPI dan BBSPJIBBT lebih tinggi dibandingkan capaian BBSPJIA 105,29%.

**Tabel 3.50**  
**Perbandingan Capaian 2025**  
**Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien**

No	Indikator	Satker	Target	Realisasi	Capaian 2025
1	Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)	BBSPJPPI	70,10	86,47	115,34%
		BBSPJIA	85,00	89,50	101,69%
		BBSPJIBBT	77,80	93,00	87,23%

**Tabel 3.51**  
Target dan Realisasi  
Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)  
Tahun 2025 – 2029

Sasaran Kegiatan (output)/Indikator		2025			2026	2027	2028	2029
		T	R	%	T	T	T	T
3		3	4	5	6	7	8	9
<b>SK.5 Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien</b>								
2	Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)	85,00	89,50	105,29%	86,00	87,00	88,00	89,00

T= Target, R: Realisasi

Tabel 3.51 menunjukkan indikator Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan) pada tahun 2025 capaian sebesar 105,29% dengan target 85,00 dan realisasi sebesar 89,50 sedangkan untuk target tahun 2026 : 86,00, 2027 : 87,00, 2028 : 88,00 dan 2029 sebesar 89,00 dengan satuan Nilai.

Berdasarkan tabel 3.52 Total Target Renstra Tahun 2025 - 2029 sebesar 435 (nilai) dengan realisasi sampai dengan tahun 2025 sebesar 89,50 (nilai) atau sebesar 20,57% dari target sd. tahun 2029.

**Tabel 3.52**  
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025-2029 dengan  
Target Renstra Tahun 2025-2029

Sasaran Kegiatan (output)/Indikator		2025			2026	2027	2028	2029	TOTAL 2025-2029		
		T	R	%	T	T	T	T	Total Target Renstra	Realisasi sd 2025	%
3		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>SK.5 Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien</b>											
2	Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)	85,00	89,50	105,29%	86,00	87,00	88,00	89,00	435	89,5	20,57%

**b. Kendala**

Tidak ada kendala berarti

**c. Rekomendasi/Tindak Lanjut**

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah pelaksanaan pengelolaan arsip dinamis pada unit kearsipan BBSPJIA telah dijalankan diantaranya dengan telah dilakukannya upaya pengendalian naskah dinamis, pengelolaan terkait penggunaan, pemeliharaan dan penyusutan arsip. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan kompetensi SDM khususnya menyangkut pengoperasian aplikasi

persuratan Srikandi dalam mendukung pencapaian target pengawasan kearsipan internal.

Rencana perbaikan untuk tahun 2026 adalah penyesuaian pedoman dan target kinerja kearsipan, serta perlu koordinasi ke Biro Umum sebagai UK (Unit Kearsipan) 1 terkait mengenai kearsipan serta menjajaki ketersediaan pelatihan/Bimtek terkait kearsipan untuk peningkatan kompetensi SDM arsiparis BBSPJIA.

## **7. Sasaran Strategis VI (SK6): Terwujudnya akuntabilitas organisasi**

Sasaran keenam (SK 6.6) BBSPJIA adalah “Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien “. Sasaran kegiatan ini memiliki 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan, antara lain : 1. Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker, 2. Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan 3. Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan.

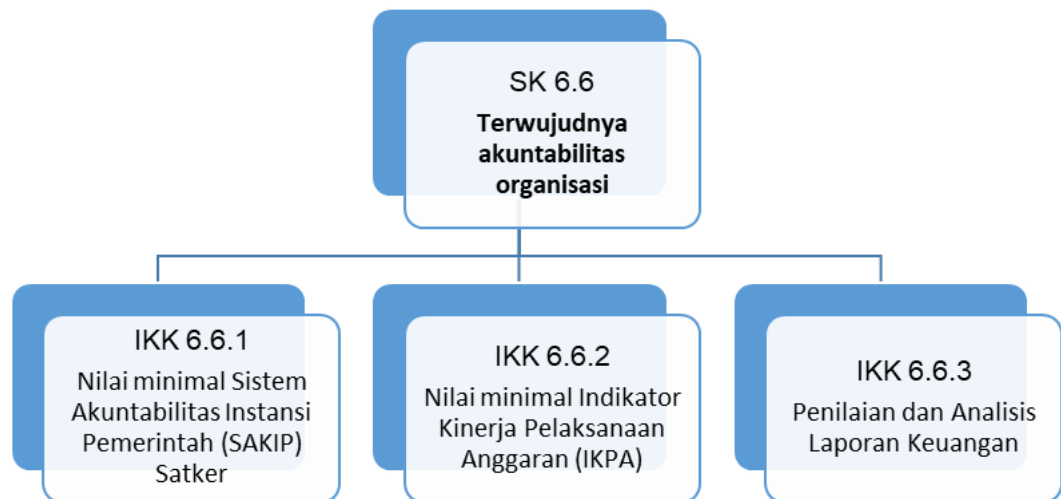
Kementerian PAN dan RB melaksanakan evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB, penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga nilai capaiannya indikator ini dapat terlihat pada pertengahan tahun anggaran setelahnya. Perhitungan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021.

Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Kembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Biro Keuangan untuk menilai ketepatan waktu, kesesuaian, kewajaran serta menganalisis akurasi serta keandalan Laporan Keuangan yang disusun oleh satuan

kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui proses evaluasi sistematis atas data keuangan, kesesuaian SAP, kecukupan informasi, efektifitas pengendalian intern serta ketaatan atas peraturan perundang-undangan.

Sasaran keenam (SK 6.6) BBSPJIA adalah seperti dapat dilihat pada gambar 1.5 berikut :



## 1) Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja SK6 rwujudnya akuntabilitas organisasi dengan Indikator 1 Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker

### a. Capaian

Indikator Sasaran Strategis (SK6) dengan Indikator Kinerja 1 (satu) yaitu Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker target dan realisasi indikator kinerja SK2 dapat dilihat seperti pada Tabel 3.53.

**Tabel 3.53**  
Target dan Realisasi Indikator Kinerja

Sasaran Strategis (SK6)	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya akuntabilitas organisasi	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	79,90	83,00	103,88%

Tabel 3.53 menunjukkan bahwa Indikator Kinerja SK6 Indikator Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker dengan Target 79,90 (nilai) dan Realisasi 83,00 (nilai) sehingga capaian tahun 2025 sebesar 103,88% dari target.

Kegiatan penilaian SAKIP Tahun 2024 di lingkungan BSKJI telah dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kemenperin pada bulan Maret 2025 dan hasil penilaian dari tim APIP menyatakan BBSPJIA mendapatkan nilai 83,00 dengan predikat A. Realisasi ini jika dibandingkan dengan target sebesar 79.90 maka capaiannya sebesar 103,88 %.

Adapun sebagai perbandingan pada tahun 2025 capaian BBSPJIA dengan Satker lain dilingkungan BSKJI Indikator Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker dalam hal ini dengan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik (BBSPJIBBT) 103,99% dan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) 105,22% sesuai tabel 3.54 menunjukkan bahwa capaian indikator BBSPJIBBT dan BBSPJPPI lebih tinggi dari capaian BBSPJIA sebesar 103,88%.

**Tabel 3.54**  
**Perbandingan Capaian 2025**  
**Terwujudnya akuntabilitas organisasi**

No	Indikator	Satker	Target	Realisasi	Capaian 2025
1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	BBSPJPPI	79,45	83,6	105,22 %
		BBSPJIBBT	84,00	87,35	103,99 %
		BBSPJIA	79,90	83,00	103,88 %

**Tabel 3.55**  
**Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker**  
**Tahun 2025 – 2029**

Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	2025			2026	2027	2028	2029	
	T	R	%	T	T	T	T	
3	3	4	5	6	7	8	9	
<b>SK.6 Terwujudnya akuntabilitas organisasi</b>								
1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	79,90	83,00	103,88%	79,95	80,00	80,25	80,50

T= Target, R: Realisasi

Tabel 3.55 menunjukkan indikator Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker pada tahun 2025 capaian sebesar 103,88% dengan target 79,90 dan realisasi sebesar 83,00 sedangkan untuk target tahun 2026 : 79,95, 2027 : 80,00, 2028 : 80,25 dan 2029 sebesar 80,50 dengan satuan nilai.

Berdasarkan tabel 3.56 Total Target Renstra Tahun 2025 - 2029 sebesar 400,6 dengan realisasi sampai dengan tahun 2025 sebesar 83,00 atau sebesar 20,72% dari target.

**Tabel 3.56**  
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025-2029 dengan Target Renstra Tahun 2025-2029

Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	2025			2026	2027	2028	2029	TOTAL 2025-2029			
	T	R	%	T	T	T	T	Total Target Renstra	Realisasi sd 2025	%	
3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>SK.6 Terwujudnya akuntabilitas organisasi</b>											
1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	79,90	83,00	103,88%	79,95	80,00	80,25	80,50	400,6	83	20,72%

T= Target, R: Realisasi

**b. Kendala**

Adanya perubahan aturan penilaian yang bersifat lebih kompleks sehingga memerlukan penyesuaian dan tindak lanjut yang sangat mendalam

**c. Rekomendasi/Tindak Lanjut**

Evaluasi dari kegiatan ini adalah menindaklanjuti rekomendasi hasil penilaian SAKIP agar nilai tahun mendatang dapat meningkat.

Rencana Perbaikan yaitu mempersiapkan data yang digunakan jauh jauh hari dan melengkapinya untuk penilaian SAKIP tahun anggaran 2025 serta menyelesaikan rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP tahun 2024.

**2) Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja SK6 Terwujudnya akuntabilitas organisasi dengan Indikator 2 Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)**

**a. Capaian dan Hasil Kinerja**

Indikator Sasaran Strategis (SK6) dengan Indikator Kinerja 2 (dua) yaitu Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), Capaian indikator kinerja SK6 dapat dilihat seperti pada Tabel 3.57.

**Tabel 3.57**  
Target dan Realisasi Indikator Kinerja

Sasaran Strategis (SK6)	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya akuntabilitas organisasi	Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95,00	97,14	102,25%

Tabel 3.58 menunjukkan bahwa Indikator Kinerja SK6 Indikator Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan Target 95,00 (nilai) dan Realisasi 97,14 (nilai) sehingga capaian tahun 2025 sebesar 102,25 % dari target.

Nilai minimal IKPA merupakan ambang batas terendah yang harus dicapai oleh satuan kerja dalam mengelola anggaran negara secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. IKPA sendiri digunakan untuk mengukur kinerja pelaksanaan anggaran berbasis aspek kesesuaian perencanaan, efektivitas pelaksanaan, serta kepatuhan terhadap regulasi. Nilai minimal ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran mendukung pencapaian output yang optimal serta menghindari potensi penyimpangan atau ketidakefisienan dalam pengelolaan keuangan negara

Adapun sebagai perbandingan pada tahun 2025 capaian BBSPJIA dengan Satker lain dilingkungan BSKJI Indikator Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dalam hal ini dengan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan

Barang Teknik (BBSPJIBBT) 98,43% dan Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) 97,34% sesuai tabel 3.58 menunjukkan bahwa capaian indikator BBSPJIA 102,25% lebih tinggi dibandingkan BBSPJIBBT dan BBSPJPPI.

**Tabel 3.58**  
Perbandingan Capaian 2025  
Terwujudnya akuntabilitas organisasi

No	Indikator	Satker	Target	Realisasi	Capaian 2025
1	Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	BBSPJIA	95,00	97,14	102,25%
		BBSPJIBBT	93,4	90,92	98,43%
		BBSPJPPI	94,00	92,52	97,34%

**Tabel 3.59**  
Target dan Realisasi  
Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)  
Tahun 2025 – 2029

Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	2025			2026	2027	2028	2029	
	T	R	%	T	T	T	T	
3	3	4	5	6	7	8	9	
<b>SK.6 Terwujudnya akuntabilitas organisasi</b>								
2	Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95,00	97,14	102,25%	96,00	96,00	97,00	98,00

T= Target, R: Realisasi

Tabel 3.59 menunjukkan indikator Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada tahun 2025 capaian sebesar 102,25% dengan target 95,00 dan realisasi sebesar 97,14 sedangkan untuk target tahun 2026 : 96,00, 2027 : 96,00, 2028 : 97,00 dan 2029 sebesar 98,00 dengan satuan Nilai.

Berdasarkan tabel 3.60 Total Target Renstra Tahun 2025 - 2029 sebesar 482 (nilai) dengan realisasi sampai dengan tahun 2025 sebesar 97,14 (nilai) atau sebesar 20,15% dari target.

**Tabel 3.60**  
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025-2029 dengan  
Target Renstra Tahun 2025-2029

Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	2025			2026	2027	2028	2029	TOTAL 2025-2029			
	T	R	%	T	T	T	T	Total Target Renstra	Realisasi sd 2025	%	
3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>SK.6 Terwujudnya akuntabilitas organisasi</b>											
2	Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95,00	97,14	102,25%	96,00	96,00	97,00	98,00	482	97,14	20,15%

T= Target, R: Realisasi

**b. Kendala**

Program efisiensi anggaran 2025 membuat ketidakpastian dalam merencanakan dan melaksanakan anggaran.

**c. Rekomendasi/Tindak Lanjut**

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah berkenaan dengan pemenuhan aspek penilaian IKPA terkait kualitas perencanaan anggaran, telah dilakukan proses pemutakhiran D hal III DIPA pada Triwulan IV 2025 sesuai batas waktu ketentuan yang ditetapkan.

### 3) Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja SK6 Terwujudnya akuntabilitas organisasi dengan Indikator 3 Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan

**a. Capaian dan Hasil Kinerja**

Indikator Sasaran Strategis (SK6) dengan Indikator Kinerja 3 (tiga) yaitu Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan target dan realisasi indikator kinerja SK6 dapat dilihat seperti pada Tabel 3.61.

**Tabel 3.61**  
Target dan Realisasi Indikator Kinerja

Sasaran Strategis (SK6)	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya akuntabilitas organisasi	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan	75,00	93,00	124,00%

Tabel 3.61 menunjukkan bahwa Indikator Kinerja SK2 Indikator Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan dengan Target 75,00 (nilai) dan Realisasi 93,00 (nilai) sehingga capaian tahun 2025 sebesar 124% dari target.

Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Biro Keuangan untuk menilai ketepatan waktu, kesesuaian, kewajaran serta menganalisis akurasi serta keandalan Laporan Keuangan yang disusun oleh satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui proses evaluasi

sistematis atas data keuangan, kesesuaian SAP, kecukupan informasi, efektifitas pengendalian intern serta ketaatan atas peraturan perundang-undangan.

Untuk cara perhitungan adalah sebagai berikut:

<b>Tingkat Satuan Kerja</b>	
<b>Komponen Penilaian</b>	<b>Bobot (%)</b>
1. Kesesuaian dengan SAP	24%
2. Kecukupan Informasi	54%
3. Efektivitas Pengendalian Internal	11%
4. Ketaatan atas Peraturan Perundang-undangan	11%
<b>Jumlah</b>	<b>100%</b>

Pada tanggal 4 September 2025, Biro Keuangan Kementerian Perindustrian telah menyampaikan Surat Plh Kepala Biro Keuangan Nomor B/1088/SJ-IND.3/KU/IX/2025 tentang Penyampaian Hasil Penilaian Laporan Keuangan Tingkat Satker dan Unit Eselon I, dimana BBSPJIA mendapat nilai 93,00, Capaian tahun 2025 mencapai 124 % dari yang ditargetkan yaitu nilai 75,00.

Adapun sebagai perbandingan pada tahun 2025 capaian BBSPJIA dengan Satker lain dilingkungan BSKJI Indikator Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan dalam hal ini dengan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik (BBSPJIBBT) 121,33% dan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) 126,33% sesuai tabel 3.62 menunjukkan bahwa capaian indikator BBSPJIA 124,00% lebih rendah dibandingkan capaian BBSPJPPI dan lebih tinggi dibandingkan capaian BBSPJIBBT.

**Tabel 3.62**  
**Perbandingan Capaian 2025**  
**Terwujudnya akuntabilitas organisasi**

No	Indikator	Satker	Target	Realisasi	Capaian 2025
1	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan	BBSPJPPI	75,00	94,75	126,33%
		BBSPJIA	75,00	93,00	124,00%
		BBSPJIBBT	75,00	91,00	121,33%

**Tabel 3.63**  
Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan  
Tahun 2025 – 2029

Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	2025			2026	2027	2028	2029	
	T	R	%	T	T	T	T	
3	3	4	5	6	7	8	9	
<b>SK.6 Terwujudnya akuntabilitas organisasi</b>								
3	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan	75,00	93,00	124,00%	75,25	75,50	75,75	76,00

T= Target, R: Realisasi

Tabel 3.63 menunjukkan indikator Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan pada tahun 2025 capaian sebesar 124,00% dengan target 75,00 dan realisasi sebesar 93,00 sedangkan untuk target tahun 2026 : 75,25, 2027 : 75,50, 2028 : 75,50 dan 2029 sebesar 76,00 dengan satuan nilai.

Berdasarkan tabel 3.64 Total Target Renstra Tahun 2025 - 2029 sebesar 377,5 (nilai) dengan realisasi sampai dengan tahun 2025 sebesar 93,00 (nilai) atau sebesar 24,64% dari target.

**Tabel 3.64**  
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025-2029 dengan  
Target Renstra Tahun 2025-2029

Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	2025			2026	2027	2028	2029	TOTAL 2025-2029			
	T	R	%	T	T	T	T	Total Target Renstra	Realisasi sd 2025	%	
3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>SK.6 Terwujudnya akuntabilitas organisasi</b>											
3	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan	75,00	93,00	124,00%	75,25	75,50	75,75	76,00	377,5	93	24,64%

T= Target, R: Realisasi

#### b. Kendala

Tidak ada kendala berarti

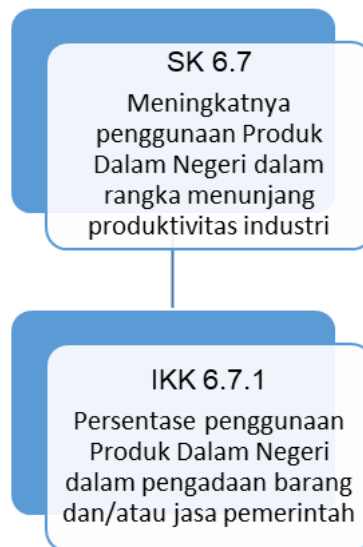
#### c. Rekomendasi/Tindak Lanjut

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatkan koordinasi dengan tim keuangan Sekretariat BSKJI dan Biro Keuangan.

Rencana perbaikan pada tahun selanjutnya adalah mempersiapkan data dukung penyusunan laporan keuangan tahun 2025.

## 8. Sasaran Strategis VII (SK7): Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri

Sasaran ketujuh (SK 6.7) BBSPJIA adalah “Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri “. Sasaran kegiatan ini memiliki 1(satu) Indikator Kinerja Kegiatan Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah sesuai gambar 3.3. Penggunaan Produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Kepres 24 tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja Kementerian/Lembaga.



### 1) Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja indikator Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah

#### a. Capaian

Penggunaan produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Keppres Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari pemanfaatan anggaran belanja Kementerian/Lembaga. Dalam hal ini, perhitungan penggunaan produk dalam negeri didasarkan atas realisasi anggaran pada kegiatan pengadaan barang/jasa yang didasarkan pada pemakaian akun untuk

belanja pemerintah. Pada tahun 2025, hasil perhitungan indikator Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah mencapai nilai 71,84. Hasil ini bersumber dari Nota Dinas Kepala P4DN, Kementerian Perindustrian Nomor 4/SJ-IND.8/PR/I/2026, tanggal 8 Januari 2026, Hal Presentase capaian penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa Kementerian Perindustrian. Realisasi BBSPJIA sebesar 71,84% atau mencapai 88,69 % dari target.

**Tabel 3.65**  
Target dan Realisasi Indikator Kinerja

<b>Indikator Kinerja SK 7.1.</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>
Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	81,00	71,84	88,69

Tabel 3.65 menunjukkan bahwa realisasi indikator kinerja Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah sebesar 88,69 % dari target.

Berdasarkan data diatas, membandingkan realisasi dan target pada tahun 2025, maka Sasaran Strategis (SK7) Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah **Belum Berhasil** mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun sebagai perbandingan pada tahun 2025 capaian BBSPJIA dengan Satker lain dilingkungan BSKJI Indikator Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah dalam hal ini dengan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik (BBSPJIBBT) 117,25% dan Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) 110,75% sesuai tabel 3.67 menunjukan bahwa capaian indikator BBSPJIA 88,69% lebih rendah dibandingkan capaian BBSPJIBBT dan BBSPJPPI.

**Tabel 3.67**  
**Perbandingan Capaian 2025**  
**Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka**  
**menunjang produktivitas Industri**

No	Indikator	Satker	Capaian 2025
1	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	BBSPJIBBT	117,25%
		BBSPJPPI	110,75%
		BBSPJIA	88,69%

**Tabel 3.68**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Terwujudnya SDM yang profesional**  
**Tahun 2025 – 2029**

Sasaran Kegiatan (output)/Indikator		2025			2026	2027	2028	2029
		T	R	%	T	T	T	T
3		3	4	5	6	7	8	9
<b>SK.7 Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri</b>								
1	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	81,00	71,84	88,69%	81,00	81,00	82,00	82,00

T= Target R=Realisasi

Tabel 3.68 menunjukkan indikator Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah pada tahun 2025 capaian sebesar 88,69% dengan target 81,00 (persen) dan realisasi sebesar 71,84 (persen) sedangkan untuk target tahun 2026 : 81,00, 2027 : 81,00, 2028 : 82,00 dan 2029 sebesar 82,00 dengan satuan persen.

Berdasarkan tabel 3.69 Total Target Renstra Tahun 2025 - 2029 sebesar 407 (persen) dengan realisasi sampai dengan tahun 2025 sebesar 71,84 (persen) atau sebesar 17,65% dari target.

**Tabel 3.69**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025-2029 dengan**  
**Target Renstra Tahun 2025-2029**

Sasaran Kegiatan (output)/Indikator		2025			2026	2027	2028	2029	TOTAL 2025-2029		
		T	R	%	T	T	T	T	Total Target Renstra	Realisasi sd 2025	%
3		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>SK.7 Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri</b>											
1	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	81,00	71,84	88,69%	81,00	81,00	82,00	82,00	407	71,84	17,65%

T= Target R=Realisasi

### c. Kendala

Tidak ada kendala yang berarti

**d. Rekomendasi/Tindak Lanjut**

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah agar selalu dilakukan monitoring pengadaan barang dan jasa agar pelaksanaan pengadaan sesuai dengan rencana penarikan anggaran yang telah disusun.

## 3.1.2. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Renstra BBSPJIA TA. 2025 -2029

Tabel 3.70  
Capaian Kinerja Renstra BBSPJIA TA. 2025-2029

Sasaran Kegiatan (output)/Indikator		2025			2026	2027	2028	2029	TOTAL 2025-2029		
		T	R	%	T	T	T	T	Total Target Renstra	Realisasi sd 2025	%
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>TJ Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri</b>											
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,72	3,76	101,08%	3,73	3,74	3,75	3,76	18,7	3,76	20,11%
2	Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/ instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri	3750	3.734	99,57%	3800	3850	3900	3950	19250	3734	19,40%
<b>SK.1 Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional</b>											
1	Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai <i>Service Level Agreement (SLA)</i>	95,00	100	105,26%	95,00	96,00	96,00	97,00	479	100	20,88%
2	Nilai <i>Net Promote Score (NPS)</i>	50,00	72,99	145,98%	55	60	65	70	300	72,99	24,33%
<b>SK.2 Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri</b>											
1	Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	1	2	200,00%	1	2	2	2	8	2	25,00%
2	Jumlah hasil layanan jasa industri	20.600	23.090	112,09%	21.218	21.960	22.729	23.836	110.343	23.090	20,93%
3	Nilai <i>Revenue on Asset (RoA)</i>	8,40	9,27	110,36%	8,50	8,50	8,75	9,00	43,15	9,27	21,48%
4	Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)	75,00	97,48	129,97%	76,00	78,00	80,00	82,00	391	97,48	24,93%
<b>SK.3 Terwujudnya SDM yang profesional</b>											
1	Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	81,30	78,30	96,31%	81,40	83,50	84,00	84,50	414,7	78,3	18,88%
<b>SK.4 Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik</b>											
1	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	20,00	20,00	100,00%	40,00	60,00	80,00	100,00	300	20	6,67%

Sasaran Kegiatan (output)/Indikator		2025			2026	2027	2028	2029	TOTAL 2025-2029		
		T	R	%	T	T	T	T	Total Target Renstra	Realisasi sd 2025	%
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	77,00	78,3	101,69%	78,00	82,00	83,00	85,00	405	78,3	19,33%
3	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,20	4,35	103,57%	4,51	4,52	4,53	4,54	22,3	4,35	19,51%
<b>SK.5 Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien</b>											
1	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal telah ditindaklanjuti oleh Satker	60	100	166,67%	62,00	65,00	67,00	70,00	324	100	30,86%
2	Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)	85,00	89,50	105,29%	86,00	87,00	88,00	89,00	435	89,5	20,57%
<b>SK.6 Terwujudnya akuntabilitas organisasi</b>											
1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	79,90	83,00	103,88%	79,95	80,00	80,25	80,50	400,6	83	20,72%
2	Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95,00	97,14	102,25%	96,00	96,00	97,00	98,00	482	97,14	20,15%
3	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan	75,00	93,00	124,00%	75,25	75,50	75,75	76,00	377,5	93	24,64%
<b>SK.7 Meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri</b>											
1	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	81,00	71,84	88,69%	81,00	81,00	82,00	82,00	407	71,84	17,65%
TOTAL				<b>116,48%</b>							<b>20,89%</b>

## 1) Hasil yang telah dicapai

Pada umumnya realisasi kinerja BBSPJIA tahun 2025 **sesuai dengan target** yang ada pada Renstra. Selama tahun 2025, terdapat sebanyak 15 (lima belas) indikator yang telah mencapai target sampai dengan TA.2025 (realisasi sebesar 100 % atau lebih dari target) yaitu:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2. Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai *Service Level Agreement* (SLA)
3. Nilai Net Promote Score (NPS)
4. Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
5. Jumlah hasil layanan jasa industri
6. Nilai *Revenue on Asset* (RoA)
7. Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)
8. Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI
9. Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
10. Indeks Pelayanan Publik (IPP)
11. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal telah ditindaklanjuti oleh Satker
12. Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)
13. Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker
14. Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
15. Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan

Sedangkan indikator yang **tidak mencapai target** (realisasi di bawah 100 % dari target) adalah:

1. Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/ instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri;
2. Rata-rata indeks profesionalitas ASN; dan
3. Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah

## 2) Analisis hasil yang telah dicapai

Tabel 3.70 menunjukkan realisasi indikator kinerja Tahun 2025 dengan rata-rata capaian 116,48% yang terdiri dari 15 (dua belas) indikator kinerja realisasinya **berhasil** mencapai target dan ada 3 (tiga) indikator kinerja realisasi tahun 2025 **belum berhasil** mencapai target antara lain: 1) Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/ instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri, 2) Rata-rata indeks profesionalitas ASN dan 3) 1. Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.

## 3.2. Akuntabilitas Keuangan

### 3.2.1. Realisasi Anggaran Keuangan (RM + PNBPN BLU)

Realisasi keuangan berdasarkan Indikator Perjanjian Kinerja TA. 2025 adalah sebesar **Rp. 43.069.507.909,-** atau **95,84%** dari pagu sebesar **Rp. 44.939.538.000,-** secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.45.

**Tabel 3.71**  
Realisasi Keuangan Berdasarkan Indikator Perjanjian Kinerja TA. 2025

Kode	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Komponen/ Subkomponen	Anggaran		
									Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
TJ	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*	Indeks	3,72	3,76	101,08%	Pelaksanaan Pemasaran /Promosi /Pameran / Publikasi Layanan Teknis	-	-	-
								Gaji dan Tunjangan			
		2	Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/ instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri *	Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha/ Instansi	3750	3.734	99,57%	Jasa pelayanan teknis pengujian industri agro	7.871.291.000	7.139.944.704	90,71%
SK.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	1	Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai <i>Service Level Agreement (SLA)</i>	Persen	95,00	100	105,26%	Kalibrasi Peralatan Standar Laboratorium Kalibrasi	142.888.000	124.588.950	87,19%
								Re-Akreditasi ABICAL Kalibrasi	1.500.000	1.500.000	100,00%
		2	Nilai <i>Net Promote Score (NPS)</i>	Nilai	50,00	72,99	145,98%	Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri agro	481.508.000	366.527.165	76,12%
SK.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	1	Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan	Indeks	1	2	200,00%	Jasa pelayanan teknis sertifikasi industri agro	1.810.900.000	1.687.017.823	93,16%

Kode	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Komponen/ Subkomponen	Anggaran			
								Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			Pajak (PNBP)								
		2	Jumlah hasil layanan jasa industri	Hasil Layanan	20600	23090	112,09%	Operasional Layanan Kalibrasi	521.530.000	432.598.967	82,95%
		3	Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)	Persen	8,40	9,27	110,36%	Operasional Layanan Penyelenggaraan Uji Profisiensi	490.280.000	397.915.648	81,16%
		4	Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)	Persen	75,00	97,48	129,97%	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	5.717.098.000	5.502.581.287	96,25%
SK.3	Terwujudnya SDM yang profesional	1	Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	Indeks	81,30	78,30	96,31%	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM	310.000.000	268.014.343	86,46%
SK.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik	1	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	Persen	20,00	20,00	100,00%	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	50.000.000	49.794.600	99,59%
		2	Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Persen	77,00	78,3	101,69%	Pengadaan peralatan inventaris perkantoran	40.000.000	31.801.500	79,50%

Kode	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Komponen/ Subkomponen	Anggaran		
									Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		3	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	4,20	4,35	103,57%	Gaji dan Tunjangan	9.910.563.000	9.852.051.713	99,41%
								Pengadaan peralatan inventaris perkantoran	-	-	
SK.5	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	1	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal telah ditindaklanjuti oleh Satker	Persen	60	100	166,67%	Jasa optimalisasi pemanfaatan teknologi industri agro	30.700.000	6.695.900	21,81%
		2	Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)	Nilai	85,00	89,50	105,29%	Jasa pelayanan teknis konsultansi teknis/manajemen industri agro	100.000.000	86.461.900	86,46%
SK.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi	1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	Nilai	79,90	83,00	103,88%	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	14.160.000.000	14.108.058.327	99,63%
		2	Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai	95,00	97,14	102,25%	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	-	-	-
								Surveilen Penyelenggaraan Uji Profisiensi	43.650.000	42.880.000	98,24%
		3	Penilaian dan Analisis Laporan	Nilai	75,00	93,00	124,00%	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	-	-	-

Kode	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Komponen/ Subkomponen	Anggaran			
								Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			Kuangan				Jasa pelayanan inspeksi teknik industri agro	214.030.000	171.524.747	80,14%	
SK.7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri	1	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	Persen	81,00	71,84	88,69%	Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/ layanan industri agro	3.043.600.000	2.799.550.335	91,98%
						<b>116,48%</b>	<b>Total</b>	<b>44.939.538.000</b>	<b>43.069.507.909</b>	<b>95,84%</b>	

Pada awal TA. 2025 telah disusun rencana anggaran dan realisasi anggaran Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro per Triwulan, seperti tampak pada tabel 3.72.

### Realisasi Anggaran Kegiatan Per Triwulan Tahun 2025

Tabel 3.72.

	Kegiatan/ Komponen/ Subkomponen	Anggaran (Rp) (000)	Output	Triwulan I (%)		Triwulan II (%)		Triwulan III (%)		Triwulan IV (%)		Realisasi Ouput %
				Keuangan		Keuangan		Keuangan		Keuangan		
				T	R	T	R	T	R	T	R	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>EC</b>	<b>Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri</b>	14.751.877										
1	Pelayanan Publik Kepada Industri	11.708.277	2648 industri	25	25	50	55	75	75	100	89.32	100
	a. Jasa Pelayanan Teknis Pengujian Industri Agro	7.871.291	1650 industri	25	40	50	60	75	80	100	90.71	100
	b. Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi Industri Agro	665.918	480 industri	25	22	50	45	75	75	100	83.90	100
	c. Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi Industri Agro	1.810.900	360 industri	25	13	50	50	75	75	100	93.16	100
	d. Jasa Pelayanan Bimbingan Dan Pendampingan Teknis Industri Agro	481.508	60 industri	25	20	50	45	75	70	100	76.12	100
	e. Jasa Pelayanan Inspeksi Teknik Industri Agro	214.030	35 industri	25	20	50	55	75	75	100	80.14	100
	f. Jasa Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri Agro	30.700	3 industri	25	20	50	50	75	75	100	21.81	100
	g. Jasa Pelayanan Teknis Konsultasi Teknis/manajemen Industri Agro	100.000	10 industri	25	15	50	50	75	70	100	86.46	100
	h. Jasa Penyelenggaraan Uji Profisiensi Industri Agro	533.930	50 industri	25	20	50	50	75	75	100	82.56	100
2	Sarana Bidang Industri Dan Perdagangan	3.043.600	13 unit	25	25	50	50	75	75	100	91.98	100
	Peralatan Fasilitas Laboratorium/workshop/layanan Industri Agro	3.043.600	13 unit	25	26	50	55	75	80	100	91.98	100
<b>WA</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	30.187.661										

Kegiatan/ Komponen/ Subkomponen	Anggaran (Rp) (000)	Output	Triwulan I (%)		Triwulan II (%)		Triwulan III (%)		Triwulan IV (%)		Realisasi Output	
			Keuangan		Keuangan		Keuangan		Keuangan			
			T	R	T	R	T	R	T	R		%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Layanan Dukungan Manajemen Internal	29.787.661	4 layanan	25	25	50	50	75	75	100	98.91	100
	a. Layanan Perkantoran	29.787.661	1 layanan	25	25	50	50	75	75	100	98.91	100
2	Layanan Sarana Dan Prasarana Internal	90.000	31 Unit	25	25	50	50	75	75	100	90.66	100
	Layanan Sarana Internal	<b>90.000</b>	31 unit. m2. paket	25	25	50	50	75	75	100	90.66	100
3	Layanan Manajemen SDM Internal	310.000	80 orang	25	25	50	50	75	75	100	74.73	100
	Layanan Pendidikan Dan Pelatihan	310.000	80 orang	25	25	50	50	75	75	100	86.46	100
	<b>TOTAL ANGGARAN</b>	<b>44.939.538</b>		25	24	50	57	75	81	100	95,84	100

**Tabel 3.73**  
Realisasi Anggaran BBSPJIA Tahun 2025

Kegiatan / Komponen /Sub Komponen	Pagu Efektif	Realisasi TA 2025	%
<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>	<b>44,939,538,000</b>	<b>43,069,507,909</b>	<b>95.84 %</b>
EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	14,751,877,000	13,257,206,139	89.87 %
EC.6077 Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri	14,751,877,000	13,257,206,139	89.87 %
BAD Pelayanan Publik kepada industri	11,708,277,000	10,457,655,804	89.32 %
BAD.004 Jasa pelayanan teknis pengujian industri agro	7,871,291,000	7,139,944,704	90.71 %
051 Layanan Pengujian	7,871,291,000	7,139,944,704	90.71 %
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	5,987,331,000	5,697,654,028	95.16 %
051.0B Re Akreditasi Abical-pengujian	66,550,000	66,550,000	100.00 %
051.0C Validasi Metode Uji	29,300,000	10,000,000	34.13 %
051.0D Operasional Layanan	1,702,210,000	1,304,333,426	76.63 %
051.0E Operasional Layanan Produsen Bahan Acuan	85,900,000	61,407,250	71.49 %
BAD.016 Jasa pelayanan teknis kalibrasi industri agro	665,918,000	558,687,917	83.90 %
051 Layanan Kalibrasi	665,918,000	558,687,917	83.90 %
051.0A Operasional Layanan Kalibrasi	521,530,000	432,598,967	82.95 %

Kegiatan / Komponen /Sub Komponen		Pagu Efektif	Realisasi TA 2025	%
<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>		<b>44,939,538,000</b>	<b>43,069,507,909</b>	<b>95.84 %</b>
051.0B	Re-Akreditasi ABICAL Kalibrasi	1,500,000	1,500,000	100.00 %
051.0C	Kalibrasi Peralatan Standar Laboratorium Kalibrasi	142,888,000	124,588,950	87.19 %
BAD.028	Jasa pelayanan teknis sertifikasi industri agro	1,810,900,000	1,687,017,823	93.16 %
051	Layanan Sertifikasi	1,810,900,000	1,687,017,823	93.16 %
051.0A	Operasional Layanan Sertifikasi	1,446,810,000	1,409,170,494	97.40 %
051.0B	Pemeliharaan Lembaga Sertifikasi Sistem BBIA	32,520,000	15,500,000	47.66 %
051.0C	Pemeliharaan Lembaga Sertifikasi Produk BBIA	58,500,000	54,495,000	93.15 %
051.0D	EVALUASI dan MONITORING	44,650,000	17,000,000	38.07 %
051.0E	Operasional Layanan Jasa Verifikasi/Validasi TKDN dan Gas Rumah Kaca (GRK)	160,920,000	131,155,535	81.50 %
051.0F	Operasional Layanan Lembaga Pemeriksa Halal BBPSJIA	67,500,000	59,696,794	88.44 %
BAD.040	Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri agro	481,508,000	366,527,165	76.12 %
051	Layanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri Agro	481,508,000	366,527,165	76.12 %
051.0A	Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri agro	481,508,000	366,527,165	76.12 %
BAD.042	Jasa pelayanan inspeksi teknik industri agro	214,030,000	171,524,747	80.14 %
051	Layanan inspeksi teknis	214,030,000	171,524,747	80.14 %
051.0A	Operasional Layanan Inspeksi Teknis	204,730,000	168,399,747	82.25 %
051.0B	Surveilen ABITIS	9,300,000	3,125,000	33.60 %
BAD.045	Jasa optimalisasi pemanfaatan teknologi industri agro	30,700,000	6,695,900	21.81 %
051	Layanan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri agro	30,700,000	6,695,900	21.81 %
051.0A	Rancang bangun peralatan	30,700,000	6,695,900	21.81 %
BAD.048	Jasa pelayanan teknis konsultansi teknis/manajemen industri agro	100,000,000	86,461,900	86.46 %
051	Layanan konsultansi	100,000,000	86,461,900	86.46 %
051.0A	Layanan Konsultansi	100,000,000	86,461,900	86.46 %
BAD.052	Jasa penyelenggaraan uji profisiensi industri agro	533,930,000	440,795,648	82.56 %
051	Layanan penyelenggaraan uji profisiensi	533,930,000	440,795,648	82.56 %
051.0A	Operasional Layanan Penyelenggaraan Uji Profisiensi	490,280,000	397,915,648	81.16 %
051.0B	Surveilen Penyelenggaraan Uji Profisiensi	43,650,000	42,880,000	98.24 %
CAH	Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	3,043,600,000	2,799,550,335	91.98 %
CAH.016	Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan industri agro	3,043,600,000	2,799,550,335	91.98 %
051	Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan BBIA	3,043,600,000	2,799,550,335	91.98 %
051.0A	Peralatan Laboratorium	3,043,600,000	2,799,550,335	91.98 %
WA	Program Dukungan Manajemen	30,187,661,000	29,812,301,770	98.76 %
WA.6042	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	30,187,661,000	29,812,301,770	98.76 %
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	29,787,661,000	29,462,691,327	98.91 %

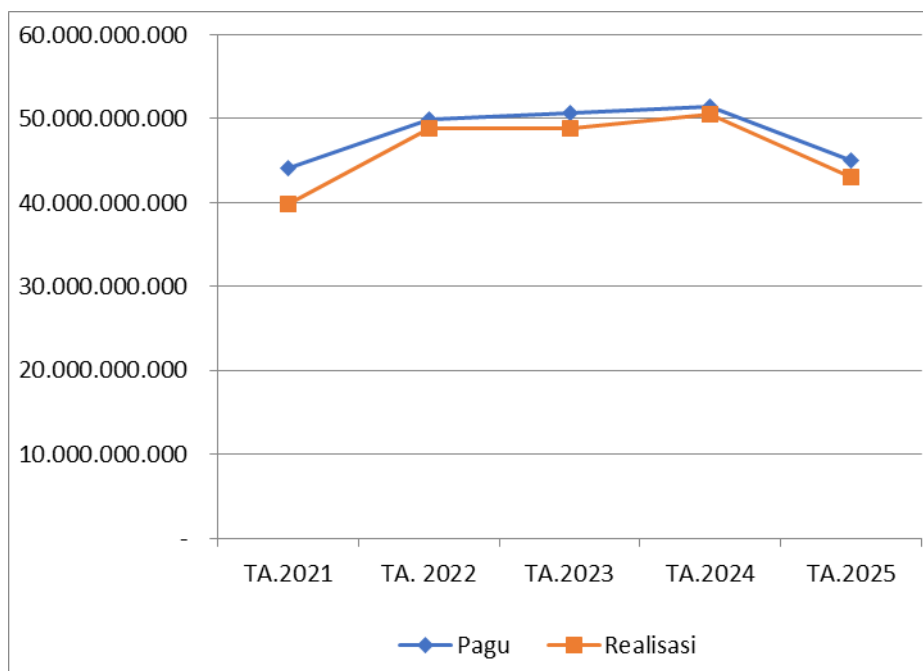
Kegiatan / Komponen /Sub Komponen		Pagu Efektif	Realisasi TA 2025	%
<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>		<b>44,939,538,000</b>	<b>43,069,507,909</b>	<b>95.84 %</b>
EBA.994	Layanan Perkantoran	29,787,661,000	29,462,691,327	98.91 %
001	Gaji dan Tunjangan	9,910,563,000	9,852,051,713	99.41 %
001.0A	Gaji dan Tunjangan	9,910,563,000	9,852,051,713	99.41 %
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	19,877,098,000	19,610,639,614	98.66 %
002.0A	TANPA SUB KOMPONEN	4,601,353,000	4,406,608,860	95.77 %
002.0C	Langganan Daya dan Jasa	1,115,745,000	1,095,972,427	98.23 %
002.0E	Remunerasi BLU	14,160,000,000	14,108,058,327	99.63 %
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	90,000,000	81,596,100	90.66 %
EBB.951	Layanan Sarana Internal	90,000,000	81,596,100	90.66 %
052	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	50,000,000	49,794,600	99.59 %
052.0A	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	50,000,000	49,794,600	99.59 %
053	Pengadaan peralatan inventaris perkantoran	40,000,000	31,801,500	79.50 %
053.0A	Pengadaan peralatan inventaris perkantoran	40,000,000	31,801,500	79.50 %
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	310,000,000	268,014,343	86.46 %
EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	310,000,000	268,014,343	86.46 %
051	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM	310,000,000	268,014,343	86.46 %
051.0A	Diklat SDM Teknis dan Non Teknis	310,000,000	268,014,343	86.46 %

a) Analisis hasil yang telah dicapai

- Tabel 3.72 dan 3.73 menunjukkan bahwa realisasi anggaran TA 2025 sebesar **Rp. 43.069.507.909.-** atau 95.84% dari pagu sebesar **Rp. 44.939.538.000.-** jika dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2025 terhadap realisasi pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar yaitu 2.44% .
- Perbandingan realisasi anggaran belanja Tahun Anggaran (TA) 2021 - 2025 seperti Tabel 3.48.

Tabel 3.74  
Perkembangan Realisasi Anggaran TA. 2021-2025

Tahun	TA.2021	TA. 2022	TA.2023	TA.2024	TA.2025
<b>Pagu</b>	44.039.580.000	49.858.693.000	50.730.971.000	51.420.357.000	44.939.538.000
<b>Realisasi</b>	39.896.975.779	48.834.940.530	48.783.216.207	50.534.938.120	43.069.507.909
<b>% Realisasi</b>	<b>90,59</b>	<b>97,95</b>	<b>96,16</b>	<b>98,28</b>	<b>95,84</b>



Gambar 3.1  
Grafik Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2021-2025

Tabel 3.75  
Pagu dan Realiasi Berdasarkan Belanja Tahun 2025

SUMBER	JENIS BELANJA	PAGU	Pagu Blokir	Pagu Efektif	REALISASI	Pagu Efektif
<b>RM</b>	51 (B. Pegawai)	9.910.563.000		9.910.563.000	9.843.598.677	99.32
	52 (B. Barang)	2.973.368.000	1.527.190.000	1.446.178.000	1.428.159.984	98.75
	53 (B. Modal)	300.000.000	100.000.000	200.000.000	199.966.500	99.98
	<b>Total RM</b>	<b>13.183.931.000</b>	<b>1.627.190.000</b>	<b>11.556.741.000</b>	<b>11.471.725.161</b>	<b>92.93</b>

SUMBER	JENIS BELANJA	PAGU	Pagu Blokir	Pagu Efektif	REALISASI	Pagu
BLU	52 (B. Barang)	28.064.000.000	857.203.000	27.206.797.000	25.700.148.369	94.46
	52 (B. Barang) Saldo Kas BLU	3.192.400.000	0	3.192.400.000	3.168.345.444	99.25
	53 (B. Modal)	1.736.000.000	1.450.000.000	286.000.000	222.476.236	77.79
	53 (B. Modal) Saldo Kas BLU	2.697.600.000		2.697.600.000	2.506.812.699	92.93
	<b>Total BLU</b>	<b>35.690.000.000</b>	<b>2.307.203.000</b>	<b>33.382.797.000</b>	<b>31.597.782.748</b>	<b>94.65</b>
<b>RM+BLU</b>		<b>48.873.931.000</b>	<b>3.934.393.000</b>	<b>44.939.538.000</b>	<b>43.069.507.909</b>	<b>95.84</b>

Berdasarkan Gambar 3.75 menunjukkan realisasi anggaran tahun 2021-2025 fluktuatif. trend cenderung menurun pada realisasi TA 2025. Pagu dan Realisasi Berdasarkan Belanja tahun 2025 Pagu RM sebesar Rp. 11.556.741.000.- dan Realisasi Rp. 11.471.725.161.- atau sebesar 92.93% sedangkan untuk Pagu BLU sebesar Rp. 33.382.797.000.- dan Realisasi Rp. 31.597.782.748 atau 94.65% sehingga total Pagu RM dan BLU tahun 2025 sebesar Rp. 44.939.538.000.- dan Realisasi Rp. 43.069.507.909.- atau 95.84%.

#### b) Kendala

Realisasi Belanja Modal belum maksimal karena Proses lelang membutuhkan waktu yang cukup lama karena harus ada rekomendasi terkait TKDN dan Peralatan laboratorium sepenuhnya masih impor karena peralatan laboratorium merupakan produk berteknologi tinggi dari negara-negara maju seperti Jepang, Amerika dan Eropa sehingga belum ada produksi dalam negeri. Hal ini menyebabkan proses lelang membutuhkan waktu yang cukup lama karena harus ada rekomendasi terkait TKDN.

### c) Rekomendasi

Pengadaan peralatan laboratorium masih akan dilanjutkan karena banyak peralatan yang sudah berumur tua dan tidak dapat diperbaiki lagi (discontinue). Selain itu dengan perkembangan ruang lingkup serta perkembangan teknologi maka BBSPJIA perlu melakukan modernisasi peralatan. Namun sebelum melakukan pengadaan peralatan, BBSPJIA sebaiknya membuat kajian untuk menilai kelayakan serta perhitungan Break Even Point (BEP) serta skala prioritas. Hal ini perlu dilakukan karena keterbatasan anggaran baik itu yang berasal dari RM ataupun PNBPN BLU

### 3.2.2. Realisasi Anggaran Keuangan

#### 1) Hasil yang telah dicapai .

Realisasi penggunaan anggaran bersumber Tahun 2025 sebesar Rp. 43.069.507.909,- atau **95,84 %** dari pagu yang bersumber sebesar Rp. 44.939.538.000,- seperti pada Tabel 3.76.

**Tabel 3.76**

Pagu dan Realisasi RM dan PNBPN Tahun 2025

Kode	Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	14,751,877,000	13,257,206,139	89.87
	6077. Pengembangan Dan Penyelenggaraan Jasa Industri	14,751,877,000	16,398,738,216	89,87
WA	Program Dukungan Manajemen	30,187,661,000	29,812,301,770	98.76
	6042. Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian Dan Pengembangan Industri	30,187,661,000	29,812,301,770	98.76
	<b>TOTAL</b>	<b>44,939,538,000</b>	<b>43,069,507,909</b>	<b>95.84</b>

Selanjutnya target dan realisasi PNBPN BLU Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.77.

Tabel 3.77

Target dan Realisasi PNBP BLU Tahun 2025

NO	Jasa Layanan	TARGET 2025 (Rp.)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	%	Kontribusi terhadap total penerimaan
1	Pengujian	13,400,000,000	14,370,184,850	107%	44.03%
2	Kalibrasi	3,000,000,000	2,787,828,950	93%	8.54%
3	Sertifikasi	7,465,000,000	7,521,155,000	101%	23.05%
4	Sampling	700,000,000	355,930,000	51%	1.09%
5	Uji Profisiensi	1,400,000,000	1,549,088,400	111%	4.75%
6	Bimbingan dan pendampingan teknis industri	1,100,000,000	1,245,150,500	113%	3.82%
7	Konsultasi	200,000,000	413,400,000	207%	1.27%
8	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri	50,000,000	7,997,100	16%	0.02%
9	Inspeksi Teknis	1,100,000,000	1,204,580,000	110%	3.69%
10	TKDN dan GRK	250,000,000	1,609,190,500	644%	4.93%
11	Pemeriksa Halal	85,000,000	27,827,500	33%	0.09%
12	Penyedia Bahan Acuan dan Uji Masa Simpan	20,000,000	52,000,000	260%	0.16%
13	Jasa Bank	450,000,000	387,249,317	86%	1.19%
14	Penggunaan Tenaga Ahli Dan Penerimaan Kunjungan	40,000,000	62,394,400	156%	0.19%
15	Penggunaan Lahan. Gedung Dan Ruangan	250,000,000	115,230,000	46%	0.35%
16	Penggunaan Peralatan Dan Mesin	250,000,000	229,734,800	92%	0.70%
17	Jasa lainnya	40,000,000	695,381,713	1738%	2.13%
	Total Penerimaan	29,800,000,000	32,634,323,030		100.00%

Tabel 3.77 menunjukkan bahwa :

- 1) Target awal PNBP tahun 2025 sebesar Rp. 29.800.000.000,-, dan Realisasi PNBP Tahun 2025 sebesar Rp. 32.634.323.030,- atau **109,51%** dari target.
- 2) Tiga jasa layanan yang berkontribusi terbesar terhadap realisasi PNBP BBSPJIA tahun 2025 berasal dari jasa layanan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi.

- 3) Pada tahun 2025 realisasi penggunaan bersumber PNBPN sebesar Rp. 25.914.170.569,- atau **97,72 %** dari Pagu sebesar Rp. 29.800.000.000,- seperti Tabel 3.78.

**Tabel 3.78**

Target dan Realisasi PNBPN dengan Pagu Penggunaan dan Realisasi Penggunaan Tahun 2025

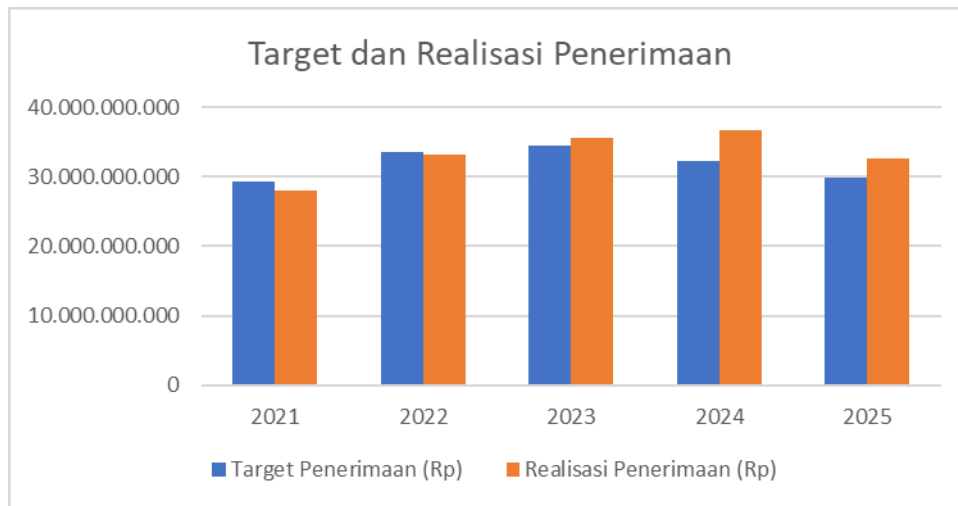
Pagu	2025
Target Penerimaan (Rp)	29.800.000.000
Realisasi Penerimaan (Rp)	32.634.323.030
Realisasi Penerimaan (%)	<b>109,51</b>
Pagu Penggunaan (Rp)	29.800.000.000
Realisasi Penggunaan (Rp)	25,914,170,569
Realisasi Penggunaan (%)	<b>97.72</b>

## 2) Analisis hasil yang telah dicapai

**Tabel 3.79**

Target dan Realisasi dan Pagu dan Realisasi Penggunaan PNBPN 2021-2025

Pagu	2021	2022	2023	2024	2025
Target Penerimaan (Rp)	29.315.000.000	33.615.000.000	34.500.000.000,00	32.200.000.000,00	29.800.000.000
Realisasi Penerimaan (Rp)	27.946.735.781	33.172.845.322	35.635.254.983,00	36.704.633.828,00	32.634.323.030
<b>Realisasi Penerimaan (%)</b>	<b>95,33</b>	<b>98,68</b>	<b>103,29</b>	<b>114,00</b>	<b>109,51</b>
Pagu Penggunaan (Rp)	28.250.953.000	36.865.000.000	37.665.000.000,00	36.604.985.000,00	29.800.000.000
Realisasi Penggunaan (Rp)	24.397.524.858	35.954.386.033	35.783.134.722,00	35.771.873.914,00	25.914.170.569
<b>Realisasi Penggunaan (%)</b>	<b>86,36</b>	<b>97,53</b>	<b>95</b>	<b>97.72</b>	<b>86,96</b>



Gambar 3.2  
Grafik Target dan Realisasi Penerimaan dan Penggunaan  
Penggunaan PNBP 2021 -2025

Dari Tabel 3.79 dan Gambar 3.2 menunjukkan bahwa:

- 1) Realisasi penggunaan PNBP tahun 2021-2025 selalu dibawah pagu penggunaan fluktuatif dengan nilai Realisasi penggunaan terbanyak pada tahun 2024 sebesar 97,72% dan terendah pada tahun 2021 sebesar 86,36% dan pada tahun 2025 sebesar 86,96%.
- 2) Realisasi Penerimaan PNBP tahun 2021-2022 dibawah target penerimaan PNBP dikarenakan pandemi covid 19 yang memberlakukan pembatasan kegiatan dan pada tahun 2023-2025 realisasi Penerimaan **berhasil mencapai target** penerimaan PNBP.

Tabel 3.80  
Realisasi PNBP BLU TA 2021 – 2025

Jenis JPT	TAHUN				
	2021	2022	2023	2024	2025
Pengujian	12.134.836.549	11.305.234.900	11,862,008,900	2,702,329,675	14.370.185.000
Kalibrasi	2.682.139.050	2.689.761.450	2,737,869,550	2,576,481,150	2.787.828.900
Sertifikasi	6.330.043.500	6.026.592.600	6,677,132,500	8,509,182,000	7.521.155.000
Sampling	527.460.000	634.580.000	535,920,000	512,020,000	355.930.000

Jenis JPT	TAHUN				
	2021	2022	2023	2024	2025
Jasa Uji Profisiensi	997.107.100	1.217.094.200	1,241,900,000	1,469,520,000	1.549.088.000
Bimbingan dan pendampingan teknis industri	924.165.000	2.216.070.200	2,978,904,100	1,885,619,200	1.245.150.000
Konsultansi	306.370.000	173.720.000	183,240,000	426,178,600	413.400.000
Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri	2,607,736,315	6.992.649.996	6,627,809,048	4,597,414,993	7.997.000
Jasa Inspeksi Teknis	381.638.000	579.200.000	1,210,200,000	1,402,925,000	1.204.580.000
TKDN dan GRK	N/A	N/A	N/A	N/A	1.609.190.000
Pemeriksa Halal	N/A	N/A	N/A	N/A	27.827.000
Penyedia Bahan Acuan dan Uji Masa Simpan	N/A	N/A	N/A	N/A	52.000.000
Penggunaan Tenaga Ahli	22.865.000	118.025.910	63,284,100	119,773,268	62.394.000
Penggunaan Lahan dan Gedung	12.278.500	46.238.500	42,537,500	58,200,000	115.230.000
Penggunaan Alat dan Mesin	222.300.000	261.330.000	224,709,900	234,890,000	229.734.000
Bunga Bank	397.128.819	390.050.739	514,590,997	463,933,263	387.249.000
JPT lainnya	400.667.948	522.296.827	735,148,388	1,746,166,679	695.385.130
<b>Total</b>	<b>27,946,735,781</b>	<b>33,172,845,322.00</b>	<b>35,635,254,983</b>	<b>36,704,633,828</b>	<b>2.634.323.030</b>
<b>Pertumbuhan</b>	<b>35</b>	<b>19</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>-11,04</b>

Tabel 3.80 menunjukkan pertumbuhan realisasi PNBPN 5 (lima) tahun cukup fluktuatif naik turun, hingga capaian pada tahun 2025 Realisasi PNBPN sebesar Rp. 32.634.323.030 atau 109,51 % dari target sebesar **Rp. 29.800.000.000,-**. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, Pertumbuhan PNBPN tahun 2025 turun atau -11,04 %.

**Tabel 3.81**  
Persentase Kontribusi PNBП TA 2021- 2025

No	Jenis JPT	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Pengujian	43,42	34,08	33.29	35.61	44.03
2	Kalibrasi	9,60	8,11	7.68	7.02	8.54
3	Sertifikasi	22,65	18,17	18.74	23.18	23.05
4	Sampling	1,89	1,91	1.5	1.39	1.09
5	Jasa Uji Profisiensi	3,57	3,67	3.49	4	4.75
6	Bimbingan dan pendampingan teknis industri	3,31	6,68	8.36	5.14	3.82
7	Konsultansi	1,10	0,52	0.51	1.16	1.27
8	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri	0,46	21,08	18.6	12.53	0.02
9	TKDN dan GRK					4.93
10	Jasa Inspeksi Teknis	1,37	1,75	3.4	3.82	3.69
11	Penggunaan Tenaga Ahli	0,08	0,36	0.18	0.33	0.19
12	Penggunaan Lahan dan Gedung	0,04	0,14	0.12	0.16	0.35
13	Penggunaan Alat dan Mesin	0,80	0,79	0.63	0.64	0.7
14	Bunga Bank	1,42	1,18	1.44	1.26	1.19
15	JPT lainnya	1,43	1,57	2.06	4,76	2.38
	<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Pada Tabel 3.81, Persentase Kontribusi PNBП selama lima tahun masing-masing layanan fluktuatif, kontribusi realisasi PNBП lima tahun terakhir terbesar dihasilkan dari jenis Jasa Pelayanan Teknis (JPT) yang pertama Pengujian, kedua Sertifikasi dan ketiga Kalibrasi.

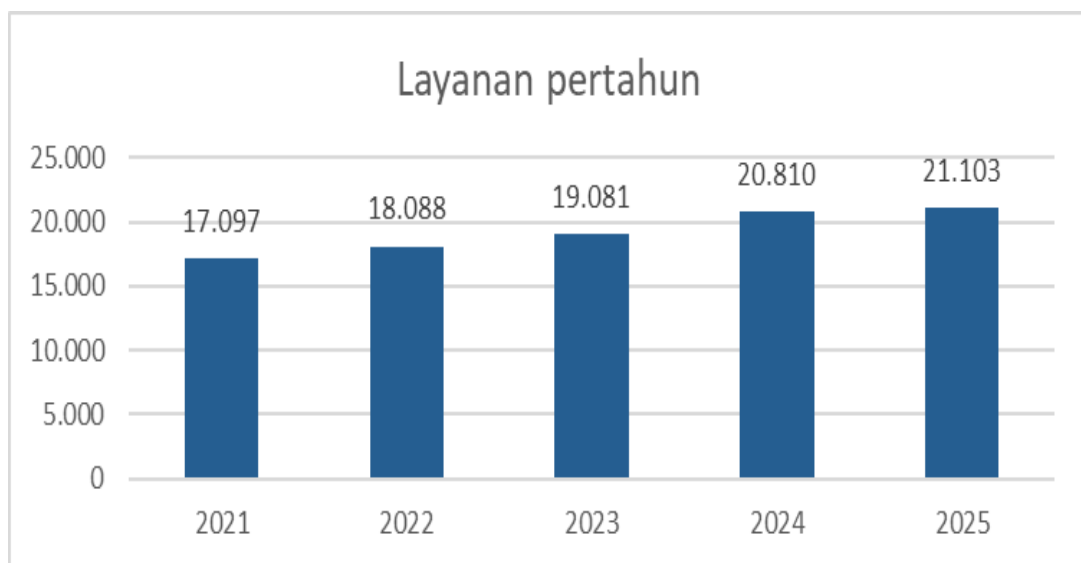
**Tabel 3.82**  
Jumlah Pelanggan 2021-2025

No	Jenis JPT	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Riset	5	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Pelatihan	35	152	134	128	91
3	Pengujian	1,413	949	1,457	1.957	1.380
4	Kalibrasi	346	351	364	549	408
5	Konsultansi	13	11	16	24	12
6	Sertifikasi	83	308	432	506	346
7	RBPI	4	8	2	24	4
8	Sampling	225	204	234	220	139
9	JPT lainnya	601	684	692	790	635
10	Uji Profisiensi	233	208	258	317	325
11	Inpeksi Teknis	16	18	38	43	33
12	Tenaga Ahli	5	16	30	23	13
13	Lahan dan Gedung	5	5	34	45	35
14	Alat dan Mesin	327	293	347	297	235
15	Jasa Bank	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
16	Uji Masa Simpan	N/A	N/A	N/A	N/A	2
17	Pemeriksa Halal	N/A	N/A	N/A	N/A	30
18	Verifikasi TKDN	N/A	N/A	N/A	N/A	46
	<b>Jumlah</b>	<b>3,511</b>	<b>3,207</b>	<b>4,038</b>	<b>4,923</b>	<b>3734</b>

Berdasarkan tabel 3.82 jumlah pelanggan dari tahun 2021 sd. 2025 cenderung meningkat setiap tahun meskipun sempat turun pada tahun 2025 dengan jumlah sebesar 4.734 pelanggan.

**Tabel 3.83**  
Jumlah Volume Layanan Tahun 2020-2025

No	Jenis Layanan/ Tahun	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Pengujian	Contoh	8.676	7.685	8.577	9.786	10.341
2	Kalibrasi	Alat	6.307	7.030	7.364	7.411	7.519
3	Sertifikasi	MoU	617	625	698	904	721
4	Jasa Sampling	Perusahaan	253	272	243	373	299
5	Uji Profisiensi	Laboratorium Peserta	15	671	669	778	731
6	Bimbingan dan pendampingan teknis industri	Orang	1.133	1.681	1.262	1.320	1.351
7	Konsultasi	Kontrak	8	10	9	14	10
8	Optimalisasi pemanfaatan teknologi industri	Kontrak	6	3	2	7	6
9	Inpeksi Teknis	Titik Proses	82	111	257	217	125
<b>Jumlah Layanan</b>			<b>17.097</b>	<b>18.088</b>	<b>19.081</b>	<b>20.810</b>	<b>21.103</b>



Gambar 3.3 Grafik Jumlah Volume Layanan Tahun 2021-2025

Pada Tabel 3.83 dan Gambar 3.3 menunjukkan jumlah volume layanan Tahun tahun 2021-2024 terus meningkat, tahun 2025 merupakan jumlah volume layanan terbesar sebanyak **21.103** layanan.

### 3) Kendala

Secara umum realisasi volume layanan jasa teknis tiga tahun terakhir meningkat. Namun dari segi penerimaan PNBK untuk layanan pengujian mengalami penurunan meskipun pada tahun 2025 kembali meningkat padahal layanan ini memberikan kontribusi terbesar dari sisi pendapatan. Turunnya jumlah volume layanan pengujian dikarenakan sebagian pelanggan beralih ke kompetitor jasa layanan pengujian.

### 4) Rekomendasi

- 1) Peningkatan layanan terutama delivery time agar pelanggan tidak beralih ke kompetitor.
- 2) Penambahan kapasitas layanan dengan cara penambahan sarana dan prasarana khususnya peralatan laboratorium dan penunjang layanan baru.

**Tabel 3.84**

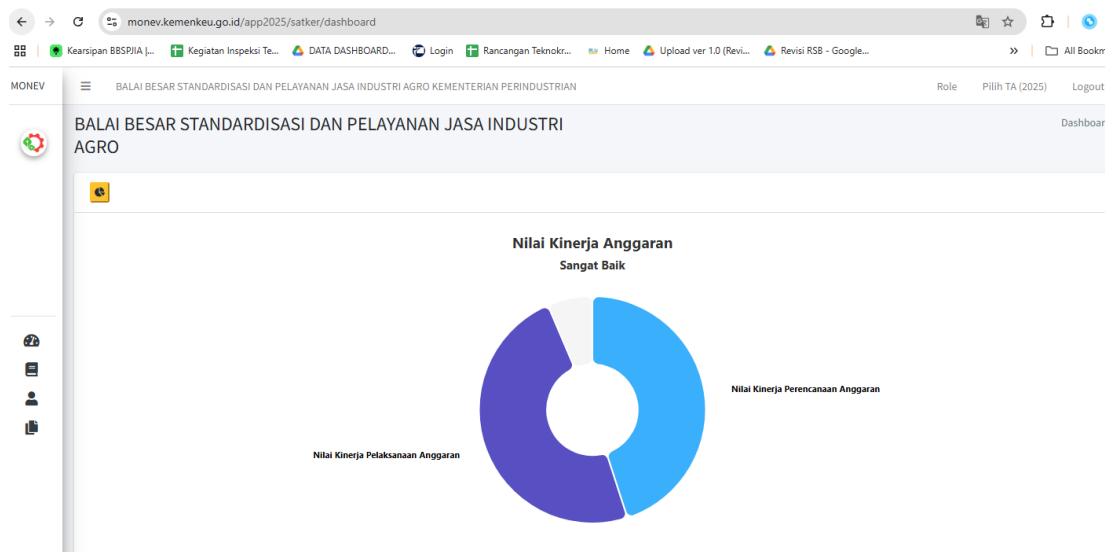
Rasio Terhadap Realisasi Anggaran

Pencapaian Target	Rata-rata Capaian (%)	Rasio Terhadap Realisasi Anggaran
Indikator Kinerja Tujuan	100,32	90,71
Indikator Kinerja Sasaran Strategis	116,46	95,48
Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja	116,46	95,48
Realisasi fisik	100	95,48
<b>Rata-rata</b>	<b>108,31</b>	<b>96,99</b>

Berdasarkan Tabel 3.84 menunjukkan bahwa Pada tahun 2025 Rasio terhadap realisasi anggaran adalah rata-rata capaian sebesar 108,31 % dengan Rasio terhadap realisasi terhadap anggaran sebesar 96,99 %.

#### b. Aplikasi SMART Kementerian Keuangan

Sedangkan berdasarkan aplikasi SMART Kementerian Keuangan Nilai Kinerja Anggaran BBSPJIA tahun 2025 yang terdiri dari : 1) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran, 2) Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan 3) Nilai Kinerja Anggaran masuk dalam kriteria **Sangat Baik**. seperti pada Gambar 3.3.



**Gambar 3.3 Dashboard Aplikasi SMART Kementerian Keuangan**

### 3.3. Penghargaan BBSPJIA TA. 2025

Penghargaan dari Eksternal Kemenperin :

1. BBSPJIA mendapat penghargaan atas Capaian Kualitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satker Lingkup KPPN Bogor Periode Semester I tahun 2025 kategori Satker dengan Nilai Terbaik (100) pada 4 ikdiktaor

dengan Bobot 70% dari KPPN Bogor, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Kementerian Keuangan.



Penghargaan dari Internal Kemenperin :

1. Piagam Penghargaan Arsiparis Teladan Kementerian Perindustrian Arsiparis Kategori Keahlian Peringkat 3 diberikan kepada Fina Dwiyanti Arsiparis Ahli Madya BBSPJIA.



## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1. Kesimpulan

Pada tahun 2025 BBSPJIA telah menetapkan 1 (satu) Tujuan dan 7 (tujuh) Sasaran Strategis dengan 18 (delapan belas) indikator dalam Perjanjian Kinerja (Perjakin). Secara umum BBSPJIA selama tahun 2025 telah berhasil melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Rata-rata capaian indikator sasaran strategis sebesar 116,468 dengan rincian 15 (lima belas) indikator sama/lebih dari 100%, dan 3 (tiga) indikator capaian masih dibawah 100%. Adapun indikator yang belum memenuhi target yaitu:

1. Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri, dari yang ditargetkan sebesar 3.750 perusahaan industri, realisasi hanya sebesar 3.734 (99,5%). Hal ini dikarenakan ada beberapa layanan yang jumlah kliennya tidak memenuhi target terutama layanan sertifikasi.
2. Indeks Profesionalitas ASN (IPASN), dari yang ditargetkan indeks 81,3 realisasi hanya mencapai 78,03 (95,98%). Hal ini disebabkan adanya permasalahan kelengkapan data (input mandiri) ASN, terkait dengan data riwayat kepegawaian yang belum diperbarui oleh ASN.
3. Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah, dimana target tahun 2025 sebesar 81%, realisasi sebesar 71,84% (88,69%). Hal ini dikarenakan keterbatasan belanja bahan kimia dan mesin/peralatan laboratorium yang didapatkan dari produsen dalam negeri sehingga nilai impot cukup tinggi.

Realisasi anggaran Tahun 2025 berdasarkan pagu efektif sebesar Rp. 43.069.507.909,- atau 95,84 % dari pagu sebesar Rp. 44,939,538,000,- jika dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2024 (98.28%) terhadap realisasi pada tahun 2025 (95,84%) mengalami penurunan realisasi anggaran sebesar yaitu 2,44%. Realisasi anggaran tahun 2025 terdiri dari 1) realisasi penyerapan anggaran yang bersumber Rupiah Murni (RM) sebesar Rp.11.471.725.161,- atau 92,63% dari pagu RM sebesar Rp 11.556.741.000,- dan 2) realisasi penggunaan anggaran bersumber PNPB BLU

realisasi penggunaan anggaran bersumber PNBP BLU sebesar Rp. 31.589.328.712,- atau 94,63% dari pagu efektif yang bersumber PNBP sebesar Rp. 33.382.797.000,-.

Realisasi Penerimaan PNBP BLU Tahun 2025 sebesar Rp.32.634.323.030,- atau 109,57 % dari target sebesar Rp 29.800.000.000,- jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 (Rp 36.704.633.828,-), PNBP tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 11,04 %.

Sehubungan dengan telah terbitnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 358/KMK.05/2018 tanggal 2 Mei 2018 tentang Penerapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Balai Besar Industri Agro pada Kementerian Perindustrian, maka tunjangan kinerja sudah dianggarkan dari anggaran PNBP BLU sendiri dan dikategorikan Belanja Barang yang bersumber dari PNBP BLU. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari seluruh *stake holder* yang ada di BBSPJIA karena realisasi PNBP ini akan berdampak langsung kepada besaran nominal dan kontinuitas Remunerasi BLU yang diterima oleh seluruh pegawai BBSPJIA baik itu yang ASN maupun non ASN.

#### 4.2. Permasalahan dan Kendala

Hambatan dan kendala umum secara keseluruhan dalam mencapai sasaran dalam Perjanjian Kinerja BBSPJIA Tahun 2025 yaitu ada beberapa layanan yang jumlah kliennya tidak memenuhi target. Terkait dengan layanan sertifikasi, proses administrasi melalui SIINAS membutuhkan waktu yang cukup lama dan pelanggan mengalami kesulitan dalam pemenuhan berbagai dokumen yang harus dilengkapi. Adanya penurunan penerimaan layanan sertifikasi juga berdampak langsung kepada penurunan penerimaan klien layanan pengujian. Selain itu kegiatan bimbingan teknis, pelatihan dan pendampingan dari para pelanggan seperti pemerintah daerah mengalami penurunan karena efisiensi anggaran.

Hambatan dan kendala umum secara keseluruhan dalam mencapai target kinerja output kegiatan adalah adanya kebijakan efisiensi anggaran sehingga anggaran yang semula bisa diakomodir oleh rupiah murni menjadi sangat terbatas dan harus ditanggulangi dengan anggaran PNBP BLU, yang pada akhirnya kegiatan yang dibiayai

PNBP menjadi tidak maksimal. Blokir anggaran pada pengadaan peralatan laboratorium juga mengganggu kelancaran pelaksanaan layanan jasa teknis. Beberapa peralatan yang sangat dibutuhkan untuk menggantikan peralatan yang sudah rusak menjadi tertunda pengadaannya.

#### **4.3 Saran dan Rekomendasi**

Berdasarkan kendala yang dihadapi maka BBSPJIA perlu melakukan beberapa langkah tindak lanjut yaitu:

- Pelayanan kepada pelanggan (industri) harus tetap dilaksanakan dengan optimal dan prima.
- Pengembangan dan penambahan ruang lingkup layanan serta penyempurnaan aplikasi untuk menunjang layanan.
- Untuk mendukung optimalisasi penyerapan anggaran pada pelaksanaan kegiatantahun berikutnya, masing-masing koordinator kegiatan diharapkan agar lebih cermat dalam menyusun rencana kinerja berikut rencana penyerapan anggaran serta melakukan identifikasi atas potensi anggaran yang tidak terserap.

# LAMPIRAN

**Pengukuran Kinerja Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro (BBSPJIA) Tahun 2025**

Kode	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Komponen/ Subkomponen	Anggaran			
								Pagu	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
TJ	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*	Indeks	3.72	3.76	101.08%	Pelaksanaan Pemasaran /Promosi /Pameran / Publikasi Layanan Teknis	-	-	-
							Gaji dan Tunjangan				
		2	Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/ instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri *	Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha/ Instansi	3750	3,734	99.57%	Jasa pelayanan teknis pengujian industri agro	Rp 7,871,291,000	Rp 7,139,944,704	90.71%
SK.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	1	Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai <i>Service Level Agreement (SLA)</i>	Persen	95.00	100	105.26%	Kalibrasi Peralatan Standar Laboratorium Kalibrasi	Rp 142,888,000	Rp 124,588,950	87.19%
							Re-Akreditasi ABICAL Kalibrasi	Rp 1,500,000	Rp 1,500,000	100.00%	
		2	Nilai <i>Net Promote Score (NPS)</i>	Nilai	50.00	72.99	145.98%	Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri agro	Rp 481,508,000	Rp 366,527,165	76.12%
SK.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	1	Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Indeks	1	2	200.00%	Jasa pelayanan teknis sertifikasi industri agro	Rp 1,810,900,000	Rp 1,687,017,823	93.16%
		2	Jumlah hasil layanan jasa industri	Hasil Layanan	20600	23090	112.09%	Operasional Layanan Kalibrasi	Rp 521,530,000.00	Rp 432,598,967.00	82.95%
		3	Nilai <i>Revenue on Asset (RoA)</i>	Persen	8.40	9.27	110.36%	Operasional Layanan Penyelenggaraan Uji Profisiensi	Rp 490,280,000	Rp 397,915,648	81.16%
		4	Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)	Persen	75.00	97.48	129.97%	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp 5,717,098,000	Rp 5,502,581,287	96.25%
SK.3	Terwujudnya SDM yang profesional	1	Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	Indeks	81.30	78.03	95.98%	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM	Rp 310,000,000	Rp 268,014,343	86.46%
SK.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik	1	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	Persen	20.00	20.00	100.00%	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	Rp 50,000,000	Rp 49,794,600	99.59%
		2	Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Persen	77.00	78.3	101.69%	Pengadaan peralatan inventaris perkantoran	Rp 40,000,000	Rp 31,801,500	79.50%
		3	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	4.20	4.35	103.57%	Gaji dan Tunjangan	Rp 9,910,563,000	Rp 9,852,051,713	99.41%
							Pengadaan peralatan inventaris perkantoran	-	-		
SK.5	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	1	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal telah ditindaklanjuti oleh Satker	Persen	60	100	166.67%	Jasa optimalisasi pemanfaatan teknologi industri agro	Rp 30,700,000	Rp 6,695,900	21.81%
		2	Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)	Nilai	85.00	89.50	105.29%	Jasa pelayanan teknis konsultansi teknis/manajemen industri agro	Rp 100,000,000	Rp 86,461,900	86.46%
SK.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi	1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	Nilai	79.90	83.00	103.88%	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp 14,160,000,000	Rp 14,108,058,327	99.63%
		2	Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai	95.00	97.14	102.25%	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	-	-	-
								Surveilen Penyelenggaraan Uji Profisiensi	Rp 43,650,000	Rp 42,880,000	98.24%
		3	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan	Nilai	75.00	93.00	124.00%	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	-	-	-
							Jasa pelayanan inspeksi teknik industri agro	Rp 214,030,000	Rp 171,524,747	80.14%	

Kode	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Komponen/ Subkomponen	Anggaran			
								Pagu	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
SK.7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri	1	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	Persen	81.00	71.84	88.69%	Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/ layanan industri agro	Rp 3,043,600,000.00	Rp 2,799,550,335.00	91.98%
						116.46%	<b>Total</b>	<b>Rp 44,939,538,000</b>	<b>Rp 43,069,507,909</b>	<b>95.84%</b>	

MATRIKS KETERKAITAN SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA BBSPJIA TAHUN 2025

KEMENPERIN			BSKJI			BBSPJIA				
KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KODE	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KODE	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		
SS2	Tumbuh dan Berkembangnya Industri yang Inklusif	1. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	SP4	Meningkatnya Kontribusi Jasa Industri Dalam Rangka Mendukung Penumbuhan dan Pengembangan Industri yang Inklusif	1. Kontribusi jasa industri terhadap PDB Nasional	TJ	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
		2. Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Industri Nonmigas						2. Jumlah Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha / Instansi yang Memanfaatkan Layanan Jasa Industri		
		3. Persentase Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap Total Pekerja						3. Persentase pelayanan tepat waktu sesuai Service Level Agreement (SLA)		
		4. Pertumbuhan PDB Industri Kecil dan Menengah						2. Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)		
								1. Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		
		2. Jumlah hasil layanan jasa industri								
								3. Nilai Revenue on Asset (RoA)		
								4. Rasio Pendapatan Operasional pada Biaya Operasional (POBO)		
			SP2	Berkembangnya Standardisasi Industri dalam Rangka Mendorong Industri yang Inklusif	1. Persentase peningkatan perusahaan industri yang produknnya sudah tersertifikasi SNI wajib bidang industri					
SS4	Meningkatnya Efisiensi Industri Melalui Pemanfaatan Teknologi	Perusahaan Dengan Nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0	SP3	Meningkatnya Daya Saing Industri yang Telah Melakukan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi	1. Persentase peningkatan produktivitas perusahaan industri melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi industri					
					2. Persentase peningkatan efisiensi perusahaan industri yang menerapkan digitalisasi manufaktur					
SS5	Meningkatnya Penerapan Industri Berkelanjutan	Penurunan emisi GRK pada sektor industri yang menjadi prioritas dekarbonisasi	SP1	Meningkatnya Praktik Industri Hijau dan Ekonomi Sirkular	1. Persentase capaian penurunan emisi GRK terhadap target nasional pada industri yang menjadi prioritas dekarbonisasi					
		Rasio penggunaan material sirkular di sektor industri			2. Jumlah perusahaan industri berdasarkan lokasi yang sudah tersertifikasi industri hijau					
SS7	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Pada Kementerian Perindustrian Yang Baik	Indeks RB Kementerian Perindustrian	SP5	Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Rangka Menunjang Produktivitas Industri	1. Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	SK6.7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri	1. Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah		
			SP6	Terwujudnya SDM yang profesional	1. Indeks Profesionalitas ASN	SK6.3	Terwujudnya SDM yang profesional	1. Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)		
			SP7	Penguatan sistem informasi	1. Persentase jenis layanan di seluruh	SK6.4	Penguatan sistem informasi			1. Persentase jenis layanan yang
					2. Indeks Manfaat Kerja Sama					2. Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
			3. Persentase satker yang memperoleh Indeks Pelayanan Publik Minimal A	3. Indeks Pelayanan Publik (IPP)						
4. Tingkat Penerapan SPBE &										
SP8	Tercapainya pengawasan internal yang	1. Persentase rekomendasi hasil	SK6.5	Tercapainya pengawasan internal yang	1. Persentase rekomendasi hasil					
		2. Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan (unit kearsipan)			2. Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan (Unit Kearsipan)					

KEMENPERIN			BSKJI			BBSPJIA		
KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KODE	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KODE	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
			SP9	Terwujudnya Akuntabilitas Organisasi	1. Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BSKJI	SK6.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi	1. Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker
					2. Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran			2. Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
					3. Penilaian dan analisis laporan keuangan			3. Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan

**Realisasi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro (BBSPJIA Per Triwulan TA. 2025**

Kode	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	TW I		TW II		TW III		TW IV	
							% Fisik		% Fisik		% Fisik		% Fisik	
							Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
TJ	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri	1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3.72	3.76	101.08%	25%	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
		2 Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/ instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri	Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha/ Instansi	3750	3,734	99.57%	25%	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
SK.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	1 Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai <i>Service Level Agreement (SLA)</i>	Persen	95.00	100	105.26%	25%	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
		2 Nilai <i>Net Promote Score (NPS)</i>	Nilai	50.00	72.99	145.98%	25%	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
SK.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	1 Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Indeks	1	2	200.00%	25%	20%	50%	40%	75%	65%	100%	100%
		2 Jumlah hasil layanan jasa industri	Hasil Layanan	20600	23090	112.09%	25%	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
		3 Nilai <i>Revenue on Asset (RoA)</i>	Persen	8.40	9.27	110.36%	25%	20%	50%	40%	75%	65%	100%	100%
		4 Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)	Persen	75.00	97.48	129.97%	25%	20%	50%	40%	75%	65%	100%	100%
SK.3	Terwujudnya SDM yang profesional	1 Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	Indeks	81.30	78.03	95.98%	25%	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
SK.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik	1 Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	Persen	20.00	20.00	100.00%	25%	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
		2 Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Persen	77.00	78.3	101.69%	25%	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
		3 Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	4.20	4.35	103.57%	25%	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
SK.5	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	1 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal telah ditindaklanjuti oleh Satker	Persen	60	100	166.67%	25%	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
		2 Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)	Nilai	85.00	89.50	105.29%	25%	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
SK.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi	1 Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	Nilai	79.90	83.00	103.88%	25%	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
		2 Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai	95.00	97.14	102.25%	25%	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%

Kode	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	TW I		TW II		TW III		TW IV		
							% Fisik		% Fisik		% Fisik		% Fisik		
							Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		3	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan	Nilai	75.00	93.00	124.00%	25%	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
SK.7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri	1	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	Persen	81.00	71.84	88.69%	25%	20%	50%	45%	75%	70%	100%	100%

## Realisasi Kinerja Renstra Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro (BBSPJIA) TA. 2025-2029

Tujuan/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja		2025			2026	2027	2028	2029	TOTAL 2025-2029		
		Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Target Renstra	Target Renstra	Target Renstra	Total Target Renstra	Realisasi sd 2025	%
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>TJ Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri</b>											
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3.72	3.76	101.08%	3.73	3.74	3.75	3.76	18.7	3.76	20.11%
2	Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/ instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri	3750	3,734	99.57%	3800	3850	3900	3950	19250	3734	19.40%
<b>SK.1 Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional</b>											
1	Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai	95.00	100	105.26%	95.00	96.00	96.00	97.00	479	100	20.88%
2	Nilai <i>Net Promote Score</i> (NPS)	50.00	72.99	145.98%	55	60	65	70	300	72.99	24.33%
<b>SK.2 Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri</b>											
1	Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	1	2	200.00%	1	2	2	2	8	2	25.00%
2	Jumlah hasil layanan jasa industri	20,600	23,090	112.09%	21,218	21,960	22,729	23,836	110,343	23,090	20.93%
3	Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)	8.40	9.27	110.36%	8.50	8.50	8.75	9.00	43.15	9.27	21.48%
4	Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)	75.00	97.48	129.97%	76.00	78.00	80.00	82.00	391	97.48	24.93%
<b>SK.3 Terwujudnya SDM yang profesional</b>											
1	Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	81.30	78.03	95.98%	81.40	83.50	84.00	84.50	414.7	78.03	18.82%
<b>SK.4 Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik</b>											
1	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	20.00	20.00	100.00%	40.00	60.00	80.00	100.00	300	20	6.67%
2	Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	77.00	78.3	101.69%	78.00	82.00	83.00	85.00	405	78.3	19.33%
3	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4.20	4.35	103.57%	4.51	4.52	4.53	4.54	22.3	4.35	19.51%
<b>SK.5 Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien</b>											
1	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal telah ditindaklanjuti oleh Satker	60	100	166.67%	62.00	65.00	67.00	70.00	324	100	30.86%
2	Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)	85.00	89.50	105.29%	86.00	87.00	88.00	89.00	435	89.5	20.57%
<b>SK.6 Terwujudnya akuntabilitas organisasi</b>											
1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	79.90	83.00	103.88%	79.95	80.00	80.25	80.50	400.6	83	20.72%

